



Dengan Menyebut Nama Allah
Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Bambang Qomaruzzaman

*Memahami
Administrasi Pendidikan
Dari Sudut Filsafat*

*Memahami Administrasi Pendidikan
Dari Sudut Filsafat*

Copyright© 2021
Hak Cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, Juli 2021

Penulis : Bambang Qomaruzzaman
Editor : Jamiludin
Desain Cover : Ahmad Muhajir

Diterbitkan oleh :
Pustaka Aura Semesta
Jl. PHH. Mustofa No. 120
Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat 40125

ISBN : 978-623-7231-37-0

Kata Pengantar

Administrasi merupakan udara bagi orang modern. Di manapun manusia modern pergi, selalu ada administrasi. Pesan tunggalnya adalah keteraturan. Administrasi pada awalnya memang agar membuat semua aspek jadi teratur. Setelah teratur baru bisa ditata menuju tujuan bersama, yakni keadilan dan kesejahteraan.

Itulah mimpi peradaban modern, Ibu Kandung dari Ilmu Administrasi atau Ilmu Manajemen.

Lalu bagaimana dengan Administrasi Pendidikan? Apakah Administrasi Pendidikan hanya pencangkokan tak sempurna

dari dua ilmu (administrasi dan pendidikan)? Itulah yang jarang dibicarakan, sedikit sekali buku yang membicarakan hal itu. Semuanya seperti sudah harus diterima begitu saja, padahal semestinya tidak begitu.

Cara berpikir yang tak menerima apa yang sudah kadung dianggap lazim adalah cara berpikir Filsafat. Cara berpikir seperti itulah yang akan ditemukan pada buku ini yang akan membongkar beberapa tema penting Administrasi Pendidikan dari Sudut Pandang Filsafat. Penulis buku ini, Bambang Qomaruzzaman (lebih dikenal dengan nama Bambang Q-Anees) memiliki latar belakang yang unik: dia seorang filsuf, namun menempuh S3 di Administrasi Pendidikan UPI Bandung. Jadilah buku ini, sebuah kumpulan catatan reflektif selama kuliah di UPI Bandung mengenai teori dan konsep administrasi Pendidikan dari perspektif Filsafat. Beberapa terlihat loncat-loncat menunjukkan daya jelajah yang tinggi, beberapa agak rumit karena harus menelusuri beberapa istilah dan konsep filsafat yang memang rumit, tapi secara keseluruhan buku ini ditulis dengan sangat baik dan enak dibaca.

Selamat membaca!

Prolog;

Jika Aristoteles Menjadi Kepala Sekolah

Sebenarnya Aristoteles adalah kepala sekolah, ia konon menempelkan satu pengumuman di gerbang sekolahnya, “Yang tak bisa matematika, tak usah masuk”. Tapi bagian ini akan membicarakan kepala sekolah sebagai manejer dari suatu organisasi pendidikan. Kira-kira apa yang dilakukannya?

Mari kita lihat arti manajemen terlebih dahulu.

Sederhananya, manajemen adalah pengelolaan organisasi. Tak ada manajemen di luar organisasi. Manajemen berdiri di atas organisasi. Karena itu, mari kita pahami dahulu makna organisasi.

Saya akan buat definisi sederhana lagi, organisasi adalah “sekumpulan orang yang sepakat untuk bekerja sama mencapai satu tujuan bersama”. Jadi, dapat disimpulkan, manajemen adalah pengelolaan sejumlah orang yang sudah sepakat bekerja sama itu, untuk mencapai tujuan bersama. Tentu saja tak hanya orang-orang yang dikelola, namun juga sumber daya yang ada dalam organisasi itu, misalnya benda-benda, uang, gedung, dan lain sebagainya.

Saat Anda menjadi kepala sekolah, Anda memiliki sejumlah orang dan sejumlah benda-benda. Ada sejumlah guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tuanya. Ini modal utamanya. Lalu ada benda-benda seperti bangunan sekolah, bangku, kursi, papan tulis, kertas-kertas dan buku-buku, gerbang sekolah, dan sebagainya. Di samping itu ada relasi sekolah itu dengan pemerintah, dengan masyarakat di sekitar, dengan pelaku bisnis, dan lainnya. Semua itu harus Anda kelola untuk mencapai tujuan sekolah itu.

Tapi satu kunci lain selain kerjasama di antara anggota organisasi adalah tujuan. Ya, tujuanlah yang menjadi perekat dari sejumlah orang sehingga mau bergabung dalam organisasi. Kerjasama dalam organisasi selalu terkait dengan tujuan yang sama. Tanpa kerja sama bukanlah disebut organisasi, melainkan kerumunan. Dan kerjasama itu terjadi karena ada tujuan yang sama.

Di sinilah Aristoteles menjadi perlu dibicarakan, terutama konsepnya mengenai *telos* atau *teleology*.

Semua yang ada, bagi Aristoteles, berjuang untuk mencapai tujuannya (*telos*). Manusia dan organisasi juga berjuang untuk

mencapai tujuan. Pohon Mangga berbuah mangga, karena memang itulah tujuan keberadaan pohon mangga. Kemanfaatan suatu barang juga tergantung pada tujuannya. Misalnya gelas diciptakan dengan tujuan untuk wadah bagi air minum. Keberadaan gelas akan hancur saat digunakan untuk wadah air kencing. Manusia juga demikian, ia hidup untuk menggapai tujuannya.

Namun tujuan manusia tidak sama dengan alam dan benda-benda. Alam memiliki tujuan yang alamiah, tak berubah, hanya mengikuti apa yang telah digariskan. Manusia punya kehendak, punya kebebasan. Yang pasti manusia memang tidak berbuah alamiah seperti mangga tadi, karena itu manusia harus memikirkan kebahagiaan yang dicapainya. Bagi Aristoteles, tujuan utama manusia adalah kebahagiaan.

Kebahagiaan sebagai sesuatu yang utama dalam penghidupan. Kebahagiaan ini bisa dicapai orang per orang menjalankan kehidupan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tujuan hidup, ujar Aristoteles, tidaklah mencapai kebaikan untuk kebaikan, melainkan mencapai kebaikan untuk merasakan kebahagiaan. Bagi seorang dokter kebahagiaan yang harus dikejarinya adalah kesehatan, bagi pengusaha adalah kemakmuran, bagi prajurit adalah kemenangan. Jadi yang menjadi ukuran adalah gunanya yang praktis. Tujuan manusia bukan sekadar mengetahui (seperti diyakini Plato), melainkan berbuat. Bukan untuk mengetahui apa itu budi, melainkan supaya kita menjadi orang yang berbudi.

Organisasi adalah kumpulan orang-orang. Di sekolah ada banyak orang yang masing-masing memiliki tujuan kebahagiaannya

masing-masing. Tugas organisasi adalah dapat meladeni tujuan kebahagiaan individual itu melalui pencapaian tujuan bersama.

Manusia perlu sekali tahu cara menguasai dirinya. Manusia yang tahu cara menguasai diri, akan hidup sebagaimana mestinya, tidak terombang-ambing oleh hawa nafsu, tidak tertarik oleh kemewahan. Untuk itu manusia harus mengambil jalan tengah antara kikir dan boros, antara sembrono dan pengecut, dan sejenisnya. Aristoteles kemudian mengajukan tiga hal yang perlu dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Pertama, manusia harus memiliki harta secukupnya supaya hidupnya terpelihara. Ihtwal alasan ini, Hatta menulis “Kemiskinan menghidupkan dalam jiwa manusia fiil yang rendah, memaksa ia menjadi loba. Milik membebaskan dia dari kesengsaraan dan keinginan yang meluap, sehingga ia menjadi orang-orang yang berbudi”

Kedua, alat yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan adalah persahabatan. Persahabatan adalah inti keadilan. “Seorang sahabat sama dengan satu jiwa dalam dua orang. Cuma persahabatan lebih mudah tercapai antara orang yang sedikit jumlahnya dari antara orang banyak”, tulis Hatta (h. 134)

Ketiga, keadilan. Keadilan terbagi dua, keadilan dalam arti pembagian barang-barang secara seimbang, relative sama menurut keadaan masing-masing. Kedua, keadilan dalam arti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Misalnya perjanjian mengganti kerusakan. Ini yang disebut keadilan hokum

Keadilan dan persahabatan, menurut Aristoteles, adalah

budi yang menjadi dasar hidup bersama dalam keluarga dan Negara. Persahabatan ini kemudian disebut sebagai solidaritas yang mendasari berdirinya organisasi atau Negara. Aristoteles memang membayangkan bahwa manusia secara individu akan mendapatkan kesempurnaannya melalui kesediaannya bekerjasama dalam kebersamaan.

Nah, jika Aristoteles menjadi kepala sekolah tentu situasinya jadi menarik. Semua guru, tenaga kependidikan, dan siswa dipercaya memiliki telos-nya masing-masing. Lalu Aristoteles akan mendorong semua orang mencapai telosnya itu. Tak hanya itu, ia akan menciptakan system organisasi yang penuh dengan persahabatan sehingga semua orang dapat mencapai telos itu. Karena, demikian diyakini Aristoteles, semua orang akan bahagia jika sudah sampai pada telosnya.

Selamat membaca!

Daftar Isi

Kata Pengantar —v

Prolog; Jika Aristoteles Menjadi Kepala Sekolah —vii

Daftar Isi —xiii

- 1 Administrasi dan Filsafat Modern —1
- 2 Administrasi dan Sistem Rasional —21
- 3 Filsafat Negara dan Administrasi —53
- 4 Filsafat Ekonomi dan Administrasi —85
- 5 Filsafat Manusia dan Administrasi —105
- 6 Filsafat Pendidikan dan Filsafat Administrasi Pendidikan
—127

- 7 **Administrasi dan Dunia Kehidupan —153**
- 8 **Filsafat Administrasi Pendidikan dan Contoh Rancangan
Administrasi Pendidikan —167**

Epilog; dari Teras Stoicisme —183

Daftar Pustaka —195

I

Administrasi dan Filsafat Modern

“Pencerahan adalah pembebasan manusia dari pengawasan yang diadakannya sendiri. Pengawasan adalah ketidakmampuan manusia untuk mempergunakan pengertiannya tanpa bimbingan orang lain. Yang diadakannya sendiri adalah pengawasan ini bila penyebabnya terdapat bukan pada kurangnya rasio melainkan pada kurangnya ketegasan dan keberanian untuk mempergunakan rasio itu tanpa bimbingan orang lain. *Sapere aude! :beranilah mempergunakan pikiranmu sendiri!* Itulah semboyan pencerahan”

(Imanuel Kant)

Menelusuri Sejumlah Pemahaman

Administrasi dapat dikatakan sebagai “anak kandung” dunia modern. Untuk itu bagian ini akan diawali dengan ulasan mengenai dunia modern. Untuk itu teori “Triad dialektis” Peter L Berger dalam bukunya *The Sacred Canopy*, digunakan untuk memahami kerangka modernitas

Triad Berger dapat dipahami dari kondisi dasar manusia dari pandangan antropologis. Manusia adalah makhluk yang belum-selesai. Dibanding hewan, misalnya, manusia adalah makhluk yang tidak langsung sesuai dengan lingkungannya. Begitu lahir, hewan langsung dilengkapi dengan bulu-bulu yang sesuai dengan lingkungannya, seraya suhu tidak menjadi masalah bagi kehidupan hewan. Manusia tidak demikian, ia lahir telanjang dan ini berarti ia untuk dapat bertahan hidup harus melakukan penyesuaian dengan lingkungannya, manusia harus menciptakan alat-alat yang membuatnya bisa bertahan dari ketidaknyamanan lingkungan.

Bagi manusia lingkungan lahiriahnya bukanlah data yang tinggal dipakai dan diterima. Lingkungan lahirian justru menakutkan, karena itu hal pertama yang dilakukan manusia adalah mengambil jarak dengan lingkungan alamiah. Mengambil jarak berarti tidak meninggalkan dunia, melainkan berada di dalamnya namun tidak membiarkan diri terpengaruh oleh dunia. Ada media yang mengantari diri manusia dengan lingkungan, yaitu rasio atau kesadarannya. Karena mediasi rasio ini manusia menjadikan tidak lagi cocok dengan lingkungannya, justru mengerjakan hal yang sebaliknya: mencocokkan lingkungan itu dengan apa yang menjadi kesadarannya. Meski demikian, ketidak-cocokan lingkungan ini

terus-menerus meluas, sehingga tak pernah dapat diatasi. Inilah yang menjadikan manusia sebagai seperti hewan yang “belum selesai”.

Kebelumselesaian inilah yang membuat manusia menjadi makhluk pencipta media-media, menciptakan perantara dengan lingkungannya. Manusia tak makan langsung apa yang ditemukannya, entah hewan atau tumbuhan. Manusia membuat mekanisme pengolahan, hewan dan tumbuhan itu diolah entah dengan dimasak, diberi bumbu, atau dicuci terlebih dahulu. Manusia terus-menerus menciptakan suatu jarak agar dapat bertahan dan sesuai dengan lingkungannya. Dari sinilah kemudian muncul apa yang disebut budaya.

Di samping menghadapi alam, manusia juga menghadapi manusia-manusia lain sebagai pihak luar atau lawan sekaligus sebagai yang sama dengan dirinya. Manusia lain adalah pihak luar (eksternalitas) sebab ia ada di luar dirinya, kadang mendukung kadang menentang apa yang diinginkan suatu individu. Tetapi manusia lain adalah pihak dalam (interioritas) karena sebagian besar perilaku manusia lain itu memiliki alasan dan motif yang sama dengan isi kesadaran, dengan apa yang disadari, oleh manusia pengamat. Karena itu, berkomunikasi dan berinteraksi melibatkan tukar-menukar antara tanda lahiriah perilaku dan maksud-maksud batiniah. Saat si Badu berkomunikasi dengan si Komo, si Badu mengekspresikan apa yang terlihat sekaligus yang ada dalam kesadarannya. Dengan cara ini, kegiatan manusia terhadap manusia lain bukan sekadar perilaku naluriyah yang mekanis dan buta, melainkan sebuah tindakan yang disadari dan mengandung makna.

Martin Luther Anton Zijderveld, dalam bukunya *The Abstract Society*, menyebut manusia sebagai *homo duplex*, makhluk ganda yang memiliki sisi *homo externus* dan *homo internus*¹. Di satu pihak manusia bersifat batiniah, *internus*, berpikir, menyadari sesuatu di luar dirinya, berjarak dengan cara mengkritisi segala yang di luar dirinya. Namun di lain pihak manusia adalah anggota spesies manusia: yang harus memainkan peran-peran yang sudah digariskan sebelumnya dan yang tunduk pada hukum-hukum objektif: *externus*. Maka, makna yang dihasilkan manusia juga bersifat unik sekaligus umum, “diciptakan baru” sekaligus “tinggal pakai dari yang sudah tersedia”. Dalam hal ini, seseorang yang “menciptakan” sistem administrasi baru selalu berada dalam dua arah, ia menciptakan “sesuatu yang baru” sekaligus merujuk pada sistem atau teori “yang sudah tersedia”.

Di sini kita dapat dua konsep, (a) terhadap lingkungannya manusia adalah makhluk yang belum selesai, (b) terhadap sesama manusia, ia adalah makhluk dupleks yang bermain di antara “mencipta yang baru” dan “menggunakan apa yang sudah ada”.

Kembali pada upaya manusia yang belum selesai. Agar ia merasa nyaman, manusia melengkapi hidupnya dengan melakukan ikhtiar tertentu. Misalnya membuat baju, rumah, atau sistem hubungan antar manusia demi tujuan tertentu. Baju, dan rumah adalah upaya manusia untuk mengubah alam menjadi semakin manusiawi. Inilah makna bahwa kebudayaan merupakan transformasi lingkungan lahiriah agar semakin sesuai dengan lingkungan batiniah atau isi kesadaran manusia.

¹ Bdk. Zijderveld, *The Abstract Society*, Middlesex: Penguin Books Ltd., 1970, him. 13-45.

Pemanusiawian itu dilakukan lewat kerja.

Kebudayaan juga mencakup penciptaan makna perilaku dan pola perilaku dalam sosoknya sebagai pranata-pranata sosio-kultural. Kerja, pranata sosial kultural, dan sejenisnya adalah kebudayaan yang diciptakan manusia agar dapat bertahan di tengah lingkungannya.

Kebudayaan dibuat manusia dan menjadi “alam kedua”nya. Karena diciptakan sesuai dengan kebutuhan, kebudayaan bersifat labil sesuai dengan sifat labil penciptanya yang serba belum selesai. Kebudayaan juga menjadi kenyataan yang “setengah jadi”. Maka sejarah, dalam hal ini, tak lain dari pergulatan masyarakat untuk mempertahankan atau memperkembangkan kebudayaan agar semakin sesuai dengan tuntutan lingkungan lahiriah maupun batiniah manusia.

Kemodernan adalah kebudayaan yang menciptakan sistem yang semakin kompleks. Manusia dalam hubungan dengan alam luaran (sekaligus terhadap dirinya) diatur dalam sistem-sistem yang semakin berjarak. Bandingkan dengan masyarakat-masyarakat pra-modern yang mengadaptasi diri dengan alam lahiriahnya lebih secara naluriah daripada secara rasional. Masyarakat pra-modern bersifat kosmosentris, antara lingkungan lahiriah dan lingkungan batiniahnya tak terdapat jarak yang tegas. Alam lahiriah terpantul dalam alam batiniah dan sebaliknya, sehingga kita bisa berbicara mengenai harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos. Kalaupun mereka sudah mulai menciptakan peralatan hidup, artifisialitas kebudayaan ini lebih merupakan perluasan “alam pertama” dan bukan substitusinya. Peralatan tidak anti-lingkungan lahiriah, dan juga memuaskan untuk lingkungan

batiniahnya karena berhubungan dengan makna-makna religius yang mengutuhkan penghayatan harmoni makrokosmos dan mikrokosmos. Sementara pada zaman modern, peralatan itu adalah “alam kedua” yang dalam banyak hal menggantikan “alam pertama”.

Masyarakat para-modern, merujuk pada *Strategi Kebudayaan CA Van Peursen*, mengikuti pola kebudayaan mitis. Ada beberapa ciri dari masyarakat pra-modern. Ciri *pertama*, mereka menyadari bahwa lingkungan lahiriahnya sebagai terhubung tanpa pemisahan. Dalam hal ini alam luar dan alam dalam saling berpenetrasi; subjek berpartisipasi dalam objek. Lalu, karena kesadaran bersesuaian dengan alam luar, ritme alamiah, seperti musim-musim, datangnya siang dan malam, atau pasang surutnya laut yang kembali secara teratur, membuat mereka menghayati waktu sebagai suatu daur yang berulang lagi dan lagi. Sejarah adalah suatu daur (lingkaran), maka setiap peristiwa tak kurang dari repetisi atau imitasi dari peristiwa-peristiwa primordial, sedangkan masa kini menjadi prafigurasi bagi masa depan.²

Ciri yang *kedua* adalah bahwa masyarakat pra-modern itu merupakan sebuah masyarakat kolektivistis. Ikatan-ikatan primordial masih begitu kuat, seperti hubungan darah, bahasa, lokasi, dan seterusnya. Kelompok adalah lingkungan lahiriah dan seperti alam fisik, alam sosial ini juga berpenetrasi ke dalam alam dalam, yaitu dengan menentukan jatidiri individu. Di luar kelompoknya, individu bukan hanya menjadi “bukan siapa-siapa”, melainkan juga masih seperti embrio yang dipaksa keluar dari

² Bukunya yang penting mengenai pokok ini adalah *Culture and Commitment A Study of Generation Gap*.

rahim. Dalam arti ini, individu sebenarnya belum bereksistensi, yang bereksistensi adalah kelompok.

Sebagai ciri *ketiga* dapat dikatakan bahwa mereka tidak memisahkan yang sakral dari yang profan. Seluruh lingkungan alamiah dan sosialnya adalah sebuah totalitas yang sakral. Pranata religius bukan sekadar salah satu dari pranata-pranata lain, melainkan bahwa semua pranata itu sendiri religius. Agama menjadi — meminjam istilah Berger — prinsip kosmisasi yang mengubah khaos dalam pemahaman dan interaksi menjadi suatu kosmos yang tertata.³

Masyarakat Modern tidak memiliki ketiga ciri tersebut. Triad Berger memberikan pemahaman menarik mengenai pembentukan kesadaran kemodernan. Berger membagi momen kesadaran ke dalam tiga bagian: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Triad Berger

Secara sederhana Triad Berger mengemukakan tiga momen kesadaran manusia, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap awal, manusia mengemukakan isi alam batiniahnya dan menjadikan pernyataannya itu sebagai sebuah cara pandang (bahkan cara hidup) baru terhadap diri dan lingkungannya. Inilah momen eksternalisasi. Kemudian, setelah kesadarannya tereksternalisasi kesadaran ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk nyata (obyektiv) dalam bentuk alat-alat atau sistem aturan; inilah momen obyektivasi. Terakhir adalah internalisasi, yaitu proses memaknai apa yang sudah tereksternalisasikan dan terobjektivasikan itu.

³ Lihat Berger, op.cit., hlm. 25.

Momen eksrernalisasi adalah momen kesadaran yang tercurah ke dalam kenyataan. Kesadaran modern, secara historis, dimulai sejak Renaissance abad ke-16, dan memuncak dengan *Aufklarung* abad ke-18. Saat itu manusia mengambil jarak dengan lingkungannya. Descartes mengumpankan ungkapan “*Cogito ergo sum*” (Aku berpikir maka Aku ada), yaitu bahwa aku adalah subyek mandiri yang berhadapan (tidak menjadi bagian dari) dengan alam. Alam bukan hanya berbeda, namun juga dipisahkan dan menjadi obyek dari diri manusia “Sang Penentu”. Kemudian pernyataan ini juga dapat berarti bahwa pengetahuanku tentang apapun merupakan hasil pemikiranku sendiri dan bukan diturunkan dari tradisi atau wahyu.

Berpangkal dan *subject* yang menentukan ini, muncul beberapa aspek kesadaran modern lain yang biasanva disebut dengan beberapa istilah, yaitu progres, individuasi, emansipasi, dan sekularisasi. *Progres* atau kemajuan, adalah suatu kesadaran waktu sebagai sebuah arus yang tak bisa diulang. Kekinian itu unik dan begitu lewat sekejap menjadi kesilaman; artinya, ia lenyap ke belakang. Waktu tak bisa diulangi, ia memiliki arah ke depan, menuju kemajuan. Jika demikian, suatu seri waktu tidak sekadar berisi rentetan peristiwa tanpa arah. Setiap saat adalah potensi kreatif, maka harus merupakan perbaikan atas saat yang sebelumnya. Dengan kata lain, kekinian merupakan peningkatan kualitatif kelampauan dalam rangka lebih meningkatkannya dalam kenantian. Nasib, dalam kerangka progres ini, sudah diubah menjadi pilihan dan kesempatan.

Individuasi berarti munculnya diri sebagai sosok yang mandiri yang berbeda dari masyarakatnya. Kemodernan membebaskan individu dari entitas-entitas kolektifnya, bahkan

menjadi kontraposisi kolektivitas. Diri itu otonom, dalam arti dapat menghasilkan *nomos* (hukum)-nya sendiri (*auto*) atau otonom. Filsuf Locke, Hobbes, dan Rousseau menegaskan bahwa bahwa *nomos* (hukum) masyarakat bukan berasal dan dunia-sana melainkan ciptaan individu-individu otonom.

Aspek lain dari subjectum adalah *emansipasi*. Emansipasi adalah pemuliaan apa yang semula tersingkir menjadi mendapat tempat di dunia publik. Emansipasi adalah sebuah kesadaran untuk menerabaspembatasan-pemliatasan dan kendala-kendaba yang dihadapi oleh suatu subjek dalam mengeksternalisasikan diri. Emansipasi merupakan praktek untuk mengubah eksistensi menjadi lebih adil. Pada akhirnya, emansipasi dapat dipahami sebagai pembentukan kenyataan sosial menurut kriteria-kriterria dalam diri subjectum itu, harapan-harapan normatifnya akan keadilan. Struktur, yaitu lingkungan lahiriah sosial, disesuaikan (melalui praksis revolusioner) dengan kesadaran, yaitu lingkungan batiniah atau subjectum itu. Akhirnya, aspek subjectum yang lain adalah *sekularisasi*. Sekularisasi dapat diartikan sebagai sebetuk kesadaran yang membedakan atau bahkan memisahkan antara yang sakral dan yang profan. Istilah sekularisasi berhubungan dengan gerakan-gerakan historis untuk membebaskan diri dari dominasi agama dalam kenyataan sosial.

Terhadap situasi subjectum inilah istilah Weber bahwa dunia modern adalah saat *disenchantment of the world* dapat dipahami. Istilah *disenchantment of the world*— yang bisa kita terjemahkan sebagai “hilangnya pesona dunia” adalah satu gambaran mengenai dunia modern yang sudah tidak lagi dikepung oleh kekuatan-kekuatan gaibnya yang menakutkan sekaligus mempesona. Lingkungan itu sekarang dihadapi sebagai suatu

dunia material atau objek belaka. Modern “sudah dibersihkan” dari yang sakral dan diisi oleh yang subjectum Modern mengalihkan orientasi manusia dan keterpesonaannya pada dunia supra-indrawi ke arah dunia indrawi, dari kontemplasi alam ke transformasi alam, dan dan determinasi tradisi ke transformasi sosial.

Ketika pesona dunia gaib menghilang, dunia diatur secara otonom oleh manusia. Tuhan atau alam tidak lagi sebagai pengatur, sang pengatur adalah hukum buatan manusia yang disusun secara rasional. Kekuasaan Tuhan atau alam, pada zaman modern, dirubah menjadi mekanisme-mekanisme administratif-yuridis.

Administrasi sebagai hasil dari Momen Objektivasi

Momen eksternalisasi, adalah pencurahan kesadaran ke lingkungan lahiriah atau pengalirahan kesadaran. Pengalirahan kesadaran itu kemudian diobjektivasikan dalam bentuk pranata-pranata modern. Pranata-pranata menjadi semacam “materialisasi” kesadaran, yaitu pengejawantahan kesadaran ke luar dirinya. Dia berada “di sana”, menjadi suatu kenyataan otonom dan obyektif yang berhadapan dengan manusia -- karena obyektif, setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Pranata modern ini kemudian menjadi suatu lingkungan lahiriah bagi manusia modern.

Pranata-pranata itu muncul dalam produksi teknologis dan birokrasi. Produksi teknologis adalah hasil objektivasi dari kesadaran manusia akan dunia alamiahnya sedangkan birokrasi merupakan hasil transformasi interaksi sosial. Keduanya diatur dengan kesadaran modern yang berciri: *rasional, otomatis, monistis*,

universal, dan juga *otonom*.

Ciri rasional di sini berarti bahwa sistem itu memiliki sasaran pragmatis tertentu yang bisa dipahami menurut kegunaan dan hasil-hasilnya. Semakin efektif dan efisien, semakin rasionallah sistem itu. Otomatisme berarti bahwa manusia tidak perlu mengambil keputusan atas proses kerja sistem itu karena sistem itu dapat menentukan diri secara mekanis dan repetitif. Kemudian, karena sebuah sistem yang efisien dan efektif semestinya dikendalikan oleh satu pusat, totalitas sistem itu merupakan sebuah jaringan integral yang pada akhirnya bersifat tunggal atau *monistis*. Jaringan monistis sistem ini hanya bisa operasional kalau memiliki komponen-komponen dengan standar-standar umum dan dapat diimplikasikan secara *universal*. Akhirnya, kita bisa memahami bahwa totalitas jaringan monistis dan universal yang dapat bekerja sendiri ini sebenarnya merupakan sebuah entitas yang *otonom*, lepas dari kesadaran manusia. Demikianlah ciri-ciri teknologi ini bersesuaian dengan momen objektivasi dalam triad Berger. Sebagai suatu kenyataan objektif teknologi yang otonom ini terbuka untuk digunakan oleh siapa saja, tetapi juga bersifat *koersif*, karena mengandung tuntutan-tuntutan prosedural untuk mengoperasikannya. Artinya, sesudah kesadaran menjadi teknologi hasilnya ini sekarang ganti memerintah kesadaran.

Administrasi atau birokrasi adalah hasil objektivasi. Subjectum yang sudah mengalami individuasi, emansipasi, dan sekularisasi ini membangun dunia sosialnya menurut kaidah-kaidahnya sendiri. Pada zaman modern kaidah-kaidah rasional, seperti efisiensi, keefektifan, kontrol dan kegunaan, diberlakukan di dalam kenyataan sosial. Birokrasi menjadi kenyataan otonom yang menghadapi dan mengatur individu-individu yang

menghasilkannya. Sebagai kenyataan otonom siapa pun dapat berpartisipasi dalam tindakan birokratis. Akan tetapi, sebagai kenyataan otonom dan objektif, birokrasi juga bersifat *koersif* atau memaksa individu-individu pembuatnya mentaati aturan administrasi itu.

Administrasi adalah tindakan rasional dalam menciptakan tatanan masyarakat menuju masa depan “yang dianggap” akan dapat menjadi lebih baik (seperti konsep waktu-liniernya modern). Ciri-ciri teknologis juga melekat dalam interaksi antarmanusia, yaitu dalam birokrasi modern (yang menurut Max Weber bersifat “legal rasional”).. Seperti dalam teknologi, memiliki cakupan yang luas. Sebagai sebuah sistem kekuasaan, birokrasi merupakan pola interaksi penguasa dan rakyat, atasan dan bawahan, yang tertata menurut norma-norma yang bersifat rasional (dalam pengertian teknologis di atas), yaitu efektif, efisien, bahkan monistis, universal, dan otomatis.

Ciri rasional seperti telah dikemukakan pada bagian teknologi menjadi hukum juga dalam administrasi. *Pertama*, sebuah sistem itu harus memiliki sasaran pragmatis tertentu yang bisa dipahami menurut kegunaan dan hasil-hasilnya. Tindak administrasi pun demikian adanya, selalu ada tujuan akhir yang dikelola bersama dengan mendayagunakan Sumber daya yang tersedia. *Kedua*, dunia modern menekankan bahwa semakin efektif dan efisien suatu sistem, maka semakin rasionallah sistem itu. Keefektifan dan keefisienan ini terkait dengan ciri *otomatisme* (kemampuan sistem dalam menentukan dirinya sendiri secara mekanis dan repetitif) yang juga menjadi ciri dasar administrasi yang baik dan benar. *Ketiga*, agar sistem efisien dan efektif maka sistem itu dikendalikan oleh satu pusat yang tunggal (*monistis*),

kemudian jaringan monistis sistem ini hanya hisa operasional kalau memiliki komponen-komponen dengan standar-standar umum dan dapat diimplikasikan secara *universal* (berlaku untuk segala hal, situasi, ruang dan waktu). Keempat, sebagai suatu kenyataan objektif maka sistem administrasi yang otonom ini terbuka untuk digunakan oleh siapa saja, tetapi sekaligus juga bersifat *koersif* atau memaksa pembuat sistem itu untuk tunduk terhadapnya. Suatu sistem selalu mengandung tuntutan-tuntutan prosedural untuk mengoperasikannya. Ini berarti, sistem administrasi yang semula berasal dari kesadaran untuk menata hubungan antar manusia berkepentingan pada saatnya kemudian akan ganti memerintah kesadaran pembuatnya.

Walaupun administrasi sebagai sebuah praktik dapat dirunut dari zaman pra-modern, yaitu dari gagasan-gagasan mengenai pengaturan manusia dan sumber daya, namun pada dunia modernlah administrasi memiliki lahan perkembangannya. Jams F Stoner dkk, misalnya dalam buku *Management*, mengemukakan bahwa manajemen dapat dirujuk dari Machiavelli dan Sun Tzu. Stoner merujuk pada kedua pemikir itu dengan asumsi bahwa manajemen adalah ihwal melakukan strategi. Machiavelli dan Sun Tzu adalah dua ahli strategi yang cukup terkemuka. Machiavelli misalnya mengemukakan sejumlah prinsip pengelolaan negara yang kemudian dapat diadopsi bagi pengelolaan organisasi:

Sebuah organisasi lebih stabil bila para anggotanya mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat yang ada dan menyelesaikan konflik di dalam organisasi mereka

Walaupun satu orang dapat memulai suatu organisasi, “organisasi itu akan terus berlangsung kalau diserahkan kepada

banyak orang untuk memeliharanya dan kalau banyak orang ingin memeliharanya”.

Seorang manajer yang lemah dapat mengikuti yang kuat, tetapi tidak dapat mengikuti yang lemah juga, dan mempertahankan wewenang.

Seorang manajer yang berusaha mengubah organisasi yang sudah mantap “harus mempertahankan paling sedikit bayangan dari kebiasaan lama”.

Walaupun demikian, sekali lagi ditegaskan, praktek administrasi saat ini dapat dibaca sebagai bagian dari kehidupan modern yang rasional dan otonom. Pada titik ini dapat ditegaskan bahwa dengan demikian pemahaman akan filsafat akan melengkapi pemahaman teoritis terhadap ilmu administrasi/manajemen.

Internalisasi: Momen Terpecahnya Manusia di Bawah Administrasi yang Kaku

Internalisasi adalah proses pembatinaan kesadaran terhadap realitas teknologi dan realitas tatanan sosial hasil dari eksternalisasi dan obyektivasi. Ketika sistem telah terwujud, manusia akan menjadi bagian dari sistem itu. Manusia bisa merasakan kebebasan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan karena sistem itu, atau juga bisa merasa dirinya diatur oleh ciptaannya sendiri. Dalam kaitannya dengan administrasi atau birokrasi, Max Weber dalam *Politik als Beruf* menyebut bahwa para politikus (atau birokrat, pegawai sebuah sistem birokrasi) sebagai “*leben von politik*” (hidup dari politik) dan bukan “*leben fur politik*” (hidup untuk politik). Mereka mendapat gaji dari negara

dan menjalankan tugas-tugas mereka “sesuai undang-undang”, mereka bekerja berdasarkan mekanisme yuridis yang itu-itu saja. Akhirnya, ketika bekerja secara mekanisme yuridis, *leadership* tidak akan ada, negara lama-kelamaan akan menjadi onggokan sistem *management* belaka. Inilah masalahnya, yaitu bahwa pada rentang waktu yang panjang sistem itu kemudian menjajah (baca mengatur dengan paksa) manusia pembuatnya, suatu paradoks yang digambarkan Erich Fromm seperti drama Samiri dan Sapinya. Menurut Fromm pada *The Sane Society*, agar ciptaannya dianggap luar biasa hebat (menandingi karya Tuhan), maka sang penciptanya (yaitu Samiri) harus menyembah (menjadi bagian dari) ciptaannya itu.

Situasi ini dalam banyak hal akan mengakibatkan kekosongan jiwa dan kegelisahan tertentu. Administrasi yang terlalu sistematis akan membuat manusia terlempar dari kemanusiaannya dan membuat dirinya mengalami nestapa alienasi (merasa asing bahkan pada dirinya sendiri). Pada titik inilah kajian filsafat dibutuhkan, di antaranya agar administrasi tidak merasa telah benar dengan sistem yang telah dibuatnya sedemikian mekanis demi tujuan kemanusiaan padahal diam-diam (dalam pandangan filosofis) justru sedang mengumumkan kiamat kemanusiaan.

Pada evolusi ilmu administrasi/manajemen kita menemukan perubahan-perubahan yang semakin mengarah pada pemahaman akan manusia sebagai penggerak utama sistem administrasi. Misalnya, pada mulanya ilmu administrasi muncul untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan segala sumber daya yang ada (termasuk manusia). Pada titik ini, manusia hanyalah salah satu modal atau sumber daya di antara modal uang

atau bahan baku. Berdasar momen internalisasi, situasi ini pasti akan membuat manusia semakin terasing pada dirinya. Kemudian teori administrasi bergeser dengan tujuan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks (aliran teori organisasi klasik), ini juga masih menjadikan manusia sebagai obyek atau sekurup dalam mesin sistem. Barulah muncul aliran tingkah laku yang menyatakan organisasi adalah manusia. Lalu lebih jauh lagi muncullah teori-teori yang lebih memuliakan manusia seperti teori flow-nya Mihaly Csikzentmihaly, spiritual capitalnya Danah Zohar, atau apa yang disebut Stoner sebagai teori “keterlibatan dinamik” (teori manajemen yang memusatkan perhatian pada hubungan manusiawi dan cara penyesuaian --juga penyelesaian-- atas kondisi yang terus berubah sepanjang waktu).

Walaupun demikian, fungsi kritis dan berpikir sampai akar (radikal) dari filsafat tetap dibutuhkan untuk mengawal praktik administrasi menjadi semakin lebih baik lagi bagi pencapaian tujuannya dan bagi pemuliaan manusia.

Menelusuri Ide Dasar Administrasi

Administrasi dapat dirunut dari akar katanya: AD dan MINISTRAE (AD= intensiff; MINISTRAE berarti melayani, membantu, mengarahkan atau memenuhi). Administrasi dalam arti luas menurut Albert Lepawsky mencakup organisasi dan manajemen. Sementara Henry Fayol (1841-1929) –ilmuwan Prancis dan bapak teori manajemen operasional—mengemukakan bahwa administrasi adalah fungsi dalam organisasi niaga yang memiliki unsur-unsur perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, penkoordinasian, dan pengawasan. Teori administrasi

dapat diterapkan pada semua bentuk organisasi kerjasama manusia yang menekankan rasionalisme dan konsistensi logis. Ihwal kemestian logis ini, Dwight Waldo (1955) menegaskan rasionalitas yang tinggi sebagai syarat tindakan administrasi, “Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi”.

Ensiklopedi Manajemen (1979) mengemukakan bahwa administrasi adalah pekerjaan-pekerjaan dalam rangka kebijaksanaan yang diletakkan oleh manajer-manajer yang lebih tinggi atau ditetapkan oleh orang yang lebih dahulu memegang jabatan. Administrasi adalah bentuk kegiatan “le gouvernement de l’enterprise” yaitu kegiatan memimpin dalam arti meliputi fungsi teknis, komersial, keamanan, keuangan, dan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Administrasi merupakan suatu proses yang menyeluruh dan terdiri dari berbagai kegiatan yang berhubungan dan bersambungan. Dalam administrasi dan manajemen, manusia merupakan unsur penting karena bahasa dan sasaran kerja administrasi ditetapkan dan dicapai melalui manusia. Walaupun secara sepiantas batasan ini agak mirip dengan manajemen, namun administrasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu keseluruhan pengelolalan organisasi baik di level pemegang kekuasaan tertinggi (keputusan kebijakan, perencanaan sampai pengawasan) maupun di level terendah (ketatausahaan) untuk mencapai tujuan dengan menggunakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan.

Sejumlah definisi administrasi tersebut mengisyaratkan

beberapa ide dasar seperti pengaturan, kekuasaan, keputusan, rasionalitas bertujuan, dan tentu saja manusia. Filsafat administrasi dapat disusun dengan cara merumuskan bagaimana filsafat membicarakan ide-ide dasar tersebut. Ide dasar pengaturan, keputusan, dan kekuasaan dapat dirujuk pada filsafat negara, sedangkan ide dasar rasionalitas bertujuan dan manusia dapat merujuk pada filsafat manusia atau teori rasionalitas secara umum.

Lalu apa itu administrasi pendidikan? Oteng Sutisna (1983: 17) mengemukakan bahwa administrasi sekolah merupakan suatu peristiwa mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. Sementara Robert E Wilson (1966) mengemukakan bahwa administrasi sekolah merupakan koordindasi kekuatan penting untuk pengajaran lebih baik bagi seluruh anak-anak di dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan.

Dari kedua batasan ini, administrasi dikaitkan dengan (a) koordinasi kegiatan antar manusia dalam mengoperasikan sumber daya tertentu, demi (b) pencapaian tujuan tertentu; dalam (c) struktur organisasi atau kekuasaan tertentu. Batasan ini menegaskan adanya tiga unsur: manusia, sarana (manusia dan sumber daya lain), upaya pengelolaan sarana, dan tujuan. Manusia menempati posisi khas dalam batasan ini, di samping menjadi subyek pelaku juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan.

Batasan ini menegaskan sejumlah tema yang dapat dikerangkai berdasar pandangan filosofis tertentu. *Pertama*, logika sarana-tujuan adalah logika rasionalisme modern yang

menekankan bahwa manusia dapat mencapai masa depan yang lebih baik melalui upayanya menggunakan sarana tertentu. *Kedua*, adanya tujuan menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui kerjasama antar manusia untuk tujuan tertentu (tujuan pribadi atau bersama). *Ketiga*, adanya kerjasama antara manusia, dan keempat adanya kuasa pengaturan dalam hubungan antar manusia.

Keempat gagasan ini terkait dengan isu filosofis seperti rasionalitas manusia, keinginan mendapatkan hasil yang lebih baik dapat dibicarakan dari filsafat ekonomi, kemampuan manusia bekerja sama menuntut pemahaman mengenai filsafat manusia, dan kecenderungan kuasa pengaturan dalam banyak aspek dapat ditarik ke dalam filsafat negara. Jadi, dengan demikian, Ilmu administrasi terkait dengan ide filsafat yang tak sekedar filsafat negara, melainkan juga filsafat ekonomi, filsafat manusia, dan rasionalitas.

Refleksi

Administrasi, merujuk pada analisa Triad Berger, adalah anak kandung dari modernitas. Kemodernan sebagai upaya manusia untuk membuat dirinya rasional adalah kritik sekaligus pemberontakan terhadap sistem lama. Sebagaimana rasio menggantikan mitos dan iman, organisasi adalah pengganti negara dengan sistem yang disusun secara rasional. Itulah sebabnya, ilmu administrasi harus diletakkan sebagai bagian dari pergulatan filosofis yang sedang berkembang sehingga ilmu administrasi dapat terus memperbaiki diri –sebagaimana filsafat modern terus memperbaiki diri di tengah perubahan zaman.

Triad Berger memberi kita gambaran mengenai administrasi sebagai bentuk objektivasi yang dapat membantu kita mengatur dunia sekaligus memojokkan kita hanya sebagai bagian dari sistem itu. Analisa sejenis ini dapat menjadi dasar bagi peninjauan ulang terhadap model administrasi yang dipergunakan di suatu lembaga, “Apakah model itu membantu tujuan kemanusiaan atau justru membelenggu tujuan kemanusiaan?”

Simpul dari semua uraian pada bab ini adalah bahwa ilmu administrasi (secara umum) tak bisa dilepaskan dari perkembangan dunia pemikiran.

2

Administrasi dan Sistem Rasional

“Ilmu administrasi praktis terdiri dari preposisi-preposisi tentang bagaimana manusia akan bertindak jika mereka ingin agar akriivitas mereka mencapai tujuan administratif semaksimal mungkin dengan menggunakan sarana yang sangat terbatas”

(Simon, 1957: 253).

Aku berpikir maka Aku ada, demikian ujar Descartes. Pernyataan ini bisa jadi sangat sederhana, namun sebenarnya memiliki gema yang luar biasa. Pernyataan ini, mengutip Berger, merupakan pengalihan kesadaran manusia akan bagaimana seharusnya manusia dapat hidup di tengah dunia. Hidup manusia bukan dijalani dengan aturan dari pihak lain, hidup yang layak diteruskan adalah yang diatur oleh pikiran sendiri. Maka cara-cara mitos ditinggalkan dan rasio dijadikan andalan untuk menyelesaikan masalah. Apapun harus berdasar pada rasio, jika secara rasio benar maka benarlah ia dan layak untuk dijadikan pedoman kehidupan.

Merujuk pada pemikiran van Peursen bahwa sistem rasio merupakan tumpuan masyarakat modern yang menggantikan sistem mitis masyarakat pra-modern. Masyarakat mitis adalah masyarakat yang menganggap bahwa diri manusia merupakan bagian dari semesta (alam atau Tuhan) sehingga kehidupan manusia merupakan perpanjangan tangan dari semesta itu. Sistem kehidupan masyarakat mitis adalah sistem tiruan dari semesta. Pola kehidupan ini memiliki efek negatif, yaitu tidak berkembangnya kemanusiaan dan memungkinkan terjadinya penindasan pihak tertentu yang dianggap menjadi “wakil dari semesta”. Untuk itulah zaman pencerahan mengumumkan kemandirian manusia dengan menyerukan “beranilah berpikir sendiri” (*Sapere Aude*). Berani berpikir sendiri berarti tidak lagi tergantung pada kepercayaan mitis melainkan mulai mendayagunakan apa yang dimiliki manusia, yaitu rasio.

Pada mulanya rasio diyakini dapat membebaskan manusia dari sejumlah kekangan sistem lama, rasio dapat membuat manusia dewasa (tidak lagi diasuh oleh sistem semesta). Maka

seluruh sistem kehidupan pun diatur oleh hasil pemikiran rasional (misalnya teknologi dan biokrasi). Segala apa yang berbau mitis ditinggalkan, bahkan dianggap salah, dan apa pun yang bersifat rasional diteguhkan. Sistem rasio terkait dengan gagasan kebebasan dan kemajuan. Rasio membuat manusia dapat bebas (dari kungkungan sistem lama) untuk menentukan, meramalkan, dan mengoperasikan kemajuannya sendiri. Dalam kaitannya dengan kemajuan ini, rasio memberikan pertimbangan cara-cara mencapai tujuan (kemajuan) dengan sarana yang ada. Rasio memberikan pola pikir sarana-tujuan, menggunakan sarana untuk mencapai tujuan.

Rasionalisme memiliki beberapa ciri mendasar yaitu tentang waktu linier. Waktu dipahami tidak lagi dikuasi oleh unsur lain, waktu ditentukan oleh manusia. Karena itu, waktu berjalan sesuai dengan rencana manusia dalam pola alir yang jika...maka... Ini berbeda dengan cara pandang pra-modern yang menganggap bahwa waktu diatur oleh yang supranatural (atau bahkan sang waktu adalah sang supranatural itu sendiri), ia yang menentukan cara berada waktu. Dalam pemahaman pra-modern, waktu yang lalu akan kembali lagi ke masa kini atau masa depan (bersifat siklik). Kepercayaan ini menyebabkan manusia tak bisa menetapkan rencananya, segala rencana akan berhadapan dengan kekuatan lain yang akan menentukan hasil usaha secara berbeda.

Kerasionalan menetapkan aturan sendiri (*autonomi*, *auto*= sendiri, *nomos* = aturan), manusia bisa menentukan alur waktu sendiri karena alam semesta ini berjalan dengan pola yang rasional juga, yaitu jika...maka... Misalnya, jika kertas dikenai api maka kertas akan terbakar. Apa yang terjadi di depan (yaitu maka....) sudah pasti terjadi kapanpun dan di manapun, terjadi

secara otomatis, dan terlepas dari siapa yang melakukannya. Karena itu apa yang akan terjadi itu dapat diramalkan, karena dapat diramalkan maka dapat direkayasa untuk dicapai. Itulah pola pikir rasional. Ciri rasional di sini berarti bahwa sistem itu memiliki sasaran pragmatis tertentu yang bisa dipahami menurut kegunaan dan hasil-hasilnya. Semakin efektif dan efisien, semakin rasionallah sistem itu.

Bukankah seluruh kerja administrasi merupakan kerja waktu linear?

Teori Weber: Rasionalitas Instrumental dan Birokrasi

Sekarang mari kita amati pemikiran Weber mengenai administrasi.. Pemikiran Max Weber adalah salah satu rujukan dalam membicarakan administrasi, teorinya tentang birokrasi telah menjadi rujukan utama dalam ilmu administrasi umum. (Teori Birokrasi Max Weber merupakan salah satu teori besar dalam perspektif klasik. Selain itu, terdapat Teori Manajemen Ilmiah Taylor dan Penerimaan Kewenangan Barnard).

Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata legal-rasional atau tata hukum yang berdasar pada kerasionalan. Organisasi disebut rasional dalam hal penetapan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan sarana yang ada. Menurut Weber, bentuk organisasi birokratik merupakan bentuk yang paling efisien. Dalam teorinya, Weber mengemukakan sepuluh (10) ciri organisasi, yaitu:

- Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Blok-blok

bangunan dasar dari organisasi formal adalah jabatan-jabatan.

- Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas, tugas-tugas tersebut disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi (*job description*).
- Kewenangan: melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan (saat resmi menduduki sebuah jabatan)
- Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkhis.
- Sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi.
- Prosedur bersifat formal dan impersonal. Perlu adanya catatan tertulis demi kontinuitas, keseragaman (*uniformitas*), dan untuk maksud-maksud transaksi.
- Adanya prosedur untuk menjalankan disiplin anggota.
- Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi.
- Pegawai yang dipilih untuk bekerja didasarkan kualifikasi teknis.
- Kenaikan jabatan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja.

Mari kita amati ke-10 ciri kerja birokrasi dari Weber

ini. Organisasi¹ dipandang sebagai jaringan antar orang dalam satu tujuan yang sama (lihat no.1” Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan”). Agar jaringan itu dapat bekerja dibuatlah satu sistem yang memiliki tujuan yang sama (lihat no. 2 “Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas, tugas-tugas tersebut disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi (*job description*)” dan no. 4.”garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkhis.”). inilah yang disebut dengan ciri monistis dalam sistem rasional, yaitu agar sebuah sistem menjadi efisien dan efektif maka semestinya ia dikendalikan oleh satu pusat, satu sistem

Jaringan monistis sistem ini hanya hisa operasional kalau memiliki komponen-komponen dengan standar-standar umum dan dapat diimplikasikan secara *universal*, untuk itulah dibutuhkan prosedur standar, melalui prosedur ini siapapun akan melaksanakan hal yang sama secara otomatis). Dalam pola organisasi ini semua orang diseragamkan demi “mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi” (lihat no 5, 6, dan 7). Kemudian demi menghasilkan sistem pekerjaan yang masuk akal, maka pekerjaan itu harus *otonom* lepas dari kesadaran manusia (lihat no. 8 Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi.).

Sementara ciri organisasi lain menunjukkan sifat *koersif* dari sistem modern. Koersif berarti sistem buatan manusia yang

¹ Terminologi organisasi berasal dari bahasa Latin *organizare*, yang secara harafiah berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Di antara para ahli ada yang menyebut paduan tersebut sebagai sistem, ada juga yang menamakannya sarana.

pada akhirnya mengatur manusia itu sendiri. Sistem birokrasi adalah sistem yang dibuat untuk kepentingan manusia, karena itu siapapun manusianya harus menjadi bagian dari sistem itu. Ciri organisasi no 9 dan 10 menyebutkan bahwa “(manusia) pegawai dipilih bekerja berdasarkan kualifikasi teknis” dan “Kenaikan jabatan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja”. Manusia bukan lagi manusia yang manusiawi, melainkan kualifikasi teknisnya, kemudian penghargaan diberikan tidak atas dasar kehidupan pribadi atau kebaikan personalnya melainkan atas dasar prestasi kerja.

Sekarang marilah kita telusuri teori rasionalisasi dari Max Weber. Weber adalah pemikir yang hidup di zaman modern, ia menemukan lingkungan hidup dunia Barat yang sudah menunjukkan kekhasan rasionalisme Barat, seperti munculnya ilmu-ilmu alam, spesialisasi ilmu, media cetak, institusionalisme seni, musik, institusionalisme hukum dan administrasi, dan seterusnya. Rasionalisme Barat tidak hanya ada dalam aras pemikiran melainkan telah merasuki tiga segi kehidupan sosial, yaitu masyarakat, kebudayaan, dan kepribadian. Rasionalisme Barat atau modernisasi telah memengaruhi pembentukan perusahaan kapitalis yang bersifat publik dan terpisah dari dunia pribadi (domestik), dan pembentukan institusi publik rasional dalam bentuk agama. Dari segi kebudayaan, rasionalisasi dapat dilihat dalam ilmu pengetahuan modern, teknologi, seni, dan etika yang didasarkan pada prinsip-prinsip universal. Pada taraf kepribadian rasionalisasi ini tampak dalam cara hidup atau apa yang disebut Weber sebagai etika Protestan (yaitu pengalihan asketisme dunia sana ke asketisme dunia sin atau pengalihan semangat ruhani ke etos kerja wiraswasta).

Pertanyaan dari situasi itu, dalam benak Weber, adalah rasionalitas macam apakah yang menyebabkan transformasi sosial, kultural, dan kepribadian ini? Weber kemudian menguraikan konsep mengenai teknik dan rasionalitas. Kelebihan dunia Barat ketimbang dunia Timur adalah penguasaan teknik dan kepemilikan rasionalitas yang lebih memadai. Konsep teknik bagi Weber adalah pemanfaatan sarana-sarana secara teratur, yang dapat diperhitungkan dari pihak pengamat, berdasarkan sistem aturan-aturan, dapat diulangi, dapat diprediksi dalam interaksi. Kepemilikan teknik ini membuat manusia Barat melakukan intervensi dalam bentuk karya ke dalam dunia nyata, penguasaan teknik yang rasional seperti itu membuat manusia Barat dapat terus-menerus memperbaiki hasil sesuai dengan ukuran yang ditetapkannya. Weber kemudian memahami rasionalitas sebagai pemanfaatan sarana-sarana, seperti dalam konsep teknik tersebut.

Weber membadakan rasionalitas dalam dua segi: efektifnya suatu sarana dan tepatnya suatu tujuan. Rasionalitas yang berhubungan dengan efektifnya suatu sarana disebut Habermas sebagai rasionalitas instrumental yang bersifat formal, sedangkan yang berhubungan dengan tepatnya suatu tujuan disebut rasionalitas pilihan yang bersifat substantif dan strategis. Weber sebenarnya mengajukan satu jenis rasionalitas lain, yaitu rasionalitas yang berorientasi pada nilai, yaitu rasionalitas nilai bersifat normatif. Di titik inilah Weber mengemukakan terjadinya rasionalisasi, yaitu melebarnya pengaruh pola pikir rasional dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Weber kemudian menyatakan bahwa struktur-struktur kesadaran modern paling jelas terwujud secara kemasyarakatan dalam ekonomi kapitalis dan negara modern. Hubungan-hubungan

di antara para pejabat dan diantara majikan dan buruh bersifat “rasional” dalam arti tindakan rasionalitas-bertujuan (sarana dan tujuan) . Proses-proses institusionalisasi ini memerlukan pengintegrasian tindakanrasioanl-bertujuan ke dalam proses produksi, lingkungan ekonomis yang dapat dikalkulasi untuk bisnis kapitalis, sistem hukum dan administrasi negara yang memberi sanksi-sanksi hukum. Di titik inilah kita dapat memahami kelahiran dari teori birokrasi atau apa yang disebut Weber sebagai legal formal, yaitu teoritisasi dari peresapan rasionalitas-bertujuan pada sistem administrasi.

Perkembangan Ilmu Administrasi dan Teori Birokrasi

Weber adalah salah satu tokoh manajemen yang berjasa merumuskan pedoman pengelolaan organisasi kompleks, seperti Pabrik. Weber dikategorikan sebagai salah satu tokoh dari aliran teori organisasi klasik. Di samping Weber, ada beberapa tokoh lain dari aliran teori organisasi klasik seperti Henry Fayol, Mary Parker Follet, dan Chester I Barnard.

Henry Fayol (1841-1925) biasanya dianggap sebagai peletak dasar aliran manajemen klasik, karena dialah orang pertama yang membuat ilmu manajemen menjadi sistematis. Fayol percaya bahwa praktek manajemen yang mantap itu mempunyai pola tertentu yang dapat diidentifikasi dan dianalisis; karena itu dia merumuskan rancangan doktrin manajemen yang kompak (lihat 14 Prinsip Manajemen Fayol).

Mary Parker Follet (1868-1933) adalah salah seorang tokoh aliran klasik dengan memperkenalkan pentingnya mempertimbangkan hubungan manusia dalam menjalankan organisasi. Teori dasar Follet adalah bahwa “tidak seorang pun

manusia yang dapat menjadi seorang yang utuh kecuali sebagai anggota sebuah kelompok, manusia tumbuh melalui hubungan antar manusia dalam organisasi”. Karena itu pekerja dan organisasi memiliki kepentingan yang sama yang harus dikelola secara baik. Manajemen bagi Follet adalah “seni melaksanakan pekerjaan lewat manusia”. Pada titik ini Follet kemudian mengkritik pola kerja birokrasi yang terlalu ketat, baginya perbedaan artifisial antara manajer (pemberi perintah) dan bawahan (penerima perintah) mengaburkan pola hubungan dasar antar manusia; Follet percaya bahwa seni manajemen tertentu dapat berbua lebih baik dalam menggabungkan sejumlah kekuatan dalam organisasi.

Chester I Barnard (1886-1961) memiliki pemikiran yang mirip dengan Follet. Menurut Barnard, orang berkumpul bersama dalam organisasi formal untuk mencapai tujuan yang tidak dapat mereka capai kalau bekerja sendirian. Tetapi pada saat mereka masing-masing mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individu masing-masing. Karena itu, kesimpulan Barnard, sebuah perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan tetap bertahan hanya kalau sasaran organisasi dibuat seimbang dengan tujuan dan keperluan individual yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

Setelah itu, ilmu manajemen/administrasi lebih mengembangkan aliran tingkah laku. Prinsip dasarnya “organisasi adalah manusia”. Tokoh-tokohnya adalah Hawthorne, Elton Mayo (1880-1949), Abraham Maslow, dan Douglas McGregor.

Mempertimbangkan Rasionalitas Komunikatif dalam Administrasi

“...aku dan kamu saling berkomunikasi secara intersubjektif, maka aku ada...” Jürgen Habermas

Weber telah menunjukkan dengan konsep hirarkinya dan birokrasi sebagai profesi, mencoba untuk menunjukkan birokrasi yang baik dan benar. Sistem yang diatur dengan rasionalitas-bertujuan pada awalnya dianggap dapat mengantarkan manusia pada kebahagiaan. Rasio digunakan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas demi keuntungan yang bersifat strategik. Namun sistem ini kemudian dianggap menyingkirkan manusia dari kemanusiawannya. Manusia tak hanya butuh kerja dan keteraturan, manusia juga membutuhkan komunikasi.

Di dunia ilmu manajemen ada Follet dan Barnard yang menambahkan pentingnya mempertimbangkan tujuan manusia sebagai pribadi. Keduanya seperti hendak mengatakan bahwa manusia tak bisa begitu saja diletakkan dalam sistem, dinilai berdasarkan prestasi dan kemampuannya, seraya dilarang unsur pribadinya turut serta dalam dunia kerja. Manusia adalah manusiawi, ia memiliki keinginan yang harus diperhitungkan, organisasi tempatnya bekerja harus menghitung itu semua. Pada sisi filsafat, gagasan Weber yang terlalu menekankan rasionalisasi dalam makna peresapan rasionalitas-bertujuan sebagai satu-satunya ciri kemodernan juga mendapat kritik dari mazhab Frankfurt.

Habermas, salah seorang tokoh utama Mazhab Frankfurt, dalam karyanya yang berjudul *The Theory of Communicative Action* menyebutkan bahwa akar dari semua permasalahan sosial kontemporer terletak pada distorsi komunikasi yang diakibatkan oleh logika rasionalitas instrumental (seperti logika sarana tujuan dalam administrasi) di dalam sistem birokrasi pemerintahan dan sistem ekonomi “merangsek” yang masuk ke dalam dunia kehidupan yang seharusnya bersifat komunikatif. Akibatnya manusia semakin disingkirkan dalam dunia administrasi, para pekerja hanyalah skrup dari mesin birokrasi yang tak bisa mengembangkan kemanusiawianya. Kesalahan Weber bagi Habermas adalah ia tidak berhasil membedakan antara rasionalitas bertujuan dengan rasionalitas sebagai keseluruhan. Bagi Habermas, rasionalitas bertujuan hanyalah salah satu bagian dari rasionalitas keseluruhan.

Rasionalitas-bertujuan bagi Habermas bermula dari kekhilafan filsuf sebelumnya dalam memaknai konsep *praxis* (tindakan, perbuatan, kegiatan). Konsep *praxis* merupakan konsep yang mendampingi pengetahuan, bahwa pengetahuan itu tidak seharusnya hanya untuk pengetahuan. Pengetahuan harus terkait dengan kehidupan konkret, melahirkan tindakan atau kegiatan tertentu. Dalam dunia filsafat dikenal *bios theoretikos*, yakni suatu teori (pengetahuan) untuk mengolah dan mendidik jiwa dengan membebaskan manusia dari perbudakan oleh *doxa* (pendapat) dan dengan jalan itu manusia mencapai otonomi dan kebijaksanaan hidup. Jalan itu tidak melulu gagasan, melainkan dengan jalan itu manusia berpartisipasi dalam melakukan pembebasan manusia dari keterbatasannya. Rasio dalam batasan ini harus diterjemahkan dalam bentuk tindakan tertentu (*praxis*),

“rasio selalu untuk maksud praksis” dan lalu praxis itu dimaknai oleh Marx sebagai “kerja”. Teori dari Marx inilah yang kemudian diacu oleh Weber dalam menyusun Rasionalitas-bertujuan.

Sebelum membicarakan teori Habermas yang melengkapi teorinya Weber ada baiknya kita mengenali teori Marx tentang kerja. Marx memulai teorinya dari kritik atas Hegel yang menganggap bahwa subyek pengetahuan itu tidak serba jadi, melainkan ada dalam proses pembentukan. Proses ini dikenali dalam dialektika tesis, antitesis, dan sintesis dalam bentuk pikiran. Awalnya adalah keinginan Roh absolute yang ingin menyatakan dirinya (tesis), kemudian untuk bisa menyatakan dirinya Roh Absolute harus melakukan sesuatu yang berbeda yaitu dengan mengakui situasi di luar dirinya (antitesis), melalui antitesis ini roh kemudian menjadi sadar diri, maka terjadilah identitas baru antara pikiran dan alam material (sintesis). Melalui cara ini Hegel ingin menegaskan bahwa identitas itu merupakan gabungan antara pikiran dan yang nyata, melalui cara ini sejarah kemodernan akan tercipta.

Marx tidak menyetujui pemikiran Hegel, ia menganggap Hegel terlalu mengambang. Karena bagi Hegel yang nyata itu pikiran dan kenyataan hanya dipandang sebagai perluasan dari pikiran saja. Kenyataan hanyalah satu tahap yang harus dilalui oleh pikiran untuk mencapai pengetahuan absolut. Marx menjungkirbalikkan pendapat Hegel ini. Baginya bukan pikiran melainkan alamlah dasar terakhir dan yang mutlak bagi pikiran. Pikiran justru tergantung pada alam, bukan sebaliknya. Manusia tak bisa hidup tanpa alam, karena itu ia pun bisa berpikir karena ada alam. Tanpa berdasar pada alam, manusia akan terasing dari dunia kehidupannya.

Konsepsinya begini. Berbeda dengan hewan, manusia tidak langsung akrab dengan lingkungannya. Ayam begitu lahir langsung bisa berdiri dan memiliki bulu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Manusia terpisah dari alam, ia harus melakukan sesuatu agar dapat bertahan di tengah tantangan lingkungan. Kerja adalah perantara yang membuat manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dengan kerja manusia dapat mengubah alam obyektif menjadi sesuai dengan alam subyektifnya (pikiranya sendiri). Hanya dengan kerja, alam itu dimanusiawikan. Inilah yang dimaksud “rasio selalu untuk tujuan praksis”.

Tidak berhenti sampai di situ, Marx kemudian menegaskan bahwa melalui kerja, pikirannya juga diubah karena antara alam dan pikiran selalu terjadi interaksi dan konforntasi. Melalui kerjanya manusia melenyapkan unsur-unsur negatif dari alam dan menjadikan alam sesuai dengan pikirannya. Walaupun demikian, alam tidak secara langsung menjadi potret dari pikirannya. Untuk dapat mengejawantahkan pikiran dalam alam, pikiran harus diperantai dengan kerja. Melalui kerja, apa maunya pikiran menjadi terwujud pada alam. Pengetahuan diperoleh dan diwujudkan, bagi Marx, dalam dan melalui kerja, pada titik ini pengetahuan akan bertautan dengan praksis. Pada pikiran Marx ini dapat ditemukan sintesis manusia dan alam melalui kerja: pikiran berusaha mengubah alam lewat kerja, sekaligus alam pun mengubah pikiran manusia lewat kerja. Sintesis ini menghasilkan pengetahuan yang bertujuan untuk praxis tertentu. Pengetahuan, dalam batas ini, menghasilkan kerja untuk mengubah materi menjadi bentuk-bentuk baru sekaligus menghasilkan pengetahuan baru. Melalui kerja, manusia tidak hanya mengubah alam melainkan juga mengetahui dan menyadari alam, sehingga sambil mengubah alam,

manusia mengerti kodrat alam secara lebih lengkap. Maka titik tolak sintesis pada pemikiran Marx bukanlah logika, melainkan ekonomu, karena sintesisnya Marx merupakan aktivitas produksi material bukan melulu proses kognitif (seperti Kant dan Hegel)

Sekedar *flashback*, pemikiran Marx ini menempati posisi penting dalam dunia Filsafat (Barat). Semenjak pencerahan, para filsuf dunia Barat masih berkuat pada perumusan pengetahuan, Descartes misalnya merumuskan bahwa pikiranlah sumber pengetahuan, lalu Hume dan Locke menyatakan bahwa inderalah sumber pengetahuan, kemudian Kant menggenapkannya dalam bentuk sintesis antara indera dan rasio. Baru pada Marxlah kerja dibicarakan sebagai bagian dari filsafat.

Namun rumusan Marx ini menyisakan masalah, terutama ketika Marx memahami ilmu-ilmu manusia dengan model ilmu-ilmu alam. Pada *Das Capital*, misalnya, Marx menerangkan hukum-hukum ekonomi sebagai suatu hukum alam. Ini berrri ilmu-ilmu budaya dianggap berakar dari kategori alat (instrumental), sebagai ilmu untuk mengontrol. Jika ilmu alam adalah buah hasil kesadaran subyek untuk mengontrol proses alamiah, maka ilmu budaya merupakan pengetahuan yang memungkinkan subyek untuk mengontrol secara teknis proses-proses kehidupan sosial. Dari dinilah Weber mendapatkan kesimpulan bahwa rasio itu adalah alat (instrumen) bagi tujuan manusia modern.

Masalahnya adalah bahwa ketika manusia memahami dirinya dan berhubungan dengan manusia lain (melalui ilmu budaya) dengan analogi ilmu alam, ilmu-ilmu budaya tidak lagi mempertanyakan secara refleksif dasar-dasar pengetahuannya sendiri. Ilmu-ilmu budaya menjadi telah benar dengan sendirinya

tanpa ada proses kritik diri, bahkan ketika ilmu-ilmu budaya (dengan rasio instrumentalnya) menghasilkan dehumanisasi. Padahal manusia tak bisa disamakan dengan alam, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Manusia tak bisa dijadikan alat sebagaimana alam. Keduanya harus dibedakan secara praksis. Relasi manusia dengan alam dihubungkan dengan kerja (alam dirubah menjadi sesuatu agar dapat sesuai dengan apa maunya manusia), sedang relasi manusia dengan manusia adalah melalui interaksi atau komunikasi. Di sinilah muncul teori rasionalitas komunikatif dari Habermas.

Menurut Habermas (Hardiman, 1990:126) tindakan instrumental bertujuan membebaskan manusia dari kendala-kendala alamiah dengan cara mengubah ilmu-ilmu alam menjadi teknologi, sehingga alam dapat ditundukkan di bawah perintah manusia. Namun, komunikasi atau interaksi bertujuan membebaskan manusia dari paksaan-paksaan, tekanan-tekanan atau penindasan-penindasan yang dihasilkan secara internal (oleh struktur interaksi manusia sendiri, yaitu pranata-pranata masyarakat).

Pada buku *Moral Consciousness and Communicative Action*, Habermas mengajukan rasio komunikatif. Melalui rasio komunikatif ini Habermas merumuskan terciptanya situasi perbincangan ideal, dimana proses komunikasi berjalan lancar, sehingga prasangka dan kesalahpahaman dapat dihindari. Ia yakin, bahwa rumusan tersebut akan mengubah masyarakat menjadi lebih rasional, radikal secara positif, dan memiliki alternatif yang bersifat deliberatif. Habermas seperti hendak mengusulkan pengganti dari pernyataan Descartes “aku berpikir maka aku ada” menjadi “aku dan kamu saling berkomunikasi secara

intersubjektif, maka aku ada...”

Jalan ke depan melalui sebuah konsep yang berbeda tentang nalar manusia sebagai prinsip pemberi informasi (informing principle) bagi masyarakat kontemporer... [karena] Habermas berpendapat bahwa daripada meninggalkan nalar sebagai informing principle bagi masyarakat kontemporer, kita sebaiknya menggeser perspektif dari konsep nalar yang terbentuk dalam pengertian subyek-obyek yang terindividualisasikan ke konsep penalaran yang terbentuk dalam komunikasi intersubjektif. Penalaran semacam ini diperlukan ketika “kehidupan bersama yang berbeda-beda” dalam ruang dan waktu yang sama ini mendesak kita untuk mencari cara menemukan kesepakatan tentang bagaimana menangani persoalan kolektif...Upaya membangun rasa saling memahami (mutal understanding) sebagai fokus aktivitas penalaran akan menggantikan “filsafat kesadaran” yang berorientasi subyek yang, menurut Habermas, telah mendominasi konsep Barat tentang nalar sejak era Pencerahan” (Healey, 1983: 238-40)

Filsuf Jerman Jürgen Habermas berpendapat, bahwa seluruh permasalahan sosial yang timbul diakibatkan oleh satu sebab yang sebenarnya sangat sederhana, yakni karena distorsi komunikasi, atau karena terjadinya “gangguan” terhadap proses komunikasi, sehingga yang tercipta bukanlah konsensus ataupun kesaling pengertian, melainkan prasangka dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, solusi dari berbagai bentuk problem sosial adalah dengan menciptakan proses komunikasi yang bebas distorsi. Melalui komunikasi ini, Habermas mengklaim, kita membuat beberapa pengandaian tentang diri sendiri, lawan bicara kita, dan tentang dunia sebagai keseluruhan. Dengan kata lain,

setiap komunikasi selalu mengandaikan adanya upaya bersama untuk mencapai pemahaman, baik itu atas diri kita, orang lain, dan dunia secara keseluruhan. Setiap praksis komunikasi sudah selalu menyediakan tujuan akhirnya sendiri, yakni kesepahaman dan kesepakatan, sehingga tidak perlu mencantumkan adanya nilai-nilai ideal diluar dari proses “percakapan” itu sendiri. Proses “percakapan” disebut Habermas sebagai diskursus:

“Di dalam pengandaian-pengandaian dari diskursus rasional yang inklusif dan tanpa paksaan antara partisipan yang bebas dan setara, setiap orang haruslah mengambil alih perspektif lawan bicaranya, dan kemudian memproyeksikan dirinya sendiri untuk mengerti mengenai kedirian dan dunia orang-orang lainnya; dari pertukaran perspektif semacam ini muncullah persepektif ke-kamian dimana semua pihak dapat menguji secara bersama apakah mereka mau menjadikan suatu norma sebagai landasan dari praktek bersama mereka, atau tidak.”(Habermas)

Dengan mengambil alih perspektif lawan bicaranya, maka setiap partisipan diskursus akan mengenali apa yang disebut sebagai norma-norma universal yang melampaui kepentingan pribadi mereka masing-masing, serta melampaui juga distorsi rasionalitas instrumental. Alih-alih mengikuti dorongan pribadi kita, dan kemudian lebih memilih untuk menggunakan norma-norma terbaik yang telah disepakati bersama. Dalam konteks ini, norma-norma yang baik adalah “kekuatan tanpa paksaan yang dikembangkan melalui argumentasi yang lebih baik.” Jika tesis ini secara konsekuen diterapkan, maka argumentasi yang berat sebelah dan praktek yang agresif akan dapat dicegah, sehingga

tatanan yang didasarkan secara diskursif akan muncul.

Habermas kemudian menerjemahkan pemikirannya dalam konteks filsafat politik dan hukum di dalam bukunya yang berjudul *Between Facts and Norms*. Dalam buku tersebut, ia berpendapat bahwa prinsip normatif dari penerapan hukum berjalan searah dengan prinsip demokrasi, yakni prinsip yang merupakan turunan dari prinsip diskursus. Prinsip diskursus menyatakan bahwa ada kerangka pencapaian nilai-nilai yang bersifat universal, dimana jika orang mematuhiinya, maka mereka akan mewujudkan kebebasan dan budaya demokratis di dalam ruang publik. Dua prinsip diskursus itu adalah *pertama*, “sebuah norma moral hanya boleh dianggap sah kalau akibat-akibat dan efek-efek sampingan yang diperkirakan akan mempengaruhi pemuasan kepentingan siapa saja, andaikata norma itu ditaati secara umum, dapat disetujui tanpa paksaan oleh semua.” *Kedua*, “Hanya norma-norma yang disetujui (atau dapat disetujui) oleh semua yang bersangkutan sebagai peserta sebuah diskursus praktis boleh dianggap sah.”

Lalu apa hubungannya dengan ilmu administrasi?

Wayne Parsons (2001) dalam buku *Public Policy* menuliskan pengaruh gagasan Habermas ini pada Analisis Kebijakan (salah satu kajian dalam ilmu administrasi) dan manajemen. Parsons menulis bahwa

“Ide Habermas menimbulkan dampak luas bagi teori dan praktek kebijakan publik. Pada level teori, ide-idenya menyarankan perlunya perhatian yang lebih

besar terhadap bahasa, diskursus, dan argumen. Pada level praktis teori-teori Habermas –seperti situasi perbincangan ideal—mengajak untuk mencari metode analisis baru dan proses institusional baru yang dapat mempromosikan pendekatan interkomunikatif unyuk merumuskan dan menyampaikan kebijakan publik.” (Parsons, 2001: 56)

Bila pada Weber dapat terumus sistem administrasi yang mengutamakan kontrol dan kepentingan organisasi di atas kepentingan manusia (pekerjanya), itu karena rujukan rasionalitasnya adalah rasionalitas-instrumental. Maka, pada rumusan Habermas ini pola kerja administrasi tidak lagi mengutamakan kontrol, melainkan melalui komunikasi bebas penguasaan, mengutamakan interaksi yang memberikan pembebasan pada masing-masing bagian dari organisasi. Ini berarti, pra-andaian mengenai rasio itu apa menentukan pola ilmu yang dihasilkan. Pada rasio instrumental, ilmu administrasi menjadi ilmu kontrol manusia agar dapat mencapai tujuan organisasi; sedangkan pada rasio komunikatif, manusia bukan lagi alat yang diam, melainkan subyek dari pekerjaannya yang melakukan pekerjaan bukan demi tujuan organisasi saja melainkan juga demi tujuan dirinya sendiri agar semakin mem manusia.

Situasi ideal dari rasio Habermas ini dapat ditemukan pada perkembangan ilmu manajemen selanjutnya. Setelah aliran klasik (Weber, Taylor, Follet, Barnard) kita menemukan tokoh seperti Mayo, McGregor, Maslow, atau Jack Wlech yang mulai serius memperhitungkan faktor manusia dalam efektifitas kerja. McGregor misalnya mengemukakan gagasan mengenai “kompleks pribadi”. Dia membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai

manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi ini, yaitu teori X dan teori Y melihat perbedaan yang berlawanan mengenai komitmen manusia terhadap kerja dalam organisasi. Manajer teori X, kata McGregor, mengasumsikan bahwa manusia harus selalu diawasi agar mau berusaha dalam pekerjaan mereka. Manajer teori Y, berbeda, mengasumsikan bahwa manusia suka bekerja dan dengan bersemangat memandang pekerjaan sebagai kesempatan mengembangkan kemampuan kreatifnya. Teori Y inilah yang kemudian memberikan angin baru bagi cara pengelolaan administrasi atau manajemen.

Sejalan dengan pemikiran McGregor, CEO General Electric Jack Welch berpendapat bahwa orang harus melupakan ide lama dari “atasan” dan menggantikannya dengan ide bahwa manajer mempunyai tugas baru yaitu membimbing kelompok, menyediakan sumber daya bagi mereka dan membantu orang untuk berpikir bagi mereka sendiri. Welch menyatakan, “Kita akan berjuang untuk memenangkan ide kita, bukan dengan cambuk dan rantai”. Pendekatan Welch dan Gregor ini menunjukkan perujukan kerja administrasi tidak lagi pada rasionalitas instrumental, melainkan pada rasionalitas komunikatif.

Teori administrasi lain yang dapat diberi catatan adalah teori sistem, dan keterlibatan dinamik. Pada pendekatan sistem, organisasi dipandang sebagai satu kesatuan, sistem dengan tujuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait. Teori sistem meramalkan bahwa aktivitas setiap segmen organisasi memengaruhi aktivitas segmen lainnya dengan pengaruh yang berbeda. Teori sistem, dengan demikian, akan memperhatikan dinamika dan kesalingtergantungan alami dari organisasi serta tugas manajemen. Untuk melaksanakan pendekatan sistem ini,

semua pihak dalam organisasi harus berkomunikasi (Stoner, 1995: 46).

Stoner sendiri mengembangkan pendekatan keterlibatan dinamik (*dynamic engagement*). Istilah “dinamik” mencerminkan perubahan, pertumbuhan, dan aktivitas yang berkesinambungan; sementara istilah “keterlibatan” mengandung arti keterlibatan intensif dengan orang lain. Keterlibatan dinamik merupakan pendekatan manajer yang memusatkan perhatian pada hubungan manusiawi sekaligus juga mengupayakan penyesuaian cepat dengan kondisi yang berubah sepanjang waktu.

Kesemua perkembangan teori administrasi/manajemen ini menunjukkan pergeseran perujukan sistem rasio, dari rasionalitas instrumental menuju rasionalitas komunikatif.

Rasionalitas Prosedural dan Pembuatan Keputusan

Pendekatan rasional untuk pembuat keputusan terkait dengan gagasan Max Weber mengenai “birokrasi”. Sebagai tambahan informasi berikut ini akan dikemukakan konteks munculnya birokrasi dalam pemikiran Weber.

Weber meyakini bahwa dunia modern memerlukan satu sistem organisasi dan kepemimpinan yang rasional, karena bagaimanapun kemodernan telah melemahkan bentuk kekuasaan tradisional dan karismatik serta melahirkan otoritas “legal-tradisional” sebagai bentuk kekuasaan yang paling efisien.

Basis otoritas tradisional adalah ide tentang kekuasaan yang diberikan oleh alam atau Tuhan. Jenis otoritas ini diakui berdasarkan historis dan sukses. Otoritas Karismatik adalah otoritas yang didapatkan karena bakat tertentu yang unik dan

menarik. Kedua bentuk otoritas ini kurang stabil dan lebih lemah ketimbang otoritas legal-rasional. Otoritas legal-rasional berasal dari undang-undang, kesepakatan, dan aturan; karena itu dianggap Weber “lebih unggul secara teknis”. Keunggulan otoritas legal-rasional terletak pada sistem yang beroperasi seperti mesin (selalu tepat sasaran sesuai rencana tanpa terpengaruh unsur-unsur subyektif, pribadi). Karena itu, bagi Weber, bentuk organisasi terbaik bagi masyarakat legal-rasional adalah birokrasi. Ia kemudian menyusun “tipe ideal” atau model ideal birokrasi yang memiliki karakteristik seperti spesialisasi, hierarki, aturan, impersonal, pejabat yang diangkat, pejabat full-time, pejabat karir, dan adanya pemisahan publik dan privat.

Herbert Simon adalah salah seorang yang merumuskan analisis rasional dalam pembentukan keputusan. Simon sendiri, selain mengenai analisis pembuatan keputusan, mengemukakan beberapa teori tentang administrasi, seperti perilaku administratif dan rasionalitas dalam persoalan manusia.

Buku Simon yang berjudul *Administrative Behaviour* memberikan penjelasan mengenai organisasi dalam pengertian riil, bukan ideal. Ia mulai dengan mengemukakan masalah yang dihadapi ilmu sosial dalam hal rasionalitas:

“Pada satu titik eksterem kita punya ahli-ahli ekonomi yang menisbahkan rasionalitas yang berlebihan pada manusia ekonomi... pada ekstrem lainnya kita punya ahli-ahli yang berkecenderungan dalam psikologi sosial yang bisa dirunut kembali ke Freud yang mencoba mereduksi semua kognisi hanya pada effect saja...generasi ilmuwan behavioral masa lalu sibuk mengikuti Freud, berusaha

menunjukkan bahwa orang-orang tidak serasional yang mereka pikirkan” (Simon, 1957: xxiii).

Jadi, model pengambilan keputusan dalam ilmu administrasi terpecah-pecah antara model ekonomi dan psikologisme. Bagi penganut model ekonomi, manusia memiliki pengetahuan yang sempurna dan kalkulasi rasional untuk memilih alternatif-alternatif penentuan keputusan. Model Freudian menyatakan bahwa penggerak pengambilan keputusan adalah hasrat, insting, serta kecemasan bawah sadar. Simon kemudian menegaskan bahwa perilaku administratif sebenarnya berdiri di antara keduanya itu, di antara akal dan perasaan. Dari sinilah kemudian muncul konsep “rasionalitas yang terkekang” (*bounded rationality*).

“Mustahil bagi perilaku individu tunggal yang terisolasi untuk mencapai tingkat rasionalitas yang tinggi. Jumlah alternatif yang harus dieksplorasi olehnya sangat banyak, informasi yang perlu dievaluasi sangat beragam sehingga bahkan sekadar mendekati rasionalitas obyektif saja sangatlah sulit. Individu memilih tempat di lingkungan “yang telah tersedia” – sebagaimana premis yang diterima oleh subyek sebagai basis pilihannya; dan perilaku akan aktif hanya di dalam batas-batas “yang telah tersedia” itu. (Simon, 1957, 79)

Pada kutipan lain, Simon (1957a: 198) menegaskan:

“Kapastitas pikiran manusia untuk merumuskan dan memecahkan problem yang kompleks sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan problem yang harus dipecahkan dengan perilaku rasional objektif di dunia nyata –atau

dengan perilaku yang mendekati rasionalitas obyektif”.

Jadi rasionalitas dalam pengambilan keputusan sangatlah terbatas, lantaran:

- Sifat pengetahuan tak lengkap dan terfragmentasi
- Konsekuensi yang tidak bisa diketahui, sehingga si pembuat keputusan mengandalkan pada kapasitas untuk melakukan penilaian
- Keterbatasan perhatian: problem harus ditangani dalam waktu serial, satu per satu, karena pembuat keputusan tidak bisa memikirkan terlalu banyak isu pada saat yang sama: perhatian berpindah dari satu nilai ke nilai lain

Manusia belajar menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan dengan tujuan yang diniatkan; kekuatan observasi dan komunikasi membatasi proses pembelajaran ini

Batas daya tampung (memori) pikiran manusia:

- pikiran hanya bisa memikirkan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan
- Rentang perhatian manusia terbatas
- Lingkungan psikologis manusia terbatas
- Perilaku dan perhatian awal akan cenderung bertahan dalam arah tertentu selama beberapa periode waktu
- Pembuatan keputusan juga dibatasi oleh lingkungan organisasional yang menjadi kerangka bagi proses pemilihan (Simon, 1957: 81-109).

Oleh karena itu, Simon menegaskan bahwa rasionalitas

pada dasarnya adalah pembuatan prosedural, yakni ia bisa dilihat sebagai pemilihan tujuan dan tindakan yang bisa mencapai nilai atau tujuan yang diharapkan. Seseorang individu bisa dikatakan rasional bila perilakunya memiliki tujuan dan diarahkan untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Simon kemudian menegaskan bahwa untuk menjelaskan rasionalitas dalam pembuatan keputusan organisasional, dibutuhkan penggunaan dua modal manusia: manusia ekonomi dan manusia administratif:

“Manusia ekonomi memaksimalkan atau memilih alternatif yang terbaik di antara alternatif yang tersedia, sedangkan manusia administratif memuaskan atau mencari aksi yang memuaskan atau “cukup baik”. Contoh dari kriteria memuaskan yang sangat dikenal oleh para pengusaha, tetapi kurang terkenal di kalangan ekonom, adalah “pangsa pasar”, “profit yang memuaskan”, “harga yang adil”,

Manusia ekonomi menghadapi “dunia nyata” dengan segala kompleksitasnya. Manusia administratif mengakui bahwa dunia yang dibayangkannya adalah model dunia riil yang sangat disederhanakan. Dia sudah puas dengan simplifikasi kasar karena dia percaya bahwa dunia riil kebanyakan kosong –bahwa sebagian besar fakta dunia riil tidak banyak relevansinya dengan situasi khusus yang dia hadapi, dan bahwa rantai sebab dan akibat yang paling signifikan adalah rantai yang pendek dan sederhana. Oleh karena itu, dia mengabaikan penjelasan aspek-aspek realitas –dan itu berarti hampir semua aspek—yang

secara substansial tidak relevan. Dia membuat pilihan dengan menggunakan gambaran situasi yang sederhana yang hanya menjelaskan segelintir faktor yang dia anggap paling relevan dan krusial (Simon, 1957: xxv).

Simon mengkarakteristikan pembuatan keputusan oleh “manusia administratif” sebagai kegiatan yang beroperasi di dalam dunia rasionalitas yang terkekang dan dimotivasi oleh kepuasan, bukan oleh upaya maksimalisasi: ini berarti bahwa dia membuat keputusan yang tidak berasal dari kajian atas semua alternatif; juga dengan pengandaian bahwa dunia itu “kosong” dari masalah atau pengaruh. Di dunia nya aktor pembuat keputusan tidak menghadapi organisasi yang tanpa nilai, prasangka, kultur, sejarah, dan pengalaman. Jadi pembuatan keputusan rasional harus dipahami dari segi konteks organisasional dan psikologis di mana keputusan diambil.

Rasionalitas terkekang ini didasarkan pada beberapa hal. *Pertama*, konteks yang menjadi lokus keputusan terbatas pada organisasi dan dibatasi kondisi psikologis pembuatan keputusan; jadi niscaya penggunaan rasionalitas secara utuh tidak ada. *Kedua*, pembuat keputusan tidak bisa mengetahui hasil dari keputusan, dan karena tidak ada cara untuk membandingkan manfaat dari berbagai hasil, maka dalam praktiknya tidak mungkin ada hubungan langsung antara hasil keputusan dengan hasil yang memuaskan (yang berbeda dengan hasil yang merupakan hasil maksimal). Ini jelas bukan kerja rasional yang mengangankan adanya evaluasi terhadap hasil, jadi rasionalitasnya terbatas. *Ketiga*, keterbatasan jangkauan perhatian manusia, eksistensi nilai yang beragam dan besarnya ketidakpastian yang dihadapi oleh pembuat keputusan. Nalar bagi Simon adalah sekadar alat. Ia tidak bisa membantu

memilih tujuan atau “membantu kita mencapai tujuan yang disepakati secara lebih efektif” (Simon, 1983: 106).

Psikolog Stuart Sutherland berusaha menjelaskan rasionalitas berdasarkan riset dan bukti yang tersedia di tahun 1990-an (Sutherland, 1994). Irasionalitas, menurutnya, adalah fakta utama dari pembuatan keputusan publik dan privat dan hasilnya bisa mengakibatkan bencana. Irasionalitas punya banyak sebab, termasuk karena tidak mau meluangkan waktu lebih banyak untuk berpikir, keterbatasan kapasitas otak manusia untuk menampung banyak ide mengenai kompleksitas, dan struktur organisasi. Sutherland berpendapat bahwa kita tidak boleh berputus asa, karena masih ada hal-hal yang dapat mengurangi dari bencana irrasionalitas ini. Sutherland kemudian mengajukan paket “moral” untuk meningkatkan pembuatan keputusan. Di antaranya adalah:

jangan membuat keputusan berdasarkan satu kasus saja pikirkan keputusan masak-masak sebelum mengimplementasikannya atau sebelum mematuhi suatu aturan dalam keputusan kelompok pastikan argumen penentang telah diekspresikan manajer harus mengadaptasi gaya egaliter dan partisipatif carai buki yang bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional atau yang diterima pelajari statistik dasar.

Refleksi

“Keterbatasan Rasionalitas” dalam pengambilan keputusan ini sebenarnya pernah dibicarakan oleh filsuf Carl

Schmitt² dengan tesis *souveraen ist, wer uber Ausnahmezustand entscheidet* (Yang berdaulat adalah barang siapa mengambil keputusan atas keadaan darurat). Teori Schmitt didasarkan pada fakta bahwa negara-negara modern bermaksud menggantikan negara-negara pra-modern (yang berlandaskan keyakinan atas Tuhan atau teologi). Namun apakah lewat kudeta terhadap “Yang Ilahi” ini teori tentang negara bersih dari teologi? Schmitt kemudian menyatakan bahwa “semua konsep padat dalam teori negara modern adalah konsep-konsep teologis yang disekulerkan (C. Schmitt, 49). Misalnya bila konsep negara agama dituntun oleh “Yang Tidak terperikan” (hukum ilahiah), negara modern menggantikannya dengan hukum alam atau hukum rasio; kemudian bila negara pra-modern merujuk keputusan berdasarkan Yang Ilahi maka negara modern menggantikannya dengan “Yang Rasional”.

Namun, sebagai catatan, dapat dikemukakan bahwa bagi Schmitt konsep Tuhan bukanlah seperti dalam teologi. Tuhan, dalam pandangan Schmitt, bukanlah sesuatu yang bermukim di lubuk hati seorang beriman. Bagi Schmitt ia merupakan sebuah kategori konseptual untuk menampung wilayah realitas “Yang Tak Terperikan”, suatu kesewenangan murni yang mengintervensi peristiwa-peristiwa manusia. Jadi pada negara modern tetap saja ada sesuatu yang dianggap memayungi semua keputusan, walaupun tidak disebut Tuhan namun dianggap sebagai “Yang Tak Terperikan”. Ini berarti dalam rasionalitas masih merujuk pada yang irrasional. Salah satu contohnya dikemukakan Schmitt dalam momen pengambilan keputusan.

² Semua uraian tentang Schmitt diringkas dari F Budi Hardiman, “Tatanan dan Yang Tak Terperikan Carl Schmitt tentang politik,” dalam *Filsafat Fragmentaris*, 2007, Kanisius, Yogya.

Mari kita mulai dari teori negaranya Scmitt. “Semua teoti politis sejati mengandaikan manusia itu jahat,” ujar Schmitt. Jahat secara teologis berarti “berdosa”, jahat secara politis berarti “berbahaya”. Untu itulah dibutuhkan hukum. Hukum yang mendasari sebuah negara telah menundukkan kehidupan di bawah mekanisme keniscayaan. Norma-norma legal membuat tindakan-tindakan politis dapat diprediksi dan diantisipasi, di sini hukum tampak sebagai kegiatan rasional. Namun, dalam sistem rasional itu telah terkandung sebuah momen yang *melampaui* rasionalitas, yakni momen pengambilan keputusan.

Padahal, bagi Schmitt, sistem hukum negara modern itu lahir dari keputusan. Ia menegaskan beberapa argumennya *pertama*, dalam kenyataannya bukanlah kebenaran yang melahirkan sebuah tatanan legal yang bernama negara, melainkan negara ada setelah ada keputusan; *kedua*, kebenaran sebuah keputusan tidak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang benar dalam proses musyawarah mufakat melainkan oleh praksis menjalankan keputusan itu sendiri yang tentu saja disokong oleh ancaman senjata.

Keputusan bagi Schmitt lahir dari ketiadaan (*creatio ex nihilio*). Keputusan politis biasanya muncul dari situasi yang genting, yang tidak biasa. Dalam kondisi genting terkoyaklah tabir yang menutupi jati diri manusia. Kegentingan menyajikan situasi telanjang, mana yang luhur dan mana yang nista, mana yang busuk dan mana yang bermartabat. Dalam hal pengambillan keputusan, situasi genting inilah muncul kenyataan bahwa tatanan yang ada tidak dapat diandalkan, ini berarti harus dibuat tatanan baru melalui keputusan politis. Namun karena situasi genting maka proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara rasional.

Schmitt menyatakan, yang berdaulat adalah barang siapa mengambil keputusan tentang keadaan darurat. Ketika yang berkuasa mengambil keputusan bahwa situasi itu darurat, berarti ia mengingkari hukum yang telah ditata secara rasional. Kemudian ketika ia membuat satu keputusan (yang kemudian menjadi dasar hukum bagi penataan baru), saat itu ia dan keputusannya menjadi sumber kontitusi. Artinya yang berdaulat berada dalam situasi imanensi sekaligus transendensi. Imanensinya terjadi ketika ia terlibat dalam pengambilan keputusan, sedangkan transendensinya terjadi ketika ia menisbikan tatanan yang ada dan mengalihkannya ke tatanan baru melalui keputusannya. Pada saat ia imanen, ia berada dalam rasionalitasnya, sedangkan pada saat transenden, ia berdiri di luar rasionalitas hukum.

Pada titik inilah pengambilan keputusan membutuhkan suatu prinsip yang menjadi –meminjam istilah Covey-- “kompas ruhani”, prinsip yang memberikan visi dan arah yang benar pada situasi apa pun.

3

Filsafat Negara dan Administrasi

Bacon menyatakan “kemajuan tergantung pada organisasi pengetahuan ilmiah, dan pemerintah tergantung kepada organisasi pengetahuan kebijakan”

(Wayne Parsons)

Filsafat memang tidak secara langsung membicarakan administrasi, Filsafat paling banter membicarakan negara. Keduanya sama-sama membicarakan soal pengaturan, bedanya negara mengatur dalam wilayah yang lebih luas daripada

administrasi (yang bisa saja dalam lokus kerja terbatas). Maka, wajar saja bila ada yang merujukkan filsafat administrasi pada filsafat negara.

Setidaknya inilah yang dapat dibaca dari skema yang dibuat ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, 1995). Pada skema itu, administrasi pendidikan berhubungan langsung (bahkan dibawah pengaruh Filsafat Negara), namun anehnya tidak berhubungan langsung dengan Filsafat pendidikan dan Ilmu Pendidikan teori. ISPI rupanya hendak meletakkan administrasi pendidikan semata ilmu terapan yang tidak mungkin memproduksi teorinya sendiri, segala aktivitas administrasi pendidikan pada skema ini benar-benar tergantung pada perkembangan Filsafat negara dan praktek pendidikan. Pada titik ini saya kurang sepaham. Ada beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama, walaupun benar praktek administrasi pendidikan secara praktis mengelola apa yang telah menjadi kebijakan negara, namun bukan berarti administrasi pendidikan hanya pelaksana dari kebijakan negara. Ada manusia yang diurus dalam administrasi, baik pelaku maupun yang diurusnya (para peserta didik), manusia-manusia ini harus dipertimbangkan dalam praktek administrasi. Kemudian, kecenderungan meletakkan administrasi pendidikan di bawah administrasi negara saja menutup kemungkinan keterbukaan sistem administrasi terhadap perubahan masyarakat. Di titik ini, administrasi telah diletakkan sebagai ilmu pelaksana saja.

Kedua, bila administrasi adalah cara mengelola sumber daya untuk tujuan tertentu maka administrasi tidak sekadar ilmu teknik mengelola. Pada batasan tersebut ada unsur “tujuan” yang bersifat kemungkinan atau teoritis. Penerapan tujuan bukanlah

urusan teknis, melainkan teoritis. Maka penerapan administrasi pendidikan tidak sekadar terhubung dengan ilmu pendidikan praktis, melainkan juga dengan filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan teoritis.

Ketiga, administrasi pendidikan (seperti telah dikemukakan pada bagian ini) secara pasti terhubung dengan filsafat secara umum (yaitu rasionalisme), juga filsafat ekonomi dan manusia. Apalagi pada pengelolaan pendidikan swasta yang tidak secara langsung berada di bawah “kendali” negara, belum lagi bila UU BHP diberlakukan. Ini berarti administrasi pendidikan adalah ilmu yang cukup ramai menampung sejumlah pertimbangan filosofis dari aspek manusia, masyarakat, negara & politik, dan ekonomi.

Terlepas dari semua catatan ini, filsafat negara tetap menjadi sumber rujukan bagi penyelenggaraan administrasi pendidikan. Ini juga berarti, filsafat negara akan memengaruhi filsafat administrasi pendidikan. Pada tingkat yang lebih mendalam lagi, sebenarnya bukan sekadar filsafat negara yang terkait dengan ilmu administrasi, melainkan filsafat politik. Filsuf politik seperti Machiavelli dan Bacon memiliki pemikiran yang kemudian menjadi dasar (paling tidak memengaruhi) penyelenggaraan administrasi

Machiavelli (1469-1527) diyakini oleh beberapa pemikir administrasi sebagai filsuf kuno yang meletakkan dasar bagi ilmu administrasi, setidaknya ada sejumlah pemikirannya yang dapat dirujuk dalam pengelolaan negara dan administrasi negara. Machiavelli menegaskan bahwa pemerintahan adalah sebuah keterampilan, dan dibutuhkan ilmu pemerintahan yang disebutnya sebagai “seni keterampilan bernegara” (Statecraft). Dia percaya bahwa melalui pemahaman atas realitas politik dan kekuasaan, pembuat keputusan dapat menjalankan kekuasaan secara lebih

baik dan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengatasi persoalan.

Buku utama yang menjadi rujukan teori/filsafat politik adalah *The Prince*. Pada buku ini Machiavelli mengemukakan bagaimana cara memahami apa yang sesungguhnya terjadi di pemerintahan dan bagaimana kinerja pemerintahan dalam memenuhi janji-janjinya. Kesuksesan, kinerja, dan meraih hasil yang diharapkan, adalah kriteria untuk menilai orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini tidak soal apakah kebijakan itu benar atau salah, sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan demi aefektivitas tertentu.

Antony Jay, pada buku *Management and Machiavelli*, (1987) merupakan salah satu buku yang mengaplikasikan metode Machiavelli dalam mempelajari isu dan persoalan manajemen. Bagi Jay politik sangat terkait dengan manajemen, "Ketika Anda mempelajari tori manajemen beserta teori politik.... anda akan menyadari bahwa Anda sedang mempelajari dua cabang yang sama dari subyek yang sama". Kemudian dia menyimpulkan bahwa "Sebenarnya Machiavelli telah memberi nasihat yang penting dan pengamatan yang tajam bagi semua manajemen papan atas..." (1987: 15-16).

Francis Bacon (1561-1626) adalah seorang filsuf yang dikenal dengan pernyataan "pengetahuan adalah kekuasaan". Dari pernyataannya ini Bacon kemudian menurunkan pernyataan yang terkait dengan administrasi. *Pertama*, kemajuan tergantung kepada organisasi pengetahuan ilmiah, dan pemerintahan tergantung kepada organisasi pengetahuan kebajikan. Pemerintah menjalankan seni dan penilaian pengetahuan yang rumit. Di sini,

Bacon seperti menjadi peletak dasar manajemen pengetahuan (Knowledge Management) yang baru terealisasi pada abad ini. Kedua, berkenaan dengan kebijakan; raja harus menyadari perlunya membangun persetujuan dan kebijakan memerlukan legitimasi. Kebijakan adalah legitimasi itu, sebab bagi Bacon kebijakan adalah aktivitas dimana keputusan raja akan memfasilitasi keseimbangan kekuatan-kekuatan politik. Ketiga, Bacon menuliskan utopia negara administratif berbasis pengetahuan pada buku *New Atlantis* (diterbitkan setelah dia meninggal, pada tahun 1627).

Negeri utopian itu didirikan oleh Raja Solomon. Raja ini menganut filosofi yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah dasar dari masyarakat yang baik. Sang raja mendirikan pusat riset ilmiah: Gedung Solomon namanya, yang salah satu tugasnya adalah mendapatkan pengetahuan dari seluruh dunia. Pusat riset ini memberikan dasar-dasar kedaan dan kekayaan negeri, dan menopang pemeliharaan kekuasaan dan otoritas raja. *New Atlantis* adalah tempat yang tertib di mana semua orang mengetahui tempatnya masing-masing di dalam hierarki sosial; dan pengetahuan, meskipun bermanfaat bagi kesejahteraan semua orang pada dasarnya memiliki fungsi pengaturan untuk mempertahankan kekuasaan negara. *New Atlantis* adalah sebuah tempat di mana kebijakan dilandasi oleh informasi, kebenaran, nalar, fakta dan bukan dilandasi oleh “berhala pikiran”: berhala suku, gua, pasar dan teater.

Memahami Kaitan Filsafat Administrasi dan Filsafat Negara

“Karena filsafat negara adalah tali pengikat seluruh warga negara, maka filsafat administrasi pendidikan harus selaras dengan

filsafat yang berlaku di suatu negara”, demikian pernyataan yang dapat ditemukan dari tulisan Prof Dr. Dadang Suhardan, M.Pd (lihat Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Pengelolaan Pendidikan*, 2008). Pada pernyataan ini, keterkaitan filsafat negara dan filsafat administrasi pendidikan sekedar konfirmasi, penjagaan irama agar tidak terjadi penyimpangan arah administrasi dari kebijakan (bahkan pandangan hidup) suatu negara. Apakah kaitan Filsafat negara dengan filsafat Administrasi Pendidikan hanya sekedar itu saja?

Pada hemat saya tidak sesederhana itu. Benar bahwa ruang lingkup administrasi ada dalam kerangka kepentingan negara, administrasi di negeri ini memang ada untuk mengelola kegiatan kenegaraan. Namun filsafat membicarakan ide dasar dan mencoba mencari perluasan ide dasar itu agar dapat mengembangkan ilmu tertentu menjadi terus menanggapi perubahan masyarakat. Maka, kaitan yang dapat direlasikan adalah ide dasar yang sama antara kedua filsafat itu, yaitu pengaturan, pembuatan kebijakan, pembuat keputusan, kepemimpinan, dan hak-hak publik. Bedanya terletak pada ruang lingkungannya saja, yaitu bahwa penyelenggaraan negara menempati ruang lingkup yang lebih luas sementara organisasi dapat saja di lokus yang terbatas, namun cara pengelolaannya bisa sama.

Maka membicarakan kaitan antara Filsafat Administrasi Pendidikan dengan Filsafat negara tidak hanya membicarakan falsafah hidup atau norma suatu negara yang harus menjadi falsafah hidup suatu organisasi, atau tidak sekedar menerjemahkan suatu kebijakan negara dalam aktivitas organisasi. Kaitan keduanya harus dibicarakan dari hal yang terdasar, yaitu pengaturan, kuasa memerintah dan memutuskan, dan kepemimpinan.

Hal lain yang terkait dengan filsafat negara adalah politik pengaturan ruang publik. Konsep negara modern yang demokrat dapat dirunut dari teori tentang publik. Gagasan publik dan privat secara teoritis dimulai dari bangsa romawi yang mengemukakan term *res publica* dan *res privata*, kemudian dalam Filsafat Yunani Kuno terdapat istilah *koinon* (publik) dan *idion* (privat). Filsuf Jerman, Hannah Arendt, ketika mengemukakan dikotomi publik dan privat memberikan deskripsi perbandingan yang cukup sederhana, misalnya dapat dilihat pada tabel berikut:

PUBLIK	PRIVAT
Polis	Rumah Tangga
Kebebasan	Keharusan (<i>necessity</i>)
Pria	Wanita
Kesetaraan	Kesenjangan
Keabadian	Kesementaraan
Terbuka	Tertutup

Politik (atau pengurusan hal-hal bersama) masuk dalam urusan publik, yang bersifat terbuka, penuh kebebasan, dan mengupayakan kesetaraan. Sedangkan ruang privat bersifat tertutup (tergantung pada komunitasnya), bersifat sementara, membiarkan kesenjangan, dan dilakukan atas dasar keharusan. Komunitas agama adalah ruang privat, karena tertutup bagi penganut agamanya dan mengandaikan tindakan berdasarkan keharusan. Diskusi konsepsi negara bergulir dalam persoalan: apakah negara berhak mengurus soal-soal privat, atau tidak? Persoalan ini muncul karena ada upaya melakukan penataan seluruh aspek kehidupan dalam negara modern, lalu pada kenyataannya selalu ada rembesan hal publik ke wilayah privat dan sebaliknya. Padahal negara modern haruslah rasional, dalam makna terlepas dari hal-hal subyektif (yang muncul dari ruang

privat), dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Di sisi lain, semangat dunia modern adalah masing-masing individu harus optimal, tidak bisa dikekang oleh negara, ini berarti hal-hal yang bersifat ruang privat tak bisa dikorbankan.

Pada titik ini muncullah pertanyaan, bagaimana cara menanggulangi pengaturan hubungan antara ruang publik dan ruang privat?

Ada banyak teori yang kemudian mencoba merumuskan bentuk hubungan antara keduanya, misalnya ahli ekonomi politik memasukkan gagasan pasar untuk menjelaskan perbedaan kedua ruang ini. Cara memaksimalkan kepentingan individual (hal privat) dan sekaligus mempromosikan “kepentingan publik” (hal publik) adalah dengan menggunakan kekuatan pasar. Menurut pendapat ini, berfungsinya kebebasan dan kebebasan individu dalam mengambil pilihan bisa memenuhi kepentingan individu sekaligus meningkatkan ketersediaan barang publik dan kesejahteraan publik. Karena itu peran negara dan politik adalah menciptakan kondisi di mana kepentingan publik dapat terjamin. Konsekuensinya, pemerintah lebih baik tidak terlalu banyak turut campur tangan. Menurut ahli ekonomi politik hal ini bukan berarti bahwa negara tidak terlibat dalam penyediaan fasilitas publik, tetapi negara menjalankan perannya dengan mendorong kebebasan ekonomi dan pasar. Segera setelah itu, akan terciptalah ketertiban spontan dan penghargaan atas hak-hak peserta ruang publik. Inti dari pemikiran ini dapat ditemukan pada karya Adam Smith, *Wealth of Nations* (1776) dan John Mill, Torrens, McCulloch, dan para pengikutnya.

JS Mill di abad pertengahan ke-19 mengemukakan kriteria esensial tentang ruang publik, yaitu merugika (*harm*).

Ruang publik adalah ruang yang tidak merugikan orang lain (Mill, 1968). Tentu saja persoalannya adalah apa-apa yang dianggap “merugikan” itu selalu berubah dan berkembang seiring dengan semakin banyaknya informasi tentang persoalan sosial dan persoalan lainnya.

John Dewey di Amerika dan Keynes di Inggris mengajukan teori yang lain, mereka tidak mempercayai pasar sebagai pemicu perbedaan ruang publik dan privat, pasar tidak dipercaya dapat menciptakan ketertiban spontan. Dewey dan Keynes meyakini bahwa yang bisa menyeimbangkan dan memenuhi kepentingan ruang publik sekaligus ruang privat adalah pengetahuan --Dewey menyebutnya sebagai “kecerdasan yang terorganisir” (*organized intelligence*). Jadi, kunci untuk memecahkan konflik antara ruang publik dan ruang privat adalah pemerintahan yang lebih berpengetahuan. Gagasan Dewey dan Keynes ini berkembang pada PD II. Di Era pasca PD II ini muncul keyakinan bahwa negara memiliki peran dalam mengelola (*to manage*) ruang “publik” beserta problem-problemanya dan menangani aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang tak lagi mampu ditangani oleh kekuatan pasar. Kunci masuknya adalah penciptaan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat oleh negara.

Salah satu konsekuensi dari pertumbuhan negara sebagai sarana untuk merekonsiliasi kepentingan publik dan privat adalah berkembangnya “birokrasi” sebagai bentuk organisasi yang semakin rasional (Weber, 1991: 196-252). “Administrasi publik” berkembang sebagai sarana untuk mengamankan “kepentingan publik” dengan memanfaatkan kelompok pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan perintah dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Karena itu, birokrasi publik berbeda dengan birokrasi yang

adalah dalam sektor privat atau swasta (bisnis, perdagangan, dan industri) sebab birokrasi publik dimotivasi untuk mengamankan “kepentingan nasional” ketimbang kepentingan privat dan swasta. Jadi, sementara ahli ekonomi politik berpendapat hanya pasarlah yang dapat menyeimbangkan kepentingan publik dan privat, ahli politik liberalisme justru mendorong administrasi publik sebagai cara untuk mempromosikan kepentingan publik.

Pada tahun 1880-an, Woodrow Wilson merumuskan teori penting untuk konsepnya mengenai birokrasi sebagai pembela “kepentingan publik”. Wilson menyatakan bahwa perlu dibedakan antara politik dan administrasi (Wilson, 1887). Administrasi sebagai sebuah kerangka analisis birokrasi dalam sistem politik liberal berkembang pesat ketika itu, yakni periode ketika PNS dilihat sebagai fungsionaris yang bekerja untuk melayani kepentingan publik sebagaimana didefinisikan oleh proses politik. Gagasan bentuk administrasi yang non-politis, rasional, dan hierarkis merupakan gagasan penting bagi ide demokrasi liberal (Mill, 1968). Pembagian negara menjadi bidang politik dan dunia “rasional” atau birokrasi ini mirip dengan pembagian antara ruang publik dan ruang privat. Pengaruh pemikiran ini terus berpengaruh dari tahun 1950 sampai tahun 1970-an.

Menjelang akhir 1970-an, garis demokrasi ruang publik (negara, politis) dan ruang privat (dunia rasional birokrasi, administrator) semakin luruh. Kemampuan pemerintah (apartur administrasi negara) dalam menyelesaikan masalah-masalah publik semakin diragukan. Untuk itulah muncul lagi kecenderungan untuk menjadi pasar dan kebebasan memilih sebagai cara pengurusan ruang publik. Selama era 1980-an dan 1990-an argumen bahwa pasar sebagai penentu keadilan penataan ruang publik mulai

berkembang. Pergeseran ini bisa dilihat pada enomena munculnya kajian “manajemen sktor publik” (birokrasi berbasis pasar) dan hilangnya kajian “Administrasi publik” (birokrasi berbasis negara).

Di titik ini kita dapat menemukan perbedaan yang mendasari Ilmu manajemen dan Ilmu administrasi. Fokus pendekatan manajemen adalah peningkatan efisiensi, efektivitas, dan perbaikan perekonomian sektor publik (bukan kepentingan politik) dengan menggunakan teknik-teknik yang pernah dianggap sebagai teknik yang cocok bagi sektor privat/profit. Sementara administrasi memfokuskan diri pada penjaminan “kepentingan publik” demi perbaikan kepentingan politik negara.

Perbedaan antara sektor publik dan Sektor privat

Hal publik terkait dengan negara, sedangkan hal sektor terkait dengan non-negara atau pihak swasta. W.F Baber (Masey, 1993: 15) berpendapat bahwa sektor publik memiliki sepuluh ciri penting yang membedakannya dari sektor swasta:

- Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih medua
- Sektor publik menghadapi lebih banyak problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya
- Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam
- Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas
- Sektor publik lebih mementingkan kompensasi atas kegagalan pasar

- Sektor publik melakukan aktivitas yang lebih besar mengandung signifikansi simbolik
- Sektor publik paling ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas
- Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespons isu-isu keadilan dan kejujuran
- Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik
- Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta

Masalah lainnya adalah adanya dua jenis organisasi yang saling berbeda: profit dan non profit (seperti sekolah, organisasi relawan, rumah sakit, dsb). Lalu bagaimana perbedaan antara keduanya? Antony dan Herzlinger menyatakan bahwa garis demarkasi di antara keduanya adalah “dalam organisasi nonprofit, keputusan yang dibuat oleh manajemen dimaksudkan untuk menciptakan layanan yang sebaik mungkin sesuai dengan sumber daya yang tersedia; dan keberhasilannya diukur terutama berdasarkan seberapa banyak layanan yang diberikan oleh organisasi ini dan seberapa baik layanan yang diberikan” (Anthony dan Herzlinger, 1980:31). Di sini ditemukan ciri, bahwa organisasi profit bertujuan mengambil keuntungan finansial, sedang organisasi non-profit pada kesejahteraan sosial.

Beberapa ciri sektor non profit menurut Anthony dan Herzlinger:

- Tidak mengejar keuntungan
- Cenderung menjadi organisasi pelayanan
- Ada bayasan yang lebih besar dalam tujuan dan strategi

yang mereka susun

- Sektor ini lebih tergantung pada klien untuk mendapatkan sumber daya finansial
- Sektor ini didominasi oleh kelompok profesional
- Akuntabilitasnya berbeda dengan akuntabilitas sektor provit
- Manajemen puncak tidak punya tanggung jawab yang sama atau imbalan finansial yang sama
- Organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada elektrolat dan proses politik
- Tradisi kontrol manajemen kurang.

Lalu apakah memang demikian perbedaan antara keduanya, karena dalam kenyataannya ada perbedaan antara sektor publik/ nonprofit dengan sektor privat /nonprofit. Pada kenyataannya, orientasi sekolah yang dikelola swasta (privat/nonprovit) berbeda dengan sekolah yang dikelola negara (publik/nonprovit). Sekolah yang dikelola swasta di samping dapat memberikan standar pelayanan konsumen sekaligus juga mendapatkan keberhasilan komersial yang tinggi. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya pengaruh manajemen (ilmu pengelolaan berbasis pasar) dalam ilmu administrasi sektor publik (pengelolaan berbasis negara) yang terjadi pada tahun 1980-1990-an.

Memperjelas Makna Sektor Publik

Para ekonom memiliki teori bahwa kita dapat membedakan ruang publik dan ruang privat dari sudut pandang

“barang-barang” (*goods*).

Barang-barang publik adalah “barang” atau jasa yang tersedia untuk semua orang. Barang-barang publik murni adalah barang-barang yang dikonsumsi berdasarkan pilihan bebas dan hanya oleh orang-orang yang mampu mengonsumsinya. Samuelson (1954) mengatakan bahwa karakteristik utama dari barang-barang publik adalah bahwa barang-barang itu dapat dibagikan, atau tersedia untuk semua orang, bersifat non-eksklusif, didapatkan melalui pembayaran pajak. Sedangkan barang-barang privat bersifat eksklusif, yang didapatkan berdasarkan sistem harga yang berlaku di pasar.

Tapi benarkah demikian? Apakah semua barang-barang publik adalah barang-barang yang semua orang dapat mengonsumsinya, dapat dibagikan, dan memenuhi hajat hidup orang banyak; sementara barang privat berarti sebaliknya. Misalnya pendidikan pada awalnya dianggap sebagai hal yang publik, karena pendidikan adalah hak semua manusia. Seharusnya pendidikan secara setara dapat dinikmati oleh semua pihak, namun dalam kenyataannya di banyak negara pendidikan memang hak semua warga namun pendidikan berkualitas adalah hak pihak tertentu saja. Ini berarti apa yang disebut barang-barang publik murni kini semakin tidak lagi bisa disebut barang publik murni. Kemurnian barang publik ditentukan oleh siapa yang menyediakannya dan siapa yang mendapatkannya.

Immanuel Kant dan Konsep Negara Modern

“Pencerahan adalah pembebasan manusia dari pengawasan yang diadakannya sendiri. Pengawasan

adalah ketidakmampuan manusia untuk mempergunakan pengertiannya tanpa bimbingan orang lain. Yang diadakannya sendiri adalah pengawasan ini bila penyebabnya terdapat bukan pada kurangnya rasio melainkan pada kurangnya ketegasan dan keberanian untuk mempergunakan rasio itu tanpa bimbingan orang lain. *Sapere aude! :beranilah mempergunakan pikiranmu sendiri! Itulah semboyan pencerahan”* (Immanuel Kant)

Immanuel Kant adalah filsuf pencerahan. Dalam pencerahan itu ada kehendak untuk menjadi rasional, yaitu membebaskan kesadaran dari kungkungan dogmatisme dan mencapai *mundigkeit* (otonomi dan tanggung jawab). Manusia harus mandiri, untuk dapat mandiri ia harus bebas dan menggunakan rasio sebagai rujukan setiap tindakannya. Sebelum zaman modern, negara diatur oleh mitos spiritualitas atau keutamaan seseorang (darah biru, atau ras tertentu). Zaman modern yang diisi oleh manusia *mundigkeit* menafikan sistem lama itu dan membayangkan suatu negara yang memperlakukan manusia rasional secara sama dengan tatanan buatan manusia rasional itu sendiri (tatanan otonom).

Plato, filsuf Yunani dari abad sebelum Masehi, menyatakan bahwa sebaik-baik pemimpin yang mampu memimpin negara dengan baik dan bijaksana adalah filsuf. Ia membagi manusia ke dalam tiga golongan, yaitu, manusia kepala, manusia yang mengambil keputusan dengan menggunakan akal dan kebijaksanaan mereka. Manusia dada, adalah orang-orang yang mengambil keputusan dengan menggunakan emosi. Dan manusia perut, adalah orang-orang yang mengambil keputusan dengan menggunakan hawa nafsu. Pada pemikiran ini, ada pemilahan derajat kemanusiaan yang ditentang oleh semangat kemodernan. Semangat pencerahan

adalah keberanian untuk menggunakan rasio sendiri oleh semua manusia tanpa pandang bulu. Tidak ada manusia kepala, perut atau dada; semuanya –bila mau—adalah manusia kepala, atau manusia dada, atau juga manusia perut. Kalaupun ada salah satu menjadi kepala, itu sekadar fungsi sementara saja yang dapat berubah jika fungsi itu disepakati berhenti. Seperti semua orang adalah rakyat biasa, ia dapat menempati fungsi sebagai presiden bila ia disepakati menjadi presiden.

Prinsip kesamaan ini memperlakukan kepentingan secara berbeda, yang meletakkan prinsip logika bahwa keseluruhan melingkupi bagian-bagian. Prinsip ini menegaskan bahwa “kepentingan individu berkaitan dengan masing-masing individu yang berbeda dari individu dan manusia lainnya; sedangkan kepentingan asosiasi berkaitan dengan suatu komunitas atau masyarakat”. Kedua kepentingan ini harus berjalan dengan selaras dan serasi, sehingga memungkinkan terbentuknya hubungan antar manusia dalam berpartisipasi dalam komunitas tanpa kehilangan hak-hak dan kebebasannya sebagai individu. Negara modern memiliki peran untuk menyerasikan sejumlah kepentingan itu. Pendapat ini sedikit berbeda dengan pendapat Plato yang menyatakan bahwa “Negara yang baik menghasilkan warga negara yang baik, dan warga negara yang baik akan menghasilkan negara yang baik pula”. Negara modern adalah representasi dari kepentingan sejumlah warga negara dalam keselarasan demi tujuan bersama. Ide dasar filsafat negara adalah, “bagaimanakah menyerasikan sejumlah manusia yang memiliki kepentingan berbeda itu dalam satu tatanan bersama?”

F Budi Hardiman dalam artikel “Bangsa Setan-setan” dan Universalisme Lunak Kant tentang Politik dalam Masyarakat

Majemuk” mengemukakan uraian mengenai pemikiran Imanuel Kant mengenai negara ini. Pemikiran Kant ini merujuk pada tulisan berjudul *Zum ewigen Frieden (1795): Menuju Perdamaian Abadi*.

Pada buku ini Kant menyatakan, ”Masalah pendirian negara, ...dapat dipecahkan bahkan oleh suatu bangsa setan-setan (asalkan mereka memiliki akal)”. Apakah maksud kalimat aneh ini? Bagaimana mungkin negara didirikan oleh para setan-setan jahannam yang serba egois? Pastilah rakyatnya juga setan-setan.

Pada buku itu, menurut F Budi Hardiman, Kant merumuskan sejumlah asas yang menjadi ide dasar pendirian negara Republik atau demokrasi. Bagi Hardiman ada tiga asas (plus satu asas tambahan) dalam pendirian suatu negara. *Asas pertama* “susunlah konstitusi negara yang netral dari agama dan moral sehingga tidak menjerumuskan rakyat pada konflik moral ataupun agama, melainkan memperhitungkan bagaimana ”mekanisme alam” mengatur hubungan antarindividu”. *Asas kedua* Pimpinlah negara tanpa memaksakan kebenaran salah satu agama atau moralitas rakyatmu sebagai alasan kekuasaanmu, melainkan setialah kepada konstitusi kebebasan itu. *Asas ketiga* Periksa apakah terdapat kesesuaian konstitusi kebebasan itu dengan aspirasi publik di bawah tatapan mata publik.

Ketiga asas ini, yaitu 1) pragmatisme kepentingan alamiah; 2). kepemimpinan yang netral dari pandangan-pandangan religius dan moral; dan 3). kepublikan harus dilengkapi dengan asas ke-4 yang merupakan perluasan dari kepublikan, yaitu: Konstitusi negara harus memungkinkan saling-pemahaman antaragama dan memberi ruang untuk titik-titik temu nilai-nilai agama dan moral

yang berbeda-beda karena saling pemahaman akan nilai-nilai universal bersama itu juga merupakan "aspirasi publik" dalam masyarakat majemuk.

Ketiga asas pendirian negara republik ini lahir dari kepercayaan terhadap kekuatan sistem rasional. Frase dalam tanda kurung "asal mereka memiliki akal" merupakan titik sentral yang memaksudkan bahwa asal negara dapat menjamin kepentingan privat dengan suatu konsensus rasional untuk tidak mengintervensi privasi masing-masing, maka negara itu dapat berdiri. Negara akan dapat melindungi setiap setan individual untuk menjalankan kebebasan privatnya masing-masing. Agama dan moral "disingkirkan" dalam pendirian negara karena agama dan moralitas tertentu memiliki "lawan" yang bisa jadi tidak sejalan dengan "lawan"-nya negara, yang akhirnya antar warga negara dapat bertentangan atas nama agama. Untuk itu "asal memiliki akal" adalah inti awal pendirian negara.

Ada beberapa catatan mengenai teori Kant ini, yaitu soal akal sehat, moralitas, dan kepublikan. Pada teori ini, Kant sedang menjelaskan bahwa negara dapat didirikan dengan rasionalitas strategis, padahal manusia selain memiliki rasionalitas strategis, juga memunyai moralitas dan religiositas. "Namun, mengapa manusia terus bertengkar dan mengapa setan-setan bisa bersepakat? Karena setan-setan itu lebih pragmatis daripada manusia. Daripada bertengkar berlarut-larut soal agama, kebudayaan dan moralitas, dan mendirikan konstitusi atas dasar nilai-nilai kontroversial itu, adalah lebih menguntungkan survival mereka jika membangun konstitusi negara yang menerapkan "mekanisme alamiah" ke dalam masyarakat mereka. Jadi, daripada memberi nasihat-nasihat moral atau khotbah-khotbah religius,

adalah lebih baik menerapkan suatu sistem hukum dan manajerial pemerintahan yang memaksa mereka menghormati kebebasan orang lain, bukan karena alasan moral atau agama, melainkan karena alasan pragmatis, yakni demi kebebasannya sendiri. Asumsi Kant: struktur-struktur yang "fair" yang menata hubungan para warga negara akan membantu mereka menghendaki perdamaian sebagai sesuatu yang rasional (strategis)", tulis Hardiman.

Pada asas kedua, moralitas dihadapkan dengan kekuasaan. Pada titik ini dapat dipahami bahwa moral dapat dibedakan dalam dua hal. [1] moral partikular yang terkait dengan kelompok sosial dan [2] moral universal yang mendasari konstitusi. Jika negara mau damai, pemimpin tidak hanya sekadar konsekuen dengan konstitusi kebebasan, melainkan juga terbuka untuk merevisi konstitusi itu agar makin sesuai dengan moral universal. Pada titik ini, tugas negara adalah "menemukan cara bagaimana mekanisme alamiah dapat diterapkan pada manusia sedemikian rupa sehingga antagonisme sikap-sikap keji mereka akan membuat mereka saling memaksa tunduk pada hukum yang memaksa dan dengan jalan itu menghasilkan sebuah keadaan damai untuk memberlakukan hukum". Hukum itu sendiri harus menjamin kebebasan privat warga negara menganut pandangan moral dan religius yang berbeda-beda, tapi akan memberi sanksi pada mereka yang melanggar hak dan kebebasan privat orang atau kelompok lain.

Pada asas ketiga Kant mengemukakan soal kepublikan. Hardiman menegaskan bahwa "Kepublikan" berarti dapat diakses oleh publik. Mereka akan menyatakan kepentingan mereka lewat cara-cara yang terbuka terhadap kontrol publik. Kalau demikian, hukum dan konstitusi itu sendiri mencerminkan nalar publik sedemikian rupa sehingga setiap pasal konstitusi atau hukum

mencerminkan aspirasi universal publik. "Semua tindakan yang berhubungan dengan hak orang-orang lain yang maksimalnya tidak sesuai dengan kepublikan," demikian Kant, "adalah tidak sah". Jadi, suatu undang-undang yang mencerminkan kepentingan kelompok atau aliran tertentu dan tidak mencerminkan kepentingan publik tidaklah legitim.

Keseluruhan asas pendirian negara ini bertumpu pada akal dan konstitusi yang mengatur, ini pula yang menjadi asas organisasi. Administrasi juga berisi aturan untuk menggunakan sumberdaya yang ada demi tujuan tertentu, kemudian akal menjadi landasan hubungan dan mekanisme pelaksanaan administrasi. Tetapi apakah sekaku itu?

"Negara yang didirikan atas dasar "mekanisme alam" mungkin saja akan menyatukan semua individu yang berpikiran strategis dalam "universalisme keras", tapi negara macam itu hanyalah sebuah "sistem" tindakan-tindakan rasional: bertujuan sebagaimana tampak dalam "pasar" dan "birokrasi", ujar Hardiman. Padahal, "masyarakat" adalah sesuatu yang "lebih" daripada "sistem". Masyarakat adalah suatu *Lebenswelt* (dunia-kehidupan) yang melibatkan penghayatan nilai-nilai moral, kultural, dan religius". Kemudian Hardiman melanjutkan,

"Untuk negara manusia, dibutuhkan juga "universalisme lunak". Manusia adalah makhluk moral dan religius, maka ia tak hanya memberi arti teknis-pragmatis pada benda-benda dan tindakannya, melainkan juga arti praktis-moral. *The founding fathers* dan para legislator hukum masyarakat majemuk harus bisa sepakat tidak hanya mengenai "sistem" manajemen republik, melainkan juga "dasar-dasar moral universal kemanusiaan" yang membangun solidaritas universal manusia dari berbagai agama,

suku, ras, dan orientasi politis dalam negara itu.

”Universalisme keras” yang diandaikan oleh liberalisme Kant harus dilanjutkan dengan ”universalisme lunak”. Suatu konstitusi negara akan memuaskan manusia sebagai makhluk moral dan religius jika nilai-nilai moral dan agamanya juga diperhitungkan di dalam kehidupan publik. Namun, nilai-nilai itu harus diuji dulu lewat asas kepublikan, yakni apakah nilai-nilai itu, misalnya dari agama atau suku tertentu, dapat diterima oleh pihak-pihak lain secara universal dan tanpa paksaan.

Untuk itu, setiap kelompok dari tradisinya sendiri harus menggali dan menumbuhkan konsep ”hospitalitas” sebagaimana diulas Kant dalam bukunya. Hospitalitas berarti sikap menyambut yang lain dalam keberlainannya, sikap terbuka terhadap pluralisme nilai-nilai. Hospitalitas terkandung dalam setiap tradisi religius dan berkaitan dengan nilai-nilai universal hak-hak asasi manusia. ”Universalisme lunak” tak lain daripada interseksi nilai-nilai agama-agama yang berbeda-beda dalam horizon kemanusiaan dalam keberagamannya. Titik persilangan itu terdapat dalam visi dalam setiap agama yang menyambut pihak-pihak yang berbeda dari dirinya dalam semangat keterbukaan.

Gagasan Filsafat Negaranya Imanuel Kant ini dapat ditelusuri dari teori rasionalismenya. Kant membagi rasionalitas menjadi dua bagian: a) rasionalisme murni dan b) rasionalisme-strategis. Rasionalisme murni didefinisikan sebagai ”upaya akal untuk mencari cara untuk mencapai *motiv* tertentu.” Jadi, misalnya, maksimasi kepuasan individu walaupun mengorbankan pihak lain adalah masuk dalam kategori tindakan rasional (murni). Sementara itu, rasionalisme-strategis (juga disebut pragmatis) lebih didasari pada konsensus untuk tidak mengintervensi domain kepentingan

orang lain, karena demi menjaga kepentingan sendiri agar tidak diintervensi oleh orang lain (pragmatis sekaligus strategis). Rasionalitas-strategis ini diungkapkan dengan bahasa berbeda oleh peraih Nobel Ekonomi 2005, Schelling dan Aumann, dalam “Game Theory” nya yang secara matematis mengkalkulasi bahwa “kerjasama akan lebih menguntungkan daripada persaingan” (bahasa ekonomi) atau “perdamaian lebih menguntungkan daripada perang” (bahasa hubungan internasional).

Hal lain yang dapat diberi catatan adalah konsepsi negara Imanuel Kant ini didasarkan pada asumsi dasar mengenai manusia. Imanuel Kant menyatakan bahwa, “Manusia dipaksa menjadi warga Negara yang baik meskipun mereka tidak baik secara moral (*man is forced to be a good citizen even if not a morally good person*)”. Dengan adanya hukum yang bersifat memaksa serta memberikan sanksi-sanksi bagi penyimpangan, menurut Kant, dapat membuat masyarakat tunduk pada hukum dan konstitusi, selain itu, mereka juga memikirkan tentang kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang pada akhirnya akan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang baik.

Menurut kacamata Kant, hukum moral dilihat sebagai suatu “perintah pasti”, bahwa hukum moral itu berlaku dalam setiap situasi dan keadaan. Hukum itu berupa perintah yang memiliki kewenangan dan kekuatan mutlak untuk memaksa. Menurutnyanya kemutlakan yang terdapat dalam hukum moral sama halnya dengan kemutlakan yang terdapat dalam hukum kausalitas. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada hukum-hukum universal dan mengarahkan kerja administrasi agar sesuai dengan hukum alam.

Analisis Kebijakan Publik

“Filsafat (etika, normatif, metodologi) banyak memberi kontribusi untuk analisis kebijakan publik. Bahkan kita bisa menyusun cerita Filsafat politik untuk menunjukkan bahwa perhatian pada “kebijakan” dan problem” telah menjadi aspek sentral dari teori poliyik sejak zaman kuno” (Parsons, 2001: 42)

Khazanah Filsafat Negara tentu saja tidak terbatas pada Imanuel Kant dan Hannah Arendt saja, ada banyak filsuf lain yang mengemukakan gagasannya tentang negara. Namun kedua filsuf di atas dapat memberikan gambaran bagaimana filsafat terkait dengan gagasan dasar kerja administrasi. Melalui dua teori filsafat tersebut kita dapat membayangkan bagaimana “aturan atau kebijakan negara” itu ditentukan (atas dasar apa, kenapa, dan untuk apa?), sekaligus juga dapat mengarahkan kebijakan negara itu demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan manusia.

Di samping itu, seluruh pengetahuan mengenai asal-muasal konstitusi dan kekuasaan di atas dapat menjadi dasar bagi penerapan salah satu praktek ilmu administrasi, yaitu Analisis Kebijakan Pendidikan. Untuk dapat menelusuri hubungan (bahkan pengaruh filsafat) pada analisis kebijakan beberapa filsuf akan dibicarakan, yaitu Machiavelli dan Bacon, Bentham dan Mill, William James dan Dewey, John Rawls dan Nozick, serta Karl Popper.

Bentham dan Mill: Kontibusi Utilitarian

Utilitarianisme yang dikemukakan filsuf Jeremy Bentham (1748-1832) dan James Mill (1733-1836) mendefinisikan

bahwa prinsip utilitas –yakni *the greatest happiness for the greatest number*—seharusnya menjadi dasar tindakan individu dan kebijakan pemerintah. Keputusan yang baik semestinya menghasilkan konsekuensi yang baik. Utilitarianisme percaya bahwa dimungkinkan untuk membuat kalkulasi kesenangan dan kesekitan, serta membandingkan tindakan berdasarkan konsekuensinya. Keyakinan ini memengaruhi perkembangan teori-teori yang berusaha untuk mengkuantifikasikan dan menyusun model perilaku manusia. Utilitarianisme pada kebijakan akan memengaruhi arah kebijakan yang lebih mempromosikan kesejahteraan sosial yang lebih besar dan kebebasan individu yang lebih luas.

Gagasan Bentham dan Mill menentukan inti dari tujuan administrasi bahwa kalkulasi kesejahteraan manusia adalah dimungkinkan dan diharapkan. Dari premis ini, kegiatan penentuan keputusan dalam administrasi dapat menyusun metode perbandingan harga dan keuntungan, serta mendefinisikan tingkat-tingkat efisiensi.

Utilitarianisme disebut juga teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Beberapa ajaran pokok Utilitarianisme (Bagus, 2000: 1144) adalah:

Seseorang hendaknya bertindak sedemikian rupa sehingga memajukan kebahagiaan (kesenangan) terbesar dari sejumlah terbesar orang; Tindakan secara moral benar, bila (1) ia menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan dibandingkan dengan tindakan lainnya yang dapat diambil; (b) ia menghasilkan sebanyak mungkin kebaikan dalam dunia dibandingkan dengan tindakan yang mungkin diambil dalam situasi dan kondisi yang

sama. Secara umum, harkat atau nilai moral tindakan dinilai menurut kebaikan dan keburukan akibatnya

Ajaran bahwa prinsip kegunaan terbesar hendaknya menjadi kriteria dalam perkara etis, dan kriteria itu harus diterapkan pada konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari keputusan-keputusan etis. Prinsip ini sering diungkapkan sebagai kebahagiaan terbesar, atau kebaikan terbesar, bagi jumlah terbesar.

Utilitarianisme dibedakan dalam dua jenis, Tindakan dan Pengaturan. Prinsip Utilitarianisme Tindakan adalah “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”. Sementara prinsip Utilitarianisme Pengaturan adalah “Bertindaklah menurut pengaturan yang pelaksanaannya akan menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”. Prinsip Utilitarianisme Pengaturan inilah yang dapat menjadi ide dasar dari kegiatan berorganisasi dan melakukan tindak administrasi (yang dalam makna sempit bisa berarti pengaturan dan tindakan teratur).

William James dan Dewey: Pragmatisme dan Perkembangan Ilmu Kebijakan

William James (1843-1819) dan Dewey adalah filsuf yang dikenal sebagai Bapak Pragmatisme –walaupun pemikiran ini dimulai oleh Charles S Pierce.

Pragmatisme adalah salah satu aliran filsafat terbesar dalam filsafat modern. Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan harus digunakan untuk memecahkan masalah-masalah setiap hari, masalah-masalah praktis seperti membantu manusia beradaptasi

dengan lingkungannya. Pengetahuan dalam hal ini harus bisa melakukan sesuatu. Karena itu definisi kebenarannya pun adalah bahwa sesuatu disebut memiliki kebenaran jika dia bernilai praktis dalam kehidupan manusia. Kebenaran bertindak sebagai sasaran dalam pencapaian tujuan-tujuan dan kemampuan dalam meramalkan/menyusun masa depan bagi penggunaan manusia.

James berpendapat bahwa kebenaran adalah sesuatu yang terjadi pada ide; ide menjadi benar (atau dibuat benar) oleh kejadian-kejadian. Ide, dalam pengertian biologis, adalah aktivitas yang memungkinkan manusia untuk memodifikasi lingkungan mereka dalam rangka bertahan dan melanjutkan kehidupan. Untuk itu ide harus merujuk pada hal-hal empiris yang dapat dihitung dan menghasilkan nilai guna.

James memahami demokrasi sebagai aktivitas penelitian di mana ide-ide dipertukarkan, dan tempat di mana masyarakat memecahkan masalah melalui pembelajaran dan pengujian. Dia menginginkan pendekatan ilmiah dalam penyelesaian masalah demokrasi. Di sinilah gagasan yang dapat dikaitkan dengan kebijakan, setidaknya itulah yang dikemukakan Laswell "Ilmu kebijakan adalah adaptasi kontemporer pendekatan umum untuk kebijakan publik yang direkomendasikan oleh John Dewey dan rekan-rekannya dalam mengembangkan pragmatisme Amerika (Laswell, 1971: xiv). Warisan pragmatisme James dan Dewey menyerukan agar dilakukan tindakan sosial dan menganjurkan agar ilmuwan sosial terlibat dalam perbaikan kondisi masyarakat dan pemerintah.

John Rawls dan Nozick: Dua Teori Keadilan

Rawls dan Nozick melakukan diskusi filosofis mengenai kebijakan publik sejak 1970-an. Buku *A Theory of Justice* (1971) karya Rawls membahas pandangan utilitarian mengenai kesejahteraan dan mengajukan sebuah model keadilan yang mengandung “kejujuran”. Perbedaan, ular Rawls, bisa diterima hanya jika kesenjangan ekonomi dan sosial bisa memaksimalkan keuntungan bagi pihak yang paling kurang beruntung. Keadilan, dalam pemikiran Rawls, mengisyaratkan kesetaraan kesempatan. Teori Rawls ini memengaruhi penentuan (atau menyediakan landasan filosofis) bagi keputusan atau kebijakan dalam menjalankan organisasi dengan tujuan yang lebih baik.

Nozick dalam karyanya *Anarchy, State, and Utopia* (1974) menentang gagasan Rawls tentang keadilan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan distribusi hasil secara “fair”. Bagi Nozick, konsep keadilan distributif tidak terlalu tepat secara teoritis maupun di dunia nyata, keadilan bagi Nozick harus berhubungan dengan apa yang menjadi hak seseorang. Jadi keadilan bukan ditentukan oleh apa-apa yang dianggap fair: sebuah distribusi mungkin adil, karena setiap orang mendapat atas apa yang mereka miliki, tapi distribusi ini bisa jadi tidak adil dalam pengertian distributif. Nozick kemudian menambahkan bahwa individu dan pasar adalah satu-satunya cara di dunia bebas agar masyarakat dapat diatur dengan baik dan mendapat keadilan.

Argumen Rawls dan Nozick ini mengingatkan kita pada gagasan utilitarianisme James dan Dewey yang mengarahkan kerja administrasi pada kegunaan yang terukur. Bedanya adalah Nozick menambahkan kekuatan utilitarianisme dengan menjadikan negara dan pasar sebagai unsur empiris yang menjadi dasar dari

penentuan kegunaan pragmatis.

Karl Popper dan Model Rekayasa sedikit demi sedikit

Karl Popper adalah filsuf yang mencoba “memperbaiki” proses pembuktian logis pada metode ilmiah. Bagi Popper metode ilmiah tidak terdiri dari proses pembuktian logis berdasarkan akumulasi “fakta” dan bukti, namun lebih berada dalam *setting* di mana teori dapat difalsifikasikan. Problem, bagi Popper, dianggap ada di dalam struktur pengetahuan, bukan (seperti gagasan verifikasi kaum positivisme) terpisah dari struktur pengetahuan (persepsi, nilai, teori, dan solusi).

Pemikiran utama Popper adalah teori falsifikasi, yaitu cara memverifikasi asumsi teoritis (hipotesis, teori) dengan menggunakan pelawannya. Ini dilakukan dengan membandingkan asumsi bersangkutan dengan data yang diperoleh melalui eksperimen. “Falsifikasi didasarkan pada dalil logika formal. Dalil itu berbunyi bahwa proposisi teoritis tidak terbukti bila pendapat sebaliknya turun dari aneka pernyataan yang cocok satu sama lain, kendatipun pernyataan-pernyataan yang digunakan itu didasarkan pada observasi.” (Bagus, 2000: 227). Teori Falsifikasi ini menjadi lawan dari teori Verifikasi yang digunakan oleh kaum neo-positivis.

Implikasi dari teori falsifikasi ini adalah bahwa teori-teori ilmiah yang dianggap sudah final dapat “dibantah”. Menurut Popper, teori umum itu dapat berbahaya bagi Masyarakat Terbuka (*Open Society*) sebab teori itu mengklaim telah mendapatkan kebenaran atau pengetahuan final. Padahal pengetahuan itu tidak pernah final. Semua teori itu bersifat tentatif, dan hakikat

pengetahuan itu bersifat perkiraan (*conjectured*). Pengetahuan berkembang melalui proses yang memunculkan teori tentatif. Teori itu bisa jadi keliru (*falsifiability*) dan karenanya memunculkan problem baru:

$$P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$$

(dapat dibaca: Problem awal akan menghadapi solusi pemecahan yang dicobakan, lalu dengan eliminasi beberapa kekeliruan dari solusi yang diajukan itu dapat memunculkan problem lanjutan. Dengan demikian teori itu tentatif tergantung pada kemampuannya untuk terus-menerus menyelesaikan masalah).

Menuut Popper, apabila falsifikasi diaplikasikan pada masyarakat maka model ini menunjukkan bahwa kemajuan sosial bukanlah bentuk dari perubahan besar atau total, melainkan sebagai akibat dari siklus eksperimental *trial and error* atau “rekayasa sosial sedikit demi sedikit” (*peacemeal social engineering*). Konsekuensinya, ketimbang mencoba mencari sebuah hukum masyarakat atau mengembangkan program reformasi skala besar, ilmu politik atau administrasi lebih baik mencari pemahaman tentang keterbatasan pemahaman dan institusi manusia. Karena itu, pembuatan kebijakan sebagai pemecahan masalah harus diberi semangat eksperimen, keterbukaan, dan kritik.

Etzioni dan Komunitarianisme

Gagasan Komunitarianisme muncul pada tahun 1990-an. Gagasan ini merupakan respon terhadap sentralisme negara dan individualisme pasar bebas. Untuk memberikan gambaran mengenai gagasan ini tulisan Milne ini dapat dikemukakan:

“Komunitarianisme dapat diringkas dalam dua gagasan inti. Menurut pendukung komunitarianisme, masyarakat modern yang terpecah-pecah telah kehilangan *sense of community* dan solidaritas sosial. Hubungan sosial yang penting antara negara dengan individu –mulai dari asosiasi relawan dan masyarakat geografi sampai keluarga, gereja, dan serikat perdagangan –telah tercerai berai akibat merajalelanya individualisme pasar. Hubungan ini harus dilindungi atau dibangun kembali. Dalam kerangka kepercayaan etis, komunitarianisme percaya bahwa liberalisme yang mementingkan diri sendiri telah menciptakan gurun sosial yang teralienasi, yang jauh lebih banyak mementingkan hak ketimbang kewajiban. Dalam hal ini perlu penekanan baru kepada individu dan tanggung jawab, kepekaan moral yang lebih tajam, dan juga penghentian pelecehan terhadap perbedaan antara yang benar dan salah. Pandangan ini mengandung keunggulan karena merupakan semacam filsafat yang fleksibel. Menurut aliran kaum kiri modern ... ini adalah soal solidaritas, persaudaraan dan kebangkitan kembali tradisi gerakan buruh abad ke-19 yang saling membantu, masyarakat yang ramah, seperti kredo moral baru, kebanggaan sipil, kewajiban sosial, dan tradisi....dan mengandung retorika pendidikan moral, nilai keluarga tradisional dan perampasan kejahatan. (The Guardian, 7 Oktober 1994).

Salah satu pemikir teori ini adalah Amitai Etzioni. Dalam ihwal Analisis kebijakan, ia mengajukan jalan tengah antara penggunaan regulasi dan kontrol negara di satu pihak,

dengan penggunaan kekuatan pasar di pihak lain. Term kebijakan, menurut Etzioni, harus ditujukan untuk mempromosikan dan membangkitkan kembali institusi-institusi yang berdiri di antara individu dan negara. Pembuat kebijakan, karenanya, harus mau mengubah kebijakan dalam rangka memberi penekanan yang lebih besar kepada tanggung jawab personal, daripada hak personal. Lebih jauh ia menjelaskan:

“Menurut pandangan komunitarian, inti negara kesejahteraan (*welfare state*) yang kuat tetapi terbatas harus dipertahankan. Tugas-tugas lain yang selama ini dilaksanakan negara, harus diserahkan kepada individu, keluarga dan komunitas. Dasar filosofisnya adalah kita perlu mengembangkan rasa tanggung jawab personal sekaligus tanggung jawab bersama. Tetapi, bagaimana kita melaksanakan aktivitas yang harus ditangani di level masyarakat? Dengan menerapkan prinsip *subsidiary*. Prinsip ini menyatakan bahwa tanggung jawab untuk setiap situasi pertama-tama jatuh pada mereka yang paling dekat dengan persoalan. Hanya ketika solusinya tak bisa ditemukan oleh individu maka keluarga harus terlibat. Dan jika keluarga tidak bisa mengatasinya pula, barulah komunitas lokal boleh terlibat. Dan jika memang persoalannya terlalu besar untuk komunitas, barulah negara diperbolehkan terlibat” (Etzioni, 1994)

Refleksi

Dari semua teori filsafat ini, ditemukan landasan filosofis bagi analisis kebijakan. Terutama dalam hal penentuan tujuan, apakah demi kesejahteraan bersama atau demi kekuasaan belaka. Lebih dari itu, sejumlah uraian mengenai pemikiran

filosofis mengenai negara ini menunjukkan pengaruh filsafat pada pembangunan ilmu administrasi pendidikan.

Lebih dari itu kita telah menemukan simpul dari kelahiran administrasi dan manajemen, yaitu pengurusan ruang publik. Administrasi dan manajemen merupakan ilmu pengelolaan ruang publik dengan perspektif yang berbeda-beda. Sementara administrasi merujuk pada kepentingan negara dan politik, atau dapat dikatakan sebagai ikhtiar pengelolaan ruang publik agar sesuai dengan tujuan negara; manajemen merujukkan dirinya pada kepentingan pasar. Keduanya dalam banyak hal tidak bisa dihilangkan, karena keduanya memiliki kelemahan dan kekuatannya. Karena itu beberapa hal dari ilmu manajemen kemudian memengaruhi praktek dan ilmu administrasi, juga sebaliknya.

Administrasi pendidikan pun dipengaruhi oleh dua kepentingan itu. Pada saat pendidikan diselenggarakan hanya untuk pewarisan nilai-nilai masyarakat atau negara, maka administrasi menjadi penting agar proses pengajaran terjaga dalam pewarisan nilai. Namun, karena pendidikan juga terkait dengan menghasilkan tenaga kerja bagi dunia ekonomi maka pendidikan tidak bisa tidak membutuhkan pengelolaan ala manajemen. Lebih dari itu, pengelolaan pendidikan (terutama swasta) semakin lama semakin berada dalam kancah persaingan, yang memaksa lembaga pendidikan untuk menggunakan strategi manajemen.

4

Filsafat Ekonomi dan Administrasi

Ekonomi merupakan kajian yang tidak bisa dilepaskan dari Administrasi. Prinsip efektif dan efisien, misalnya, adalah prinsip dasar ekonomi: “dengan upaya minimum mendapatkan hasil maksimum”. Belum lagi keterkaitan pendanaan atau pembiayaan dalam administrasi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan definisi umum administrasi yang menekankan pengelolaan sumber daya untuk memaksimalkan hasil lebih dekat pada batasan ekonomi ketimbang batasan pengaturan (negara). Pendek kata, ilmu administrasi dalam banyak hal tak bisa dilepaskan dari pengaruh ekonomi.

Untuk itulah pada bagian ini akan dikemukakan beberapa teori filsafat ekonomi yang dapat menjadi rujukan bagi perumusan filsafat administrasi pendidikan, atau paling tidak menjadi rujukan bagi praktek administrasi pendidikan.

Ekonomi adalah kegiatan manusia yang melibatkan banyak orang –bukankah administrasi pun demikian?. Sejak Aristoteles (384-322 SM) ekonomi sudah dilihat sebagai ilmu praktis yang berbicara tentang tingkah laku dalam memproduksi. Ilmu ekonomi bukanlah ilmu teknis, melainkan praktis. Disebut praktis karena kebutuhan ekonomi dan usaha memenuhi kebutuhan tersebut dialami, bahkan diusahakan banyak orang. Dalam pengertian ini ekonomi bersentuhan dengan konteks sosial politik dan sistem nilai budayanya. Jelas bahwa ekonomi akan memberi perhatian pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut ekonomi perlu direfleksikan dalam konteks sistem nilai tertentu.

Berkaitan dengan dimensi sosial kultural tersebut tak ragu lagi jika dikatakan bahwa ekonomi bersentuhan dengan pendekatan etis yang mengarahkan seluruh kegiatan ekonomi demi perkembangan kemanusiaan. Dengan keluasan hubungan ekonomi dengan sosio-kultural atau etis ini maka ekonomi pun terkait dengan dimensi filosofis yang mencoba mencari dasar terdalam dari praktek ekonomi. Mengenai hal ini Michael Dua (2008: 11) mengemukakan argumennya:

“Ekonomi tidak hanya berurusan dengan masalah teknis tentang bagaimana produksi dan distribusi dilaksanakan, tetapi juga dalam kenyataannya akan bersentuhan dengan

persoalan relasi mereka yang terlibat dalam proses produksi dan konsumsi. “Mereka” yang dimaksud di sini bukan sekadar alat, melainkan manusia, sang subyek produksi dan distribusi. Ekonomi, sebagai suatu masalah praktis, mau tak mau juga bersentuhan dengan dimensi filosofis, ketika bersentuhan dengan manusia sebagai subyeknya”.

Begitu luasnya ruang lingkup ekonomi sehingga ekonomi dapat juga terkait dengan ilmu administrasi (apalagi ilmu administrasi pendidikan). Argumen dasarnya adalah bila masalah ekonomi pada akhirnya bersentuhan dengan masalah fundamental, seperti kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama dan keadilan; maka ada persinggungan antara administrasi dan ekonomi yaitu masalah kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama dan keadilan.

Pada bab ini, ada beberapa filsafat (atau mengutip Michael Dua logika pemikiran) dan moral ekonomi. Kedua sudut pandang ini, akan mengantarkan pembicaraan ekonomi pada pemecahan masalah keadilan.

Gagasan Dasar Filsafat Ekonomi: Fisiokratisme dan Adam Smith

Michael Dua (2008: 17) menyatakan bahwa ada tiga pertanyaan dasar para pemikir ekonomi, yaitu 1) apa yang dipikirkan oleh para ahli ekonomi ketika berbicara tentang bisnis dan manajemen? 2) Apa kira-kira jenis usaha yang paling menarik; 3) apakah usaha tersebut berguna bagi masyarakat?

Para filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, membicarakan masalah ini dari sudut politis. Plato menyatakan bahwa negara yang baik dapat dicapai jika setiap orang memberi sumbangan berdasarkan bakat alamiahnya bagi kebaikan masyarakatnya. Bisnis dan administrasi merupakan salah satu kegiatan produktif yang dapat dilakukan oleh setiap orang berdasarkan bakat, pengetahuan dan keterampilan sebagai sumbangan bagi kesejahteraan bersama. Ini berarti bisnis dan administrasi memiliki alasan yang lebih luas daripada kebutuhan mendapatkan keuntungan jangka pendek, bisnis dan manajemen hanya bermakna ketika memberi sumbangan kepada kepentingan bersama.

Pemikir lain adalah John Stuart Mill. Ia menyatakan bahwa di satu sisi ilmu ekonomi harus menjelaskan bagaimana manusia dan masyarakat mengorganisasikan kegiatan untuk menciptakan keuntungan, di sisi lain juga untuk menciptakan kesejahteraan banyak orang:

“Tugas ekonomi adalah memberi alasan mendasar mengapa ekonomi perlu memfokuskan perhatiannya pada kesejahteraan bersama dan cara yang wajar untuk meningkatkan kekayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama tersebut. Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis [dan administrasi] sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarahkan diri pada kebutuhan hidup manusia perorangan dan berjangka pendek saja, tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara” (Dua, 2008: 18).

Bisnis dan administrasi pada prinsip dasar ekonomi ini adalah untuk kesejahteraan bersama. Gagasan ini di antaranya diusung oleh Francois Quesnay (1694-1774) dan Adam Smith.

Quesnay adalah satu tokoh *fisiokratis* [bahasa Prancis, *physiocrate* yang berarti hukum alam]. Disebut fisiokrat karena pemikiran ekonomi mereka berdasarkan kegiatan petani terhadap alam, bukan dalam hal perdagangan. Bagi mereka, kemajuan yang besar dalam bidang ekonomi hanya dapat ditemukan dalam alam, dalam arti bahwa alam merupakan sumber dari kebutuhan alamiah manusia. Prinsip ekonomi, seperti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak bertentangan dengan hukum alam, yaitu keteraturan kosmis. Karena itu agar keteraturan kosmis terjaga, petani memberikan kerjanya agar fungsi tanah bernilai ekonomi dan para pemilik tanah harus memberikan penghargaan selayaknya kepada para petani.

Quesnay hidup pada saat perdagangan menjadi cara ekonomi utama di abad ke-17. Saat itu ada keyakinan bahwa hanya dengan perdagangan luar negeri sajalah seseorang dapat mendapatkan keuntungan, juga dengan sikap hemat. Pemikiran seperti ini tidaklah menghasilkan kesejahteraan bersama, hanya kaum borjuis saja yang mendapat keuntungan (karena mereka berdagang) sementara rakyat biasa tidak mendapat keuntungan sama sekali (karena mereka petani penggarap tanah kaum borjuis). Quesnay mencoba merumuskan kegiatan ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan bersama bagi para petani.

Perdagangan saja menurut Quesnay tidak melibatkan proses ekonomi suatu bangsa secara keseluruhan, ia memandang bahwa pertanian merupakan salah satu kegiatan produksi yang

dapat melibatkan banyak orang. Bertani, bagi Quesnay, juga menguntungkan baik bagi pemilik tanah maupun bagi petani; pertanian juga dianggap dapat menghasilkan surplus besar bagi petani. Untuk mempertahankan pendapatnya Quesney membongkar sejumlah mitos tentang pertanian pada abad itu.

Pada abad itu diyakini bahwa kualitas tanah menentukan keberhasilan pertanian. Jurang kesejahteraan antar orang ditentukan dari kepemilikan tanah yang berkualitas, dan tanah yang berkualitas rata-rata dimiliki oleh kaum borjuis. Prasangka ini, bagi Quesney, telah mengabaikan faktor lain dari pertanian, yaitu fungsi pekerjaan petani, pengetahuan, dan keterampilan petani sebagai pelaku bisnis (pertanian). Karena itu, implikasinya, para pemilik tanah harus memberikan pembagian hasil yang adil kepada para petani yang telah membuat tanah memberikan hasil tertentu. Petani harus diberikan penghargaan yang tinggi karena mereka bekerja berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Petani, dalam hal ini, adalah subyek ekonomi juga terutama karena peranannya dalam bidang produksi pertanian. Kaum fisiokratis kemudian menyerukan agar para pemilik tanah harus memiliki tanggung jawab moral mengembangkan investasi dalam bidang pertanian dan memberi perlindungan terhadap hak petani untuk bekerja.

Beberapa kesimpulan lain kaum fisiokratis adalah 1) semakin terbuka dan rasional kultur suatu masyarakat, semakin besar pula kemungkinan masyarakat tersebut menjadi kaya dan makmur; 2) sebagaimana para petani (dengan pengetahuan dan keterampilannya) membuat tanah menjadi produktif, kaum bangsawan pun harus menjadikan dirinya turut andil dari proses produksi dengan cara menunjukkan tanggung jawab sosialnya

dengan memikirkan para petaninya.

Lalu dimanakah peran pedagang? Bukankah mereka yang membeli hasil pertanian? Kaum Fisiokratis mengakui peran pedagang, hanya saja sebagai komplementer setelah produksi dilakukan oleh kaum petani. Mereka menjaga klaim bahwa pedaganglah yang menentukan kemakmuran suatu bangsa. Para petani yang berpikiran bisnislah yang menjadi pelaku utama penciptaan kesejahteraan bersama, salah satu caranya adalah dengan mendorong agar petani sendiri mengusahan keuntungan dari setiap kegiatannya yang diselaraskan dengan kewajiban para pemilik tanah dalam memberikan penghargaan terhadap kerja petani.

Pemikiran kaum fisiokratis tentang pertanian sebagai basis kegiatan ekonomi memberikan kita dua perspektif. Pertama, pertanian merupakan kegiatan yang membawa keuntungan; kedua, pertanian merupakan satu kegiatan bisnis yang mendekatkan manusia dengan alam (begitu hasil pertanian memberikan keuntungan, maka para petani akan mengupayakan seluruh keterampilan dan pengetahuannya untuk mengelola alam).

Kelemahan kaum fisiokratis adalah terlalu mengutamakan kodrat alam (yakni keserasian) sambil menafikan kodrat manusia (yakni kebebasan). Pemikiran fisiokratis tidak bisa menjelaskan: bagaimana tukang roti dapat menjadi pelaku ekonomi padahal ia sama sekali tidak bersentuhan dengan tanah; bagaimana pelayanan jasa dapat dianggap pelaku ekonomi? Pemikiran ini, yang semula menginginkan penciptaan kesejahteraan bersama, pada akhirnya menyingkirkan kegiatan ekonomi lainnya terutama yang bersandar pada kegiatan ekonomi yang bersentuhan dengan manusia.

Inilah yang kemudian menjadi perhatian Adam Smith (1723-1790), seorang filsuf kelahiran Kircaldy, suatu kota kecil di Eidenburgh, Skotlandia. Ekonomi, bagi Smith, berakar dari kodrat alamiah manusia untuk menciptakan suatu masyarakat bersahabat yang makmur berdasarkan hubungan simpati antar manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Adam Smith memiliki pemikiran tentang masyarakat modern sebagai klub persahabatan (*The friendly societ*). Ia menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dan perasaan simpati satu sama lain dan secara bersama terdorong untuk membentuk suatu masyarakat bersahabat. Basis dari klub persahabatan ini adalah kebebasan dan simpati.

Masyarakat bersahabat adalah masyarakat yang dibangun atas dasar simpati di mana setiap anggota masyarakat dapat melaksanakan sharing perasaan satu sama lain. Pendorong sharing itu adalah simpati, atau dalam istilah Smith *fellow feeling*. Yang dimaksud *fellow feeling* bukanlah perasaan kolektif, melainkan perasaan yang dimiliki setiap individu untuk membagi perasaannya kepada orang lain. Dalam hal membagi perasaan ini, Smith mengatakan dibutuhkan minimal kemampuan imajinatif untuk merekonstruksi perasaan orang lain.

Prasyarat masyarakat bersahabat, selain *fellow feeling* adalah juga kebutuhan fisik (seperti dikemukakan paham fisiokratis). Namun masyarakat bersahabat membutuhkan syarat lain. Selain kebutuhan fisik, setiap orang dalam masyarakat bersahabat membutuhkan kebutuhan psikologis (Kebutuhan akan simpati atau *fellow feeling*). Kemakmuran dalam pemikiran Smith adalah kebutuhan psikologis itu. Kemakmuran bukan sekadar

kebutuhan fisik namun kebutuhan untuk dapat bersimpati kepada orang lain. Masyarakat bersahabat berkembang karena kodrat manusia yang mengusahakan kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan, yang mengusahakan kesetiakawanan dan menghindari penghinaan terhadap kawan.

Gagasan Smith ini menjadi unsur penting bahwa ekonomi tidak hanya mengurus masalah kebutuhan fisik, tetapi harus berkembang dari penghargaannya terhadap manusia. Martabat manusia, dengan demikian, menjadi tujuan ekonomi. Ini berarti ekonomi mau tidak mau harus bersentuhan dengan martabat manusia: hak dan cita-citanya.

Gagasan lain dari Adam Smith adalah pembagian kerja dan pasar. Pembagian kerja bagi Smith meningkatkan kerajinan pada setiap kerja khusus, yang pada gilirannya justru membuat kondisi hidup pekerja dan masyarakat menjadi lebih baik. Pembagian kerja dapat menjadi sebab kemakmuran pribadi dan bersama, karena hanya melalui pembagian kerja produk-produktivitas dapat ditingkatkan. Pada pemikiran Smith, pembagian kerja lahir dari kecenderungan untuk berdagang dan mempertukarkan satu barang dengan barang lain. Pada sisi lain, Smith juga mengemukakan bahwa 1) kerja merupakan ungkapan pembebasan diri seseorang dari kemalasannya sendiri dan ungkapan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya sendiri; dan 2) kerja adalah ungkapan pembebasan seseorang dari ketergantungannya pada orang lain.

Dalam konsep ini, Smith juga sedang merumuskan hukum dasar masyarakat pasar, yaitu setiap orang berada dalam pertukaran. Pada proses pertukaran itu dibutuhkan pembagian

kerja (yang akan menghasilkan perbedaan produk) sehingga semua orang berada dalam posisi saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Inilah yang disebut *The Invisible Hand*, tangan yang tak terlihat yang menggerakkan semua pelaku dalam masyarakat pasar untuk terus berusaha mengejar keuntungan sambil secara tidak langsung memengaruhi keuntungan pihak lain.

Pada titik ini ada paradoks tentang hakikat manusia. Manusia memang makhluk Tuhan yang otonom, tapi bersamaan dengan itu manusia juga makhluk sosial yang membuatnya bergantung pada orang lain. Pada saat bergantung pada orang lain, individu bisa saja menjadi tidak otonom. Namun Smith menyatakan bahwa dalam mekanisme pembagian kerja manusia bisa membebaskan dirinya dari kelangkaan ekonominya, dari kebutuhannya sendiri dengan cara menyediakan bagi orang lain apa yang mereka butuhkan. Maka, makna kerja adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dalam kebersamaannya dengan orang lain –yang bisa berarti dalam mekanisme pembagian kerja hakikat otonomi manusia tetap terjamin.

Tentang pasar, gagasan Smith dapat dipahami dari pengertian ekonomi. Secara sempit ekonomi dapat dipahami sebagai ikhtiar mengupayakan kebutuhan yang menguntungkan, tujuannya hanya terbatas pada meraih keuntungan ini saja, untuk itu dibutuhkan organisasi ekonomi. Ekonomi dalam arti luas atau ekonomi pasar bebas tidak mengenal tujuan ini, pasar bebas adalah tatanan spontan yang tidak pernah dikendalikan oleh satu tujuan tunggal. Pasar melayani beragam tujuan yang terpisah-pisah, dan bahkan tidak dapat didamaikan satu dengan yang lain.

Michael Dua (2008: 52) menuliskan hakikat pasar bebas seperti berikut ini:

“Jika dalam sebuah organisasi ekonomis para pelaku sepakat untuk saling membantu sama lain untuk mencapai tujuan mereka, dalam sistem pasar bebas mereka terpedaya untuk menyumbang bagi kebutuhan pihak lain tanpa menyadari atau mengetahuinya. Pasar bebas adalah tatanan kosmis yang memungkinkan setiap individu mengejar kepentingannya, namun justru dengan cara itu ia dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan pasar bebas sendiri (yakni tatanan kosmis yang memberi peluang bagi setiap orang untuk mencapai tujuannya sendiri). Karena itu, inti ekonomi pasar bebas adalah sebuah kerangka yang memungkinkan setiap individu secara bebas memutuskan bahu dirinya sendiri apa yang ingin dilakukannya, dan keputusannya itu pada gilirannya sebisa mungkin akan menyumbang terwujudnya suatu masyarakat yang lebih baik, yang lebih makmur”

Catatan lain dari pemikiran Smith adalah bahwa pasar bebas ini tidak bisa terjadi bila monopoli dibiarkan. Kontrol pemerintah tetap diperlukan demi keseimbangan pasar.

Dari kedua pemikiran filsuf ekonomi ini kita menemukan lanskap pemikiran ekonomi yang kerap dianggap negatif untuk dunia ideal seperti pendidikan. Ekonomi ternyata juga demi kenaikan martabat manusia. Smith menyatakan bahwa setiap manusia didorong oleh *the universal desire to better his own condition*, setiap orang memiliki keinginan untuk memajukan kehidupannya sendiri menjadi lebih baik. Motif ekonomi dalam

gagasan Smith adalah kepentingan diri sendiri yang akan berakibat pada pemenuhan kepentingan orang lain.

Kecenderungan memberi peluang besar pada diri sendiri inilah yang kerap membuat kegiatan ekonomi dicurigai. Smith menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *self interest* (atau *self-love*) harus dibedakan dengan *selfishness*. *Selfishness* adalah egoisme belaka, tertuju kepada kepentingan diri sendiri sehingga tidak peduli lagi pada perasaan atau kepentingan orang lain. Sedangkan *self interest* adalah kepentingan diri sendiri yang terhubung dengan orang lain, sehingga memperhitungkan kepentingan orang lain. Smith merumuskannya dalam ungkapan *give me that which I want, and you shall have this which you want*,

Gagasan Smith mengenai kerja, pembagian kerja, tujuan ekonomi dapat dan telah menjadi rujukan dalam praktek administrasi. Pembagian kerja di samping terkait dengan bakat (sebagaimana dikemukakan Plato) juga harus mempertimbangkan kemakmuran ekonomi (sebagaimana gagasan Smith). Kemudian tujuan manajemen atau administrasi adalah perbaikan martabat manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan kebutuhan orang lain.

Pemikiran Ekonomi John Stuart Mill dan JCL Simonde de Sismondi

Gagasan Adam Smith telah membuka diskusi mengenai hubungan kebebasan bisnis dan kontrol pemerintah. Satu hubungan yang dilematis, pada satu sisi kontrol yang berlebihan akan mematikan inisiatif individu dalam kegiatan ekonomi, pada pihak lain monopoli tanpa kontrol akan menghasilkan kerugian

besar bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi itu sendiri. John Stuart Mill (1806-1973), seorang filsuf utilitarian, memiliki gagasan mengenai kebebasan ekonomi.

Gagasan Mill adalah tindakan manusia akan dinilai etis bila tindakan tersebut tunduk pada prinsip kegunaan: mengusahakan kebahagiaan. Prinsip ini memiliki pengertian populer: setiap orang yang mengejar kebahagiaan, pada saat yang sama ingin juga mengejar kesenangan jasmani dan menghindari dari rasa sakit. Gagasan Mill ini merupakan pengembangan dari gagasan Jeremu Bentham, "Setiap tindakan akan dinilai baik jika tindakan itu mengakibatkan kebahagiaan terbesar dari jumlah orang banyak". Bentham mengukur suatu tindakan dengan pertanyaan "apakah tindakan itu memberi manfaat bagi kebanyakan orang lain". Melalui pertanyaan ini Bentham ingin menegaskan bahwa tindakan individu ditentukan salah satunya dengan menghasilkan kebahagiaan bagi banyak orang

Mill memiliki gagasan bahwa yang dimaksud kebahagiaan banyak orang bukan berdasarkan penjumlahan kebahagiaan individu, melainkan suatu organis secara keseluruhan sehingga seseorang yang mengembangkan kebahagiaannya juga mengembangkan kebahagiaan umum.

Mill juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki hasrat yang mendalam untuk bersatu dengan orang lain. Karena perasaan ini, seseorang didorong untuk terlibat dalam semua kepentingan yang lebih besar. Dalam melakukan kerja sama dengan orang lain, ia ingin menempatkan kepentingannya dalam kepentingan bersama. Bertolak dari pemikiran ini, Mill menegaskan bahwa individu tidak boleh menjadi korban untuk kepentingan yang

lebih besar. Di sinilah teori keadilan dibutuhkan, yaitu pengakuan atas klaim seseorang terhadap haknya, terutama hak individu atas kebebasan. Simpulnya, bagi Mill, masyarakat atau organisasi wajib melindungi hak individu karena klaim atas hak individu berkaitan dengan kebahagiaan umum.

Pemikiran ekonomi Mill agak mirip dengan kaum fisiokratis yang menegaskan bahwa kegiatan produksi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pertukaran uang dalam pasar, seperti gagasan Smith, adalah kegiatan kelas dua dalam ekonomi. Unsur ekonomi atau kemakmuran suatu bangsa, dalam pandangan Mill, ditentukan oleh sejauh mana produk yang dihasilkan oleh petani, tukang dan banyak pekerjaan lain itu dapat didistribusikan, dijual, dan diaungkan dalam pasar. Untuk itu, kemakmuran bukan ditandai oleh pemenuhan kebutuhan fisik sesaat melainkan oleh kontinuitas produksi. Teruslah memproduksi dalam jumlah besar, demikian ujar Mill, karena pasti akan ada keseimbangan antara produksi dan penawaran.

Fokus pada keutamaan produksi sebagai penggerak kemakmuran bersama ini mendorong Mill untuk menyatakan bahwa Kemakmuran ekonomi tidak ditentukan oleh permintaan dari pihak konsumen. Kecenderungan memenuhi permintaan konsumen (yang kaya) akan membatasi kemungkinan penciptaan kebahagiaan bersama. Ekonomi harus didorong lagi untuk mengusahakan kebahagiaan umum, minimal menghindarkan penderitaan yang dapat dialami oleh semua orang.

Selain Mill, filsuf ekonomi yang menarik untuk dipertimbangkan adalah JCL Simonde de Sismondi (1773-1842) yang mengkritik sistem ekonomi pasar bebas demi

memaksimalkan kesejahteraan bersama.

Pada awalnya Sismondi merupakan pengikut Adam Smith, namun kemudian Sismondi mengemukakan teori ekonomi sosia. Dalam dimensi ini, Sismondi berpendapat bahwa ekonomi tidak dibangun di atas perhitungan “bebas nilai”, melalui pendekatan matematik yang disimpulkan dari aksioma yang sangat umum, melainkan dibangun di atas studi tentang manusia dan masyarakat. Bagi Sismondi,

“... ekonomi selalu berangkat dari sebuah konteks persoalan yang dihadapi manusia dan masyarakat. Ekonomi bukanlah ilmu matematis melainkan suatu ilmu moral, suatu ilmu yang memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan manusia. Ilmu ini tidak cukup berbicara mengenai angka, melainkan memfokuskan perhatiannya pada perasaan, kebutuhan, dan hasrat manusia. Dengan fokus perhatian ini. Sismondi memandang ekonomi dari persoalan ekonomi politik bukan pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana kekayaan tersebut dinikmati dan bagaimana penyebaran kekayaan itu terjadi dalam masyarakat. Bagi Sismondi, ekonomi harus menciptakan kebahagiaan manusia. Ia harus membangun dirinya menjadi ilmu untuk manusia, menggantikan ekonomi sebagai ilmu demi kekayaan. Ia berpendapat, bahwa kita akan keliru jika kita hanya memperhatikan kekayaan secara abstrak, kemudian bangga dengan angka yang menakjubkan tentang kekayaan tersebut” (Michael Dua 2008 : 100)

Ada dua argumen yang diusung Sisimondi untuk mendukung ekonomi untuk manusia/kesejahteraan bersama. *Pertama*, kepuasan dan bisnis harus diukur dengan standar yang lebih manusiawi (jadi bukan uang yang menjadi indikator keberhasilan ekonomi). *Kedua*, standar kepuasan diukur menurut standar yang lebih manusiawi, standar tersebut harus bisa menjelaskan kebaikan riil hidup manusia sebagai keseluruhan.

Ekonomi sosial demi kebaikan bersama diartikan bahwa tugas ekonomi adalah memberi kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk merealisasikan kepentingan bersama, sehingga kebutuhan dasarnya sebagai anggota masyarakat terpenuhi. Ada dua unsur kebaikan bersama, yaitu kebutuhan dasar manusia dan martabat manusia.

Secara umum, ilmu ekonomi menjelaskan kebutuhan dasar manusia sebagai kebutuhan yang dianggap “sungguh niscaya” atau mendasar sehingga seorang manusia dapat hidup sebagai manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Aristoteles dalam *Etika Nikmachea* menyatakan bahwa kebutuhan dasar menyangkut semua dimensi yang dimiliki manusia. Kebutuhan itu menyangkut kebutuhan manusia untuk menjadi manusia, sekaligus juga kebutuhan taraf kebutuhan material, kesehatan, dan sosial. Pemikiran Aristoteles ini berimplikasi pada kebijakan ekonomi bahwa ekonomi harus memberi ruang agar setiap warga mengusahakan kebutuhan dasarnya, dan berhasil mendapatkannya.

Semua kebutuhan dasar manusia merupakan sarana agar seseorang menjadi dirinya sendiri (otonom). Selain itu yang dibutuhkan manusia untuk otonom adalah kebutuhan akan hidup, kebebasan, dan pencapaian kebahagiaan. Dengan kata lain, suatu

kebutuhan untuk hidup sebagai manusia yang memiliki martabat sebagai manusia.

Pemikiran lain dari Sismondi adalah kritiknya terhadap pasar bebas. Adam Smith menyatakan bahwa pasar merupakan sebuah kondisi yang memungkinkan banyak orang dapat mengungkapkan kebebasan yang dimilikinya, yakni dalam komunikasi dengan banyak orang untuk mencapai kemakmuran bersama. Atas dasar itu Adam Smith menegaskan bahwa pasar merupakan perwujudan kodrat kebebasan manusia. Namun dalam kenyataannya sekarang, kondisi pasar tidaklah demikian. Sebaliknya, pasar sekarang menjadi seperti buta terhaap nasib banyak orang dalam masyarakat.

Kelemahan pasar dalam menjaga kodrat manusia ini berasal dari dua prinsip perdagangan, yakni kompetisi dan *laissez-faire*. Prinsip kompetisi berbunyi: pasar yang sehat hanya dapat digerakkan oleh kompetisi yang konstruktif. Berdasarkan semangat tersebut, setiap orang atau organisasi bersedia untuk bekerja lebih keras dan efisien. Namun, celaknya kompetisi dapat dilakukan dengan semangat destruktif. Dalam semangat destruktif ini, setiap perusahaan yang berkompetisi menggunakan cara-cara yang tidak sehat: membangun manajemen produksi yang efektif sambil menawarkan iklan yang membohongi calon pembeli, menetapkan standar upah karyawan dan kondisi kerja yang rendah, dan sebagainya.

Pemerintah, menurut Sismondi, harus terus mengupayakan keadilan sosial dan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Tanpa itu, pasar bebas akan membuat kesenjangan yang semakin jauh antara kaya dan miskin.

Demikianlah pemikiran Stuart Mill dan Sismondi. Keduanya dapat memberikan perspektif filsafat ekonomi mengenai penyelenggaraan administratif yang akhir-akhir ini dipenuhi standar efektif, efisien, produktif, dan sejenisnya. Melalui perspektif filsafat ekonomi ini, administrasi pendidikan mendapatkan dasar pijakan bahwa bila permintaan pasar dijadikan dasar kebijakan (atau bahkan tujuan) suatu institusi pendidikan maka pertimbangan teori ekonomi sosial dapat digunakan. Atau bahwa ekonomi pada dirinya tidaklah hanya membicarakan keuntungan, melainkan juga membicarakan kesejahteraan bersama; sehingga penyertaan pertimbangan ekonomi dalam dunia pendidikan dapat dilakukan tanpa harus mengingkari ideal pendidikan.

Refleksi:

Masalah-masalah Ekonomi dalam Administrasi Pendidikan

Administrasi Pendidikan tentu saja terkait dengan beberapa masalah ekonomi. Hal yang paling umum dibicarakan dalam ekonomi pendidikan adalah terkait dengan pembiayaan, nilai tukar hasil “produksi” pendidikan, atau penambahan nilai yang dihasilkan dari pendidikan bagi masyarakat.

Kecenderungan menggunakan istilah manajemen daripada administrasi menunjukkan peralihan kecenderungan rujukan administrasi dari Filsafat negara menuju filsafat ekonomi. Masalah lain yang terkait dengan filsafat ekonomi adalah pertimbangan tuntutan pasar yang akhir-akhir ini menjadi dasar bagi manajemen pendidikan juga merupakan salah satu aspek

ekonomi yang menjadi dasar bagi administrasi pendidikan. UU BHP yang memberi ruang bagi investasi dan pertimbangan pasar diduga merupakan perubahan bandul dari ekonomi negara ke arah ekonomi pasar, hal ini pun dapat diterangkan melalui analisis perspektif filsafat ekonomi.

Hal yang mesti dicermati dari uraian Filsafat Ekonomi di atas adalah bahwa hal ihwal ekonomi tidaklah hanya mengurus soal untung rugi. Hakikat dasar ekonomi justru hendak memuliakan martabat manusia, bahkan pasar bebas pun (dalam pemikiran Adam Smith) dapat menjadi ruang bagi penemuan dan eksplorasi kebebasan manusia. Ini berarti dimasukkannya aspek ekonomi dalam pendidikan dan atau administrasi pendidikan secara esensial tidaklah bermasalah, bahkan menguatkan aktivitas pendidikan dan administrasi pendidikan.

Masalahnya terletak pada pengendalian praktek penghitungan ekonomi yang dapat mengarah pada hal-hal yang melulu untung rugi, sampai-sampai menafikan nilai lain seperti kemanusiaan. Padahal pada filsafat ekonomi, nilai ekonomis tidaklah selalu untung rugi, nilai ekonomis dapat berarti terciptanya penemuan kebebasan manusia melalui pekerjaan yang bernilai ekonomis atau sosial. Pemikiran Sisimondi tentang ekonomi, misalnya, dapat mengubah pertimbangan ekonomi pendidikan. Bagi Sisimondi:

“... ekonomi selalu berangkat dari sebuah konteks persoalan yang dihadapi manusia dan masyarakat. Ekonomi bukanlah ilmu matematis melainkan suatu ilmu moral, suatu ilmu yang memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan manusia. Ilmu ini tidak cukup berbicara

mengenai angka, melainkan memfokuskan perhatiannya pada perasaan, kebutuhan, dan hasrat manusia.”

Prinsip ekonomi ini dapat menjadi pertimbangan bagi perumusan aspek ekonomi pendidikan, bahwa nilai ekonomi juga meliputi pemenuhan perasaan, kebutuhan, dan hasrat manusia. Pada titik ini teori pendidikan sebagai *human investasmen* tidaklah hanya dikuantifikasi menurut keuntungan ekonomi, melainkan juga dari sudut investasi sosial dan budaya.

5

Filsafat Manusia dan Administrasi

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang sebagai *proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan, dan kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.* Manajemen adalah fungsi dari administrasi, karena manajemen adalah alat pelaksana utama administrasi.

Manajemen berurusan dengan mengarahkan tujuan yang hendak dicapai orang per orang dalam sebuah organisasi. Manajemen dalam hal ini berurusan pengarahannya manusia untuk

mencapai tujuannya sesuai atau bersamaan dengan tujuan suatu organisasi. Manajemen dengan demikian berurusan dengan manusia, tujuan manusia, dan hakikat manusia. Perkembangan manajemen tergantung pada pandangan hidup seorang manajer terhadap “Apa itu manusia?” (ontologi manusia). Bila manusia dipandang sebagai benda yang bergerak bila digerakkan, maka proses manajemen dilakukan dengan proses pengaturan yang tidak manusiawi; demikian seterusnya. Pada titik ini manajemen berhubungan dengan filsafat, karena filsafat (khususnya Filsafat manusia) mencoba menemukan apa yang paling hakiki pada manusia: tujuan, kebahagiaan, masa depan, dan seterusnya.

Lebih jauh lagi filsafat telah menjadi dasar bagi pengembangan ilmu manajemen. Ada beberapa keuntungan utama filsafat ilmu manajemen bagi para manajer praktis, yaitu mendefinisikan tujuan, nilai dan isu, pendekatan dalam membuat problem solving yang logis, kebutuhan informasinya terfokus, menekankan konsistensi, dan menyediakan solusi yang tepat. Berikut ini dikemukakan tiga asumsi dasar filsafat ilmu manajemen: 1) Asumsi yang difokuskan pada tujuan: (organisasi merupakan entitas ekonomi, tercapai dengan hasil yang tinggi, maksud utamanya adalah produktivitas yang tinggi); 2) asumsi yang difokuskan pada pekerjaan (organisasi merupakan entitas teknis, menetapkan pada proses fisik dan keputusan, performa dapat dikuantifikasikan, diukur dan dievaluasi, keputusan dapat dimodelkan dan dioptimalkan); 3) asumsi yang difokuskan pada manusia (manusia bersifat rasional, manusia dimotivasi oleh insentif untuk memberikan *effort* yang maksimal).

Filsafat Manusia dan Ruang Lingkupnya

Filsafat manusia mengkaji hal-hal mendasar mengenai manusia. Pada Filsafat manusia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah esensi dan hakikat manusia itu bersifat material atau spiritual? Siapakah sesungguhnya manusia itu dan bagaimana kedudukannya di dalam semesta raya yang maha luas ini? Apakah arti, nilai, atau makna hidup manusia itu? Apa sebenarnya yang menjadi tujuan asasi dari hidup manusia? Apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia di dalam dunia yang serba tak menentu ini? Bagaimana sebaiknya manusia bersikap dan berperilaku, sehingga bukan saja tidak merugikan diri sendiri, tetapi juga tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitarnya?

Kajian tentang manusia adalah hal yang paling mendasar yang harus dilakukan pada ilmu-ilmu yang mengurus soal kemanusiaan seperti administrasi/manajemen. Sayangnya selama ini, hal ihwal manusia pernah dilupakan pada perkembangan ilmu humaniora, terutama ketika arah ilmu pengetahuan di bawah paradigma positivisme yang terlalu menjadikan aspek terukur sebagai nilai utama keberadaan manusia. Pengukuran terhadap manusia mengaburkan gambaran tentang manusia:

“Walaupun ilmu pengetahuan mencari pengertian dengan menerobos realitas sendiri, pengertian itu hanya dicari di tataran empiris dan eksperimental. Ilmu pengetahuan membatasi kegiatannya hanya pada fenomena-fenomena, yang entah langsung atau tidak langsung, dialami dari panca indera. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tidak menerobos kepada inti obyeknya yang sama sekali tersembunyi dari observasi. Maka ia tidak memberi

jawaban perihal kausalitas yang paling dalam” (Peter Koestanbaum, *Philosophy General Introduction*, 1968 h. 13)

Di samping itu para ilmuwan dianggap “memaksa” deskripsi manusia secara bongkar-pasang:

“Mereka (para ilmuwan) tidak ubahnya seperti seorang seniman yang menyambung-nyambungkan tangan, kaki, kepala, dan anggota-anggota tubuh lainnya menurut imajinasi mereka sendiri; tapi anggota-anggota tubuh tersebut disambung-sambungkan secara tidak pas, sehingga gasilnya lebih menyerupai monster ketimbang manusia” (Rollo May, 1961 *Existence A New Dimension in Psychiatry and Psychology*, h. 18)

Situasi “lebih mirip monster ketimbang manusia” inilah yang menjadi dasar bangunan ilmu sosial yang tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Filsafat manusia adalah gambaran menyeluruh tentang realitas manusia. Bahasan Filsafat manusia mencakup segenap aspek dan ekspresi manusia, dan lepas dari kontekstualitas ruang dan waktu. Dengan demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia berarti kita dibawa ke dalam suatu panorama yang sayang luas, dalam, dan kritis, yang menggambarkan esensi manusia. Panorama ini mempunyai manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis.

Secara praktis filsafat manusia bukan saja berguna untuk mengetahui apa dan siapa manusia secara menyeluruh, melainkan juga untuk mengetahui siapakan sesungguhnya diri kita dalam pemahaman tentang manusia yang menyeluruh itu. Pemahaman

yang demikian pada gilirannya akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan-keputusan praktis atau dalam menjalankan berbagai aktivitas hidup sehari-hari, dalam mengambil makna dan arti dari setiap peristiwa yang kita alami, dalam menentukan arah dan tujuan hidup kita yang selalu saja tidak gampang untuk ditentukan secara pasti. Sedangkan secara teoritis filsafat manusia mampu memberikan kepada kita pemahaman esensial tentang manusia, sehingga pada gilirannya, kita bisa meninjau secara kritis asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik teor-teori yang terdapat di dalam ilmu-ilmu tentang manusia.

Sebagai gambaran singkat mengenai pemikiran filsafat manusia dapat dikemukakan pemikiran Nietzsche dan Heidegger. Ungkapan Nietzsche yang terkenal adalah “Tuhan telah mati”, satu ungkapan yang belum selesai dan kerap diungkap dengan penuh salah pemahaman. Nietzsche bukanlah pembunuh Tuhan, ia hanya mengumumkan bahwa Tuhan telah mati, dan pembunuhnya adalah para agamawan (gereja) dan para saintis. Alasannya, Tuhan telah mati ketika agamawan mengkonstruksi manusia sebagai makhluk yang harus pasrah pada takdir tanpa gairah untuk memperjuangkan hidup. Padahal bagi Nietzsche, hidup adalah peperangan. Tuhan telah mati di tangan para saintis, ketika Tuhan dianggap sebagai salah satu kategori dalam analisa kausalitas belaka, ia ada dalam batas-batas pemikiran manusia; padahal Tuhan lebih dari itu. Karena itu Nietzsche berkata, “Aku hanya mau percaya pada Tuhan yang mengerti bagaimana menari!”.

Dari Nietzsche kita belajar mengenai apa itu manusia dan apa yang bisa dicapai secara sempurna oleh manusia dalam pemenuhan jati dirinya. Heidegger adalah seorang filsuf eksistensialisme-Jerman yang memengaruhi perkembangan

postmodernisme. Eksistensi menurut Heidegger adalah cara berada manusia secara khas. Cara berada manusia berbeda dengan cara beradanya alam (benda-benda, hewan, tumbuhan, dan alat). Dalam bahasa Jerman, ada bagi selain manusia adalah *seins* atau ada begitu saja. Sementara pada manusia ada berarti *dasein* atau “berada di sana”. Berada di sana berarti tidak tergeletak begitu saja, melainkan menempati suatu dunia dan bersama dengan manusia lain. Heidegger mengatakan bahwa “mengada sebagai pribadi” (*being person*) selalu berarti “mengada bersama yang lain” (*being with other person*) dan juga “mengada di suatu dunia” (*in-der-Welt-sein*).

Hanya saja, menurut Heidegger, ada cara yang keliru dalam kehidupan kita. Yaitu ketika manusia dianggap sama dengan benda-benda, yaitu sebagai *seins* saja. Ini bermula dari pendekatan sains (ilmu pengetahuan) yang menjebak manusia sebagai obyek pengetahuan. Menjadi obyek berarti sebagai benda mati, yang dapat diukur dan ditentukan masa depannya. Akibatnya cara berhubungan dengan manusia lain, tidaklah manusiawi. Manusia lain dianggap sebagai obyek, seperti benda-benda.

Mengada (<i>Seiend</i>)	Istilah Sehari-hari	Cara Mengada (<i>Seinart</i>)	Sikap Dasein Sehari-hari
Zuhandenes	Alat-alat	Untuk sesuatu (<i>Um-zu</i>)	Mengurus/ Menangani (<i>Besorgen</i>)
Vorhandenes	Benda-benda yang bukan alat	Tersedia begitu saja	Tanpa minat menangani
Mitdasein	Sesama manusia atau orang-orang lain	Ada-bersama (<i>Mitdasein</i>)	Merawat/ Memelihara (<i>Fusorge</i>)

Sumber F Budhi Hardiman, *Heidegger dan Mistik Keseharian*

Pada tabel ini, Heidegger menjelaskan bahwa ada tiga jenis penghuni dunia ini: alat-alat, benda yang bukan alat, dan sesama manusia. Alat-alat (seperti mesin teknologi atau ilmu) berfungsi “untuk sesuatu”, maka sikap manusia haruslah menggunakannya atau mengurusnya. Benda-benda selain alat (alam semesta), tersedia begitu saja, dan manusia tidak berminat mengurusinya atau menggunakannya. Sementara manusia lain itu ada bersama dengan kita, kita harus bersikap memelihara sesama manusia. Sayangnya, sains dan politik telah menjebak cara pandang kita. Sesama manusia kadang-kadang dipandang sebagai alat, ia digunakan demi kepentingan sesuatu; atau dianggap sebagai bukan apa-apa, muncul dalam sikap tidak peduli sama sekali.

Eksistensi atau *dasein* berarti menyadari sifat dasar sesama manusia sebagai yang harus dipelihara, karena melalui cara itulah manusia bisa mencapai kesempurnaannya. Ikhtiar manusia menanggapi kebersamaan selalu berarti mempertanggung jawabkan eksistensinya dalam kebersamaan yang sama. (*his ability to respond is at the same time his responsibility*) atau dalam ungkapan E. Brunner eksistensi manusia selalu berarti “*existence in-responsibility*”: kesempurnaan eksistensi terletak pada kebertanggungjawabannya.

Pada filsafat eksistensialisme, manusia tidak bisa dianggap sebagai obyek yang dapat diatur sebagaimana benda-benda. Manusia adalah makhluk yang sadar akan keberadaannya dan memberi makna pada ruang kehidupannya. Pada tabel di atas dikemukakan bahwa manusia tidak bisa diperlakukan seperti benda atau seperti alam, manusia harus dirawat dan atau dipelihara. Praktik administrasi dapat saja memperlakukan manusia sebagai sumber daya yang sama dengan aset organisasi,

melalui filsafat manusia akan diperoleh inspirasi bagi cara-cara perawatan hubungan antar manusia dalam organisasi.

Mengkaji Gagasan Mihaly Csikszentmihalyi

Mihaly Csikszentmihalyi mempunyai pemikiran menarik mengenai manajemen bisnis. Bagi Mihaly, bisnis harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, yaitu kebahagiaan. Ia meyakini bahwa “ pijakan dasar aktivitas manusia bukanlah keuntungan, melainkan apakah kita menikmati kerja dan merasa bahagia ketika melakukannya.” Karena itu tujuan utama kehidupan manusia adalah kebahagiaan. Walaupun manusia menginginkan hal-hal lain (uang, kekuasaan) sebenarnya itu karena kita yakin hal-hal ini akan memberikan kebahagiaan.

Manusia menurut Mihaly adalah makhluk yang kompleks, ia memiliki dorongan untuk mengaktualisasikan dirinya di tengah pluralitas masyarakat, di samping itu ia pun harus menjadi bagian dari masyarakat yang berbeda-beda itu. Kompleksitas dapat ditemukan pada diri manusia dan pada sejarah peradaban manusia. Kekompleksan ini salah satunya dicirikan dari sistem yang semakin *terintegrasi* dan *terdiferensiasi*.

Namun semakin kompleks sebuah sistem, semakin tinggi improbabilitasnya. Segala sesuatu semakin mungkin menjadi salah dan dibutuhkan semakin banyak upaya untuk menjaganya dari kerusakan. Peradaban atau sejarah kehidupan menunjukkan bahwa perkembangan manusia merupakan serangkaian ayunan pendulum yang bergerak bolak-balik antara agensi dan komuni; antara mencari keunikan (*diferensiasi*) dan perlunya menjadi

bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat (*integrasi*). Ini berlangsung dari masa bayi sampai masa dewasa. Bila kita terpasung pada salah satu titik ayunan pendulum itu, maka kita tak juga dewasa. Kedewasaan adalah tahap ketika seseorang telah menyempurnakan keunikan dirinya dan mampu mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya, sembari menikmati keragaman umat manusia, dan merasa bersatu dengan kosmos yang tak terbatas ini.

Sayangnya dunia kerja telah membuat manusia cenderung senang mengikuti peraturan yang pada akhirnya membunuh aspek keunikan dari diri manusia.. Konformitas semacam ini sangat diterima di banyak organisasi. Namun, dalam lingkungan kompetitif dan berubah sangat cepat, dibutuhkan lebih dari sekadar konformitas. Sebuah perusahaan seharusnya tidak memberi ruang bagi sikap konformitas. Perusahaan harus berusaha menjadi tempat yang mendorong setiap orang untuk berkembang semakin unik menuju kompleksitas –atau setidaknya menjadi tempat yang tidak menghambat pertumbuhan personal. Bisnis yang baik adalah bisnis yang diorientasikan tidak semata-mata untuk meraup untung, melainkan juga bertanggung jawab untuk menjadikan perusahaan sebagai mesin peningkatan kualitas hidup.

Organisasi pada tataran ini membunuh pertumbuhan manusia menjadi semakin dewasa, menjadi bertumbuh, dan semakin berbahagia. Terutama bila perusahaan atau organisasi itu sekadar menginginkan keuntungan finansial belaka. “Semua orang termasuk saya, sanggup senantiasa berubah dan bertumbuh. Itulah satu-satunya prinsip di seluruh alam semesta yang bertentangan dengan hukum kedua termodinamika –entropi—segala sesuatu

akan berakhir dalam kehancuran. Segala sesuatu akan bergerak ke bawah, membusuk, kecuali jiwa manusia yang memiliki kapasitas untuk berkembang dan berevolusi ke atas”, Ujar Jane Fonda –salah seorang CEO yang diwawancarai Mihaly. Pada titik ini Mihaly kemudian menyimpulkan bahwa bisnis yang tidak memberi andil bagi pertumbuhan dan kesejahteraan manusia tidak layak dijalankan. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang bisa diperolehnya dalam jangka pendek.

Berbisnis untuk Meraih Kebahagiaan

Apa yang sesungguhnya bisa mengantar manusia pada kebahagiaan? Uang mungkin. Tapi ada batas tertentu. Bila kita sangat miskin, memiliki lebih banyak uang membuat lebih bahagia. Di sisi lain, bila kita sudah sangat kaya, tambahan uang bisa jadi tidak akan memberikan kesenangan yang cukup berarti.

Hubungan antar manusia yang sangat kuat (seperti perkawinan yang langgeng, memiliki banyak teman) sangat terkait dengan kebahagiaan, demikian pula keterlibatan kita dalam komunitas religius. Watak terbuka (*ekstrovert*) dan optimistik bisa sangat membantu dalam meraih kebahagiaan. Begitu pula jika kita memiliki pekerjaan, khususnya pekerjaan yang kita sukai.

Begitu banyak yang membuat kita berbahagia. Mana di antara semua kebutuhan itu yang memberikan kebahagiaan, dan bagaimana hubungan antar semuanya itu?

Teori Abraham Maslow barangkali bisa menjawabnya. Maslow menyatakan bahwa ada beberapa tingkat kebutuhan manusia yang secara hierarkis menghasilkan kebutuhan. Ada

banyak orang miskin yang merasa bahagia dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yaitu kebutuhan yang menjamin kecukupan fisiologis (makanan, busana, dan rumah). Bagi mereka, terpuaskannya rasa lapar akan menimbulkan kebahagiaan. Namun bagi orang yang cukup beruntung dan tidak perlu mencemaskan kecukupan fisiologisnya, makanan yang cukup dan busana yang lebih hangat tidaklah begitu berarti.

Bahkan ada sebagian orang lagi yang memiliki banyak mobil dan rumah mewah merasa begitu hampa. Pada level ini, kita mulai lebih memerhatikan keamanan (menjaga apa yang kita punya, mencegah bahaya pada masa mendatang). Namun, ketika kebutuhan akan keamanan telah terpenuhi, akankah dengan sendirinya kita bahagia? Tidak juga. Malahan, perhatian kita akan mulai bergeser pada kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan menjadi bagian dari masyarakat (atau sesuatu yang lebih besar dari diri kita, seperti Tuhan). Kita kemudian mulai mencari barang atau jasa yang menjanjikan akan membuat kita makin dicintai (pakaian, kosmetik, minuman ringan yang dalam iklan digambarkan sebagai syarat bergabung dengan sekelompok model yang sedang populer). Atau, kita pergi ke pengajian, klub, atau organisasi lainnya yang membuat kita bersentuhan dengan tujuan-tujuan yang lebih tinggi.

Banyak orang merasa puas dan relatif bahagia sesudah mencapai level ini. Sedangkan bagi orang lain, bahkan cinta dan rasa memiliki pun hanya menawarkan kepuasan yang terbatas.

Gerbang berikutnya yang menjanjikan kebahagiaan adalah harga diri. Sejumlah orang mencari harga diri dalam profesi terhormat, tugas yang dikerjakan dengan baik, dan keluarga yang

harmonis. Sementara orang lain mencarinya melalui kekuasaan, ketenaran, kemasyhuran –atau setidaknya, dalam simbol-simbol seperti rumah di kawasan eksklusif, mobil mahal, gaya hidup yang seakan-akan mengkabarkan bahwa “Saya sudah sukses”.

Merasa puas dengan diri sendiri seungguh sebuah prestasi, tetapi apakah ini akhir dari pencarian? Apakah ini segalanya? Bagi sebagian orang jawabannya adalah “ya”.

Ada satu lagi sumber kebahagiaan, yaitu aktualisasi diri. Kita semua terlahir dengan dibekali sejumlah bakat yang kebanyakan tidak kita sadari. Aktualisasi diri sanggup mengungkapkan semua potensi yang melekat pada diri kita.

Urutan ini menghasilkan kesimpulan. Setelah sepenuhnya semua kebutuhan terpenuhi, kita tetap berusaha menggunakan potensi kita sepenuhnya. Ini membuat kita tidak hanya menjaga status quo, melainkan juga berinovasi dan bertumbuh kembang, seperti dikemukakan oleh penyair Dante Alighieri “...segala yang ada, ingin menjadi. Ketika kita berbuat, kita menguakkan keberadaan kita. Kenikmatan dengan sendirinya mengikuti, sebab setiap hal yang didambakan selalu membawa kegembiraan”.

Aktualisasi diri dan harga diri merupakan dua aspek kompleksitas manusia yang harus dipertimbangkan dalam manajemen suatu organisasi. Bila suatu perusahaan atau organisasi hanya mengorientasikan aktivitasnya untuk meraih keuntungan maka kemanusiaan akan semakin menghilang, pekerjaan pun akan tidak berkualitas. Mihaly menekankan bahwa bila suatu organisasi sanggup menciptakan iklim yang memberikan ruang pertumbuhan bagi karyawannya maka aktivitas perusahaan itu akan semakin baik yang berarti keuntungan karyawan itu pun

akan semakin naik juga.

Inilah prinsip dasar flow, mengalir bersama antara kebahagiaan diri dan keuntungan suatu organisasi. Kebahagiaan itu dapat mengalir bila dalam seluruh aktivitas kita dipenuhi oleh kebahagiaan.

Kebahagiaan di Dunia Kerja

Kebahagiaan tidak muncul begitu saja dalam diri kita, tidak juga disebabkan oleh benda-benda yang kita kumpulkan, atau dikirimkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kebahagiaan muncul manakala kita berusaha maksimal. Ketika kita berusaha maksimal kita mengalami kenikmatan (yakni sensasi menyenangkan lantaran kita merasa benar-benar hidup). Melalui usaha maksimal kita akan mencapai keseimbangan, kenyamanan, dan relaksasi.

Kenikmatan berbeda dengan kesenangan. Kesenangan terkait dengan dorongan nafsu. Mencari kesenangan tidaklah tercela. Namun, orang yang berpandangan bahwa kesenangan adalah alasan utama untuk hidup tidak akan berkembang melampaui keinginan-keinginan yang telah diprogram oleh gen-gen kita.

Kenikmatan bisa menyakitkan secara fisik dan membebani secara mental. Namun, karena ia mencakup upaya menaklukkan kekuatan-kekuatan entropi dan kehancuran, maka ia akan memperkaya jiwa. Kenikmatan adalah fondasi bagi memori, dan memori jika dikenang akan memperkaya hidup dan memberikan kepercayaan diri dalam menghadapi masa depan. Oleh karenanya, dalam kehidupan seorang individual kenikmatan

memberikan konsekuensi yang sangat berbeda dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh kesenangan.

Apa sesungguhnya makna dari menikmati sesuatu? Menikmati sesuatu adalah mengalami sensasi *flow*. Apa itu *flow*? Yaitu pengalaman “terhanyut kekuatan dari luar, mengalir dengan nyaman bersama arus energi, pada momen-momen kenikmatan tertinggi”. Berikut ini ilustrasi tentang *flow* pada kegiatan pemanjat tebing: “Pekerjaan yang harus saya tangani sedemikian menantang dan penuh kompleksitas dan pesona... kita gampang tenggelam dalam keadaan di sekelilingnya, dalam tebing, dalam pergerakan yang rumit... [dalam] keharusan mencari pegangan .. [dan] posisi tubuh yang tepat –[kita menjadi] sedemikian larut sehingga mungkin saja kita kehilangan kesadaran akan identitas diri sendiri dan lebur dengan gunung batu itu”, ungkap seorang pemanjat tebing.

Ilustrasi ini melukiskan bahwa “tugas yang dijalankan seseorang membuat ia menikmati kompleksitasnya sampai pada tingkat sangat larut di dalamnya. Pikiran dan tindakan, diri dan lingkungan, terasa tak terpisahkan. Yang penting hanyalah melakukan setiap langkah sesempurna mungkin, karena nyawa dipertaruhkan”. Hal yang sama dapat ditemukan pada aktivitas seorang ibu yang sedang mengurus bayi: “Tatkala saya tengah bekerja dengan anak saya, ketika ia menemukan sesuatu yang baru. Melihat ia mencoba resep kue baru, yang merupakan buatannya sendiri –sebuah karya artistik yang ia banggakan. Membaca adalah kegiatan yang amat ia nikmati, dan kami membaca bersama. Ia membaca untuk saya, dan saya membaca untuknya, dan itulah saat ketika saya mulai terpisah dari dunia luar. Saya sepenuhnya terserap ke dalam aktivitas saya”.

Lalu apa hubungannya dengan bisnis?

Secara prinsip dapat dikatakan bahwa *flow* merupakan sebuah keniscayaan dalam setiap aktivitas. Sebab jika orang tidak menikmati pekerjaannya, ia tak bisa bekerja dengan baik”. Seperti yang dikatakan Orit Gadiesh, CEO Bain & Co. (Sebagaimana dikutip Mihaly): “Menikmati pekerjaan Anda itu penting. Anda tak bisa bilang, ‘Oke, saya akan bekerja selama waktu kerja saya, dan setelah itu bersenang-senang”. Sementara itu CEO lain, Norman Aufustine, menyatakan, “Anda akan bahagia... jika Anda melaksanakan dengan baik pekerjaan Anda hari ini dan Anda menikmatinya. Biarlah masa depan datang dengan sendirinya... Anda harus mengetahui arah yang ingin Anda tuju, tetapi saya pikir Anda harus ikut mengalir bersama kedatangan berbagai peluang” .

Pekerjaan dapat memberikan kebahagiaan bila, di antaranya, produk yang dihasilkan akan menyebabkan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Sebuah produk atau jasa yang bernilai adalah sesuatu yang dianggap para pembeli bisa menjadi mereka lebih berbahagia. Peluang bisnis diperoleh dengan jalan menemukan cara-cara baru merespons kebutuhan ini. Kemajuan teknologi yang paling canggih sekalipun tidak punya banyak arti hingga betul-betul bisa dibuktikan memberikan andil pada kebahagiaan. Sebuah bisnis bisa dikatakan sukses manakala ia ikut menyediakan produk atau jasa yang memberi andil bagi kebahagiaan dalam segala bentuknya.

Umpamanya, pesawat telepon dapat membahagiakan ketika ia ikut menjamin kelangsungan hidup, memberikan keselamatan dan keamanan, memberi rasa memiliki bagi

pemilikinya. Rasa yang meningkatkan harga diri dan bahkan memberikan rasa aktualisasi diri dengan memberikan peluang bagi pemiliknya untuk ikut menentukan selera estetik unik dan gaya hidupnya.

Nilai pasar suatu produk atau jasa pada akhirnya bergantung pada kebahagiaan yang diharapkan akan diberikan produk tersebut. Bisnis yang baik tidak sekadar ditujukan untuk meningkatkan keuntungan. Sebaliknya, bisnis yang baik adalah transaksi yang memberikan kontribusi signifikan pada kebahagiaan manusia.

Faktor Penghambat Flow dalam Dunia Kerja

Tujuan manajemen adalah menciptakan nilai melalui kerja manusia yang bekerja sama demi satu tujuan. Cara terbaik mengelola manusia adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang membuat para karyawan bersungguh-sungguh menikmati kerja mereka dan berkembang dalam proses itu.

Seorang manajer yang hendak membangun sebuah perusahaan yang baik, tempat orang termotivasi untuk memberi andil dan betah di dalamnya, punya tiga pilihan. *Pertama*, membuat kondisi obyektif tempat kerja semenarik mungkin. *Kedua*, menemukan cara untuk memberikan makna dan nilai pada pekerjaan. *Ketiga*, dengan memilih dan menghargai orang-orang yang menemukan kepuasan di dalam pekerjaan mereka.

Ada beberapa alasan mengapa flow jarang terjadi dalam kerja. *Pertama*, *Sedikit pekerjaan pada masa kini yang punya tujuan yang jelas*. Ada banyak perusahaan yang memiliki tujuan yang

tidak menjadi tujuan pekerjaanya sendiri. Seringkali meskipun ada karyawan yang memahami *apa* pekerjaannya mereka tidak memahami mengapa mereka mengerjakannya. Tanpa tujuan yang jelas, cepat atau lambat, kita tak akan bisa menikmati pekerjaan.

Kedua, Pekerjaan-pekerjaan kontemporer jarang memberikan umpan balik. Pekerjaan modern memisahkan pekerja dari hasil apa yang dikerjakannya. Di masa lalu seorang perajin sanggup melihat barang garapannya berproses sampai menjadi bentuk akhir. Karya adalah hasil dari ekspresi, dan setiap bagian proses menciptakan karya memberikan umpan balik kreatif. Saat ini tidaklah demikian. Pekerja melakukan sesuatu, kadang-kadang demi rancangan orang lain. Jadi ia tidak tahu mau kemana dan bagaimana hasil akhirnya. Pada situasi ini sulit kiranya kita bisa larut dalam sebuah aktivitas bila performa seseorang hanyalah sebuah faktor kecil, dan bila ia bekerja dengan baik hampir tidak ada pengakuan, dan bahkan ia tidak bisa mengetahui apakah pekerjaannya telah terselesaikan dengan baik. Ketidadaan umpan balik ini dapat diatasi dengan komunikasi yang baik. Banyak persoalan yang muncul dalam bisnis bukan lantaran leader tidak memiliki nilai-nilai yang tepat, melainkan karena leader tidak efektif dalam mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut ke seluruh segmen perusahaan”.

Ketiga, Keterampilan pekerja tidak seimbang dengan peluang untuk bertindak. Sebuah pekerjaan yang hanya mempergunakan sebagian keterampilan seseorang akan segera terasa menjadi sebuah beban. Orang merasa bahwa sebagian besar potensinya dibiarkan tak terpakai. Ketika kebanyakan kemampuan kita tak termanfaatkan, keterlibatan dalam pekerjaan segera mengendur, dan tidaklah mengherankan jika kemudian orang

mulai mendambakan waktu luang sehingga ada peluang untuk menikmati hidup.

Keempat, Tidak adanya kontrol dari diri pekerja. Kontrol yang diberikan pihak lain, atau seorang pekerja yang dikontrol sampai hal yang sekecil-kecilnya akan segera kehilangan minat terhadap pekerjaannya. Dalam kondisi di bawah pengawasan ini paling banter kita hanya mau memberikan apa yang diwajibkan atas diri kita. Kebutuhan akan kontrol harus diseimbangkan dengan kebutuhan akan otonomi yang diperlukan oleh orang yang paling rendah sekalipun.

Kelima, penggunaan waktu ditentukan oleh ritme yang datang dari luar diri para pekerja. Pada saat itu, pekerja merasa digerakkan sehingga seluruh potensi dan semangat dari dalam dirinya tidak teraktualkan secara baik. Begitu ia merasa tertekan, ia akan merasa pekerjaannya sebagai sesuatu yang tidak berharga. Penyebab lain dari situasi ini adalah pekerja tidak menganggap penting pekerjaan yang dilakukannya, padahal menurut pepatah Abad Pertengahan, “*mengupas kentang sama pentingnya dengan membangun rumah ibadah, jika dikerjakan demi keagungan Tuhan*”.

Keenam, perusahaan tidak menciptakan iklim yang membuat karyawannya mendapatkan makna dan nilai dari pekerjaannya. Jika sebuah perusahaan ingin menjaga kesetiaan pekerja, perusahaan itu harus berusaha sebaik mungkin menyediakan lingkungan kerja yang membuat mereka merasa mendapatkan makna dan nilai dari kerja mereka. Ada beberapa hal merintanginya kita sehingga tak bisa mendapatkan makna dari pekerjaan: 1) *Budaya konsumen telah merendahkan nilai kerja.*

Budaya konsumen mengagungkan kesantaian, kenyamanan materiil dan kesenangan . Budaya ini dilawankan dengan kerja, bahwa kerja adalah sesuatu yang tidak santai, tidak nyaman, dan tidak menyenangkan. 2) *beberapa pekerjaan memang hampa nilai dan hampa makna; dan 3) bila manajemen tidak menghargai pekerja dan memandangnya sebagai individu yang unik, tetapi hanya sebagai alat yang bisa dibuang ketika tidak lagi dibutuhkan, maka karyawan pun akan memandang perusahaan tidak lebih dari sekadar mesin penghasil gaji, tanpa nilai atau makna selain itu*

Mengembangkan Organisasi Bahagia

Sesungguhnya rahasia dalam organisasi adalah tidak ada yang bekerja sendirian. Karena itu yang harus dilakukan adalah bahwa pimpinan harus menciptakan suatu atmosfer yang mendorong orang ingin memberikan yang terbaik. Iklim itulah yang akan mengkondisikan semua orang untuk melakukan yang terbaik, karena pada hakikatnya tak ada seorang pun yang dapat menyuruh siapapun untuk melakukan yang terbaik. Tak ada seorang pun yang bisa menyuruh Beethoven mengubah Simfoni Kesembilan, Beethoven memang ingin melakukannya. Begitulah kepala perusahaan: ia memberi peluang, bukannya menjadi pelaksana.

Hal yang menghalangi perusahaan dalam mengembangkan flow, adalah lingkungan. Kemudian perilaku orang-orangnya. Bila suatu tempat kerja hanya memberikan sedikit peluang *flow* (penuh senyaman dan humor), para pekerjanya cenderung cemberut, terlihat lesu dan letih. Mike Murray dari Microsoft melukiskan tiga “hal umum yang menentukan sukses suatu tim.” pertama, jika

manajer memastikan setiap anggota tim punya tujuan yang jelas yang menunjukkan apa yang harus dikerjakan sehubungan dengan kebutuhan perusahaan... kedua, jika manajer kompeten dalam merencanakan semua aktivitas bertahap yang harus dikerjakan, maka pekerjaan akan terbagi secara merata ke seluruh tim.. dan ketiga, jika manajer terampil dalam memelihara komunikasi dan umpan balik.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tujuan perusahaan tidak dapat diserap. *Pertama*, mungkin misi perusahaan (atau misi tim atau misi setiap pekerja) tidak jelas bagi siapapun. Maka yang dibutuhkan adalah komunikasi berbasis kepercayaan. Kalau bawahan tidak bisa memercayai komitmen pemimpin terhadap visi dan nilai-nilai perusahaan, dan jika pemimpin tidak lagi memercayai kesetiaan bawahannya, perusahaan tersebut akan segera hancur. Dibutuhkan nilai yang menjadi landasan kepercayaan semua pihak. Jadi yang dibutuhkan tidak hanya rencana bisnis yang baik, melainkan juga seperangkat nilai-nilai inti yang terungkap dalam perilaku pimpinan melalui pernyataan tertulis dan komunikasi verbal”. Anita Roddick menegaskan, “Saya pikir komunikasi adalah salah satu keterampilan esensial dalam kepemimpinan. Sebab, seberapa pun bersemangatnya Anda terhadap suatu hal, jika Anda tidak mampu mengkomunikasikannya dengan cara yang jelas atau menyenangkan, dan jika anda tidak punya semangat yang kuat –yang merupakan bentuk komunikasi persuasif—anda mungkin tidak akan berhasil.

Kedua, jajaran manajer tidak punya pemahaman yang jelas akan misi perusahaan. *Ketiga*, bawahan tidak punya pemahaman yang jelas akan misi perusahaan. Kita sering menganggap bahwa kerana kita memahami sebuah situasi, maka orang lain pastilah juga

memahaminya. Satu-satunya cara menangannya adalah membuat upaya yang lebih sistematis untuk menjaga saluran komunikasi tetap terbuka. Cara paling efektif untuk melakukannya adalah menyisihkan waktu guna bercakap-cakap dengan setiap anggota perusahaan. Pada kesempatan itu mereka bisa ditangani apa yang mereka anggap sebagai tujuan utama kerja merek

Refleksi:

Dibutuhkan Administrasi yang Lebih Manusiawi

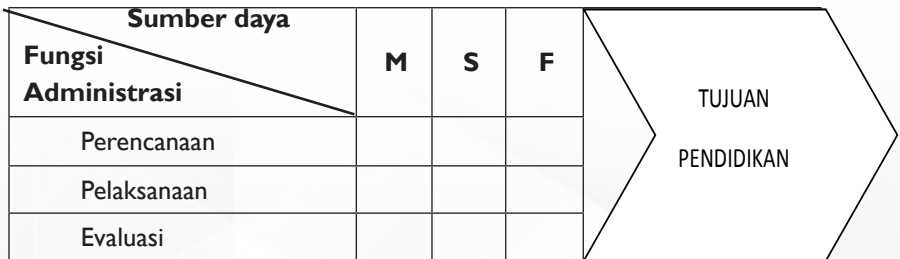
Belajar dari Mihaly kita menemukan konstruksi ideal bagi organisasi pendidikan, yaitu organisasi yang *flow*. Organisasi yang *flow*, adalah organisasi yang memberikan pengalaman terhanyut kekuatan dari luar, mengalir dengan nyaman bersama arus energi, pada momen-momen kenikmatan tertinggi”. Mengajar dapat menyediakan pengalaman *flow* jika para guru dan siswa merasa senang terhadap seluruh aktivitasnya. Guru akan merasakan kebahagiaan pada saat mengajar bila ia sadar bahwa pekerjaannya dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat luas, kesedaran itu kemudian diwujudkan dalam proses yang juga membahagiakan siswanya.

Semua itu membutuhkan proses administrasi yang berusaha memberikan pengalaman *flow*. Administrai yang tidak sekedar mendorong semua karyawannya untuk mencapai sukses tanpa mempedulikan aspek kebahagiaan kemanusiaan, atau administrasi yang memamndang karyawannya sebagai alat belaka. Administrasi *flow* adalah administrasi untuk kebahagiaan manusia.

6

Filsafat Pendidikan dan Filsafat Administrasi Pendidikan

Mari kita merumuskan hubungan antara Filsafat Pendidikan dan Filsafat Administrasi Pendidikan. Kita mulai dari definisi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan Sumber daya manusia, sumber daya belajar, dan fasilitas untuk tujuan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati (Engkoswara, 1987: 42). Penataan itu di antaranya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; bagan berikut dapat menggambarkan definisi ini:



Keterangan:

M : Manusia,

S : Sumber daya (kurikulum, metode, prosedur);

F : Fasilitas (Prasarana, Sarana, Finansial)

Pada bagan di atas terlihat bahwa administrasi pendidikan pada satu sisi memiliki kesamaan dengan rumusan administrasi yang lain, yakni menjalankan fungsi administrasi (seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) dengan perbedaan pada jenis Sumber daya dan tujuan dari fungsi tersebut. Sumber daya yang dikelola administrasi pendidikan meliputi manusia (siswa, orang tua siswa, guru, stakeholders), sumber daya pembelajaran (kurikulum, metode, dan prosedur), dan fasilitas (prasarana, sarana, dan finansial). Pengelolaan semua sumber daya itu tergantung pada tujuan yang dimiliki oleh tujuan pendidikan. Pada tingkat praktis tujuan itu dapat ditemukan pada rumusan visi-misi lembaga pendidikan, namun pada tingkat teoritis tujuan pendidikan ditentukan dari filsafat pendidikan yang dianut oleh suatu sistem pendidikan.

Walaupun demikian, tujuan administrasi sendiri tetap menjadi bagian yang diacu. Tujuan pengelolaan seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, atau greatness juga menjadi dasar

pengelolaan pendidikan --bahkan dapat juga bersimbiosis dengan tujuan pendidikan. Misalnya **Efektivitas** dan efisiensi pada dunia pendidikan mendapatkan rumusan yang berbeda dengan dunia bisnis. Efektivitas dalam dunia pendidikan dapat dilihat pada (1) masukan yang merata, (2) keluaran yang banyak dan bermutu tinggi; (3) ilmu dan keluaran yang terkait dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun; (4) pendapatan tamatan yang memadai. **Efisiensi** dapat dilihat pada: (1) kegairahan dan motivasi belajar tinggi; (2) semangat kerja yang benar; (3) kepercayaan berbagai pihak dan pembiayaan, waktu dan tenaga sekecil mungkin namun dengan hasil yang besar. Dua tujuan dasar administrasi ini, efektivitas dan efisiensi, pada gilirannya akan memengaruhi arah tujuan pendidikan murni (sebagaimana dirumuskan dalam filsafat pendidikan).

Pada titik ini, administrasi pendidikan merupakan gabungan antara fungsi administrasi pada sumber daya sekolah berdasar pada filsafat pendidikan tertentu. Ini juga dapat berarti bahwa filsafat administrasi pendidikan merupakan gabungan atau sintesis antara filsafat administrasi dalam perspektif filsafat pendidikan.

Filsafat pendidikan merupakan salah satu jenis Filsafat khusus, yaitu filsafat yang menjadikan salah satu aspek kehidupan manusia sebagai obyek kajiannya. Tegasnya, Filsafat Pendidikan adalah bidang filsafat yang menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkutan dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan, yang bersangkutan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya (B. Othanel Smith, *Philosophy of Education, encyclopedia of Educational Research*, dari Redja Mudyahardjo, 2001:5).

Berikut ini dikemukakan sejumlah gagasan mengenai mazhab filsafat pendidikan sebagaimana dikemukakan **William O'Neil** dan **Theodore Brameld**. Kedua kategori pembagian filsafat pendidikan ini terutama untuk memberikan khazanah mengenai ragam tujuan pendidikan dari perspektif filsafat.

Mazhab Filsafat Pendidikan Menurut Theodore Brameld

Filsafat pendidikan mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya saling berlainan. Misalnya, mengutip gagasan Theodore Brameld dalam *Philosophies of Education in Cultural Perspective* (1955) dan *Toward a Reconstruction philosophy of Education* (1956) ada empat filsafat pendidikan yang mendasar: *perennialisme*, *esensialisme*, *progresifisme*, dan *rekonstruksionisme*. Berikut ini akan dikemukakan batasan dari keempat filsafat pendidikan itu dan perannya dalam pengelolaan pendidikan.

Perennialisme pada dasarnya adalah sudut pandang yang menganggap bahwa pendidikan dapat mencapai kepemilikan atas prinsip-prinsip akan kenyataan, kebenaran, dan nilai, yang abadi, tak terikat waktu, tak terikat ruang. Perennialisme berakar pada tradisi filosofi yang bisa dilacak dari filsuf Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Perennial berarti yang tak bisa berubah dan bersifat universal yang melatari dan menentukan seluruh obyek serta peristiwa yang ada dalam kenyataan. Cara pandang budaya dalam perennialisme bersifat “mundur”; pandangan ini memulihkan tolok ukur-tolok ukur mutlak yang mengatur dunia-zaman kuno dan zaman pertengahan.

Perennialisme dikenal juga dengan nama filsafat perennial atau "*Philosophia Perennis*". Aliran filsafat ini termasuk pendukung kuat dari filsafat essentialisme, yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan lama karena dianggap telah memberikan kebaikan-kebaikan bagi umat manusia. Yang dimaksud dengan kebudayaan lama di sini adalah kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia pertama-tama dahulu. Akan tetapi yang paling mereka pedomani adalah peradaban semenjak zaman Renaissance, yang tumbuh dan berkembang di sekitar abad 11 sampai dengan abad 14 Masehi.

Meskipun perennialisme lebih dekat pada essentialisme dan menentang progresivisme, namun perennialisme juga tidak puas dengan essentialisme, dan inti perbedaan itu ialah prinsip yang dipegang oleh perennialis yang religius (*theologies*) yang agama oriented sebagai "lawan" dari mereka yang *secular-oriented*.

Dengan pandangan filosofis semacam itu, tak mengherankan jika aliran filsafat ini dianggap sebagai "*regressive road to culture*" yakni jalan kembali, atau mundur kepada kebudayaan masa lampau. Perennialisme menghadapi kenyataan dalam kebudayaan manusia sekarang sebagai suatu krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Untuk menghadapi krisis itu, perennialisme memberikan pemecahan dengan jalan "kembali kepada kebudayaan masa lampau," kebudayaan yang dianggap ideal yang telah teruji dan tangguh.

Prinsip utama motivasi yang mendorong perennialisme kembali ke masa silam itu, bukanlah suatu sikap nostalgia, sikap mengenang nilai-nilai lampau yang agung dan sukses sekedar untuk dipuja. Melainkan untuk membina kembali kepercayaan

yang teguh kepada nilai-nilai asasi abad pertengahan yang praktis dan vital bagi abad kedupuluh, sebagaimana nilai-nilai itu pernah hidup dalam pikiran dan tindakan manusia pada abad tersebut.

Esensialisme, berpegang pada pernyataan bahwa “alam semesta beserta segala unsurnya diatur oleh hukum yang mencakup semuanya serta tatanan yang sudah mapan sebelumnya, karena itu tugas utama manusia adalah untuk memahami hukum dan tatanan ini hingga ia bisa menghargai dan menyesuaikan diri dengannya”. Bagi seorang esensialis, sasaran utama sekolah adalah untuk mengenakan siswa kepada karakter dasar alam semesta-alam semesta yang tertata itu, dengan cara mengenalkan mereka pada warisan budaya. Secara filosofis, esensialisme dilandaskan prinsip-prinsip klasik dari realisme dan idealisme modern.

Bagi mazhab ini, pendidikan merupakan wahana konservasi (pemeliharaan) budaya. Dengan dalil ini maka Essensialisme dianggap para ahli sebagai “Conservative road to culture,” yakni aliran ini ingin mengembalikan kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah terbukti kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan manusia. Ia percaya bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang pernah ada sejak peradaban manusia lahir. Kesalahan kebudayaan modern menurut aliran ini adalah penyimpangan dari jalan lurus yang pernah ditanamkan. Fenomena sosiokultural hanya dapat diatasi dengan kembali secara sadar melalui pendidikan.

Essensialisme merupakan paduan ide-ide filsafat idealisme dan realisme dengan demikian filsafat pendidikannya lebih kaya dibanding yang lain. Pola Dasar pendidikan Essensialisme adalah: Essensialisme percaya bahwa diperlukan modifikasi bahkan

penyimpangan dari ajaran-ajaran filosofis dasar, tetapi praktiknya memerlukan adaptasi dengan kondisi tertentu.

Dengan demikian asas-asas filosofis essentialisme tidak harus selalu diikuti dengan pola-pola asasi atau pola dasar pendidikannya yang terperinci.

Pola dasar pendidikan essentialisme hanyalah berhubungan dengan teori dasar pendidikan.

Progresifisme, tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis agar siswa lebih efektif dalam memecahkan pelbagai problema yang disajikan dalam konteks pengalaman pada umumnya. Secara karakteristik, progresifitas pendidikan yang “bersifat duniawi, menjelajah, aktif, evolusioner” ini terutama berorientasi pada “sebuah tafsiran tentang cara hidup liberal dalam budaya Amerika”. Secara filosofis progresivisme ditopang oleh filosofi pragmatisme, ia tidak memberikan jawaban-jawaban terakhir yang pasti dan ia mengabsahkan kesimpulan-kesimpulannya melalui konsekuensi-konsekuensi perilaku.

Progressivisme berkembang dalam permulaan abad ke 20 terutama di Amerika serikat. Aliran ini lahir sebagai pembaharuan dalam dunia filsafat pendidikan terutama sebagai lawan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan konvensional yang diwarisi dari abad ke-19. Inti dari mazhab ini adalah sepertitergambar dalam kata ‘progressive’ itu sendiri, yakni berkembang dan maju. Dalam hal ini Brubacher dalam *History of the Problem of Education* (1947) menyatakan bahwa:

“Progresif (berkembang maju) adalah sifat lamiah, kodrati; dan itu berarti perubahan. Dan perubahan berarti sesuatu

yag baru. Sesuatu yang baru sungguh-sungguh merupakan keadaan yang nyata dan bukan sekedar pengetahuan atas realitas yang sebelumnya memang sudah demikian.”

Perlu dikemukakan di sini bahwa sifat progresif itu tidak radikal, dengan demikian adanya perubahan yang progresif ini akan sukar difahami. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana seseorang dapat mengerti bahwa suatu perubahan itu dikategorikan progresif? Progres atau kemajuan itu di atas segala makna apa pun, terutama mengandung pengertian nilai. Dari sudut pragmatis, nilai-nilai itu selalu bersifat instrumental. Suatu kemajuan baru dianggap progresivitas jika ia membawa kita pada suatu tujuan. Mengenai nilai dari tujuan yang dibawa sebuah perubahan progresif, kalangan progresivis menyatakan bahwa nilai sesuatu (tujuan) itu terkandung di dalam sifatnya yang menjadi alat untuk tujuan yang lain.

Pandangan progresivisme dianggap sebagai “the liberal road to culture”, liberal di sini diartikan sebagai fleksibel, berani, toleran, dan bersikap terbuka. Di sisi lain liberal sering diartikan bahwa pribadi-pribadi penganutnya selalu bersifat penjelajah, peneliti secara continue demi pengembangan pengalaman, memiliki kemauan baik untuk mendengarkan kritik dari lawannya sambil memberi kesempatan kepada mereka untuk membuktikan kebenaran ide mereka.

Progresivisme menganggap pendidikan sebagai *cultural transition*. Ini berarti pendidikan dianggap mampu mengubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia dari tantangan masa depan yang lebih kompleks. Pendidikan adalah lembaga yang mampu membina manusia

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan cultural dan tantangan-tantangan zaman, demi *survive*-nya manusia. Progresivisme juga percaya bahwa pendidikan mampu menolong manusia dalam menghadapi periode transisi antara zaman tradisional yang segera berakhir, untuk siap memasuki zaman progresif (modern).

Progresivisme memiliki cirri utama yakni mempercayai manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dan lingkungan hidupnya yang multikompleks dengan skill dan kekuatan sendiri. Dan dengan kemampuan itu manusia bisa memecahkan semua masalahnya secara intelegen, dengan intelegensi aktif.

Progresivisme sebagai ajaran filsafat mempunyai watak yang dapat digolongkan sebagai berikut: (1) **negative and diagnostic**, bersikap anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk baik yang kuno maupun modern. (2) **positive and remedial**, yakni pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi-potensi alamiah, terutama terutamakekuatan self-regenerative (regenerasi-diri) untuk menghadapi dan mengatasi semua problem hidupnya.

Seringkali progresivisme disebut dengan nama-nama yang berlainan, seperti: pragmatisme, instrumentalisme, eksperimentalisme, dan environmentalisme. Masing-masing sebutan itu mewakili ide asasi yang menjadi wataknya. Disebut progresivisme karena mazhab ini mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivitas dalam semua realita, terutama dalam diri manusia sebagai subjek. Disebut pragmatisme

karena asas utama dalam kehidupan manusia adalah untuk tetap survive terhadap semua tantangan hidup manusia, Dikatakan instrumentalisme karena mazhab ini menganggap bahwa potensi intelegensi manusia sebagai kekautan utama manusia haruslah dianggap sebagai alat (instrument) untuk menghadapi semua tantangan dan problem kehidupannya. Intelegensi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Mazhab ini sering pula disebut mazhab eksperimentalisme karena menyadari dan mempraktikkan bahwa asas eksperimen (pengujian ilmiah) merupakan alat utama untuk menguji kebenaran suatu teori. Eksperimen-eksperimen itu pula yang memberi pengalaman nyata kepada subjek untuk untuk mengerti suatu teori suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan yang terakhir disebut environmentalisme sebab mazhab ini menganggap bahwa lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Lingkungan hidup dengan tantantagn-tantangan di dalamnya mendorong manusia untuk berjuang, berkembang demi hidupnya. Lingkungan adalah medan tempat berlangsungnya proses interaksi; jadi mempengaruhi manusia.

Rekonstruksionisme, berpandangan bahwa sekolah semestinya “diabdikan kepada pencapaian tatanan demokratis yang mendunia”. Secara filosofis, seorang rekonstruksionis yakin bahwa teori pada puncaknya tak terpisahkan dari latarbelakang sosial dalam suatu era kesejarahan tertentu. Pikiran, dengan begitu, adalah suatu produk dari kehidupan di sebuah masyarakat tertentu di suatu waktu.

Pada dasarnya, rekonstruksioniosme sepakat dengan perennialisme yang menyatakan bahwa ada satu kebutuhan

amat mendesak untuk kejelasan dan kepastian bagi kebudayaan zaman modern yang tengah mengalami kehancuran. Akan tetapi rekonstruksionisme tidak sependapat dalam hal harus kembali ke kebudayaan masa lalu sebagai solusinya. Rekonstruksionisme lebih memilih untuk berusaha membangun consensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, rekonstruksionisme dapat didefinisikan sebagai aliran yang berusaha mencari kesepakatan tentang tujuan utama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia secara baru melalui lembaga dan proses pendidikan. Dalam pandangan mazhab ini.

Untuk mendapatkan kesepakatan tersebut, para rekonstruksionis berpendapat bahwa hal itu hanya mungkin diraih melalui kerjasama-kerjasama antarbangsa. Hal demikian itu dikemukakan karena mereka yakin telah ada kesadaran yang sama atas realita kemodernan di seluruh bangsa di dunia.

Pembagian Mazhab Pendidikan Menurut William O'Neil

Sementara itu ada juga pembagian mazhab filsafat pendidikan yang lain, yaitu: (1) Fundamentalisme, (2) Intelektualisme, (3) Liberalisme, (4) Liberasionisme, (5) Anarkisme. (William F. O'Neil, 2001).

Fundamentalisme menganggap bahwa kehidupan yang baik bersumber pada kepatuhan terhadap pembagai tolok ukur keyakinan dan perilaku yang sifatnya (diserap secara spontan

dan langsung, tidak perlu bukti, tidak butuh penunjang) dan/ atau diwahyukan, umumnya mengikuti jalur penalaran yang bisa diringkas menjadi lima titik: (a) ada jawaban otoritatif bagi seluruh persoalan pokok manusia; (b) jawaban-jawaban itu bersumber dari wahyu yang didukung oleh iman, atau kebijaksanaan rakyat yang dimiliki orang kebanyakan, (c) jawaban-jawaban itu sederhana dan langsung ke pokok persoalan, tidak memuat makna-makna mendua, langsung bisa dimengerti tanpa keterampiolan atau pengetahuan khusus; (d) spekulasi filosofis bukan saja dianggap tidak perlu tapi malah berbahaya buat “kesehatan” masyarakat; (e) jawaban-jawaban intuisi atau iman dianggap sudah cukup.

Intelektualisme merupakan mazhab yang menyamakan kebaikan tertinggi dengan ‘pencerahan’, penyempurnaan nalar. Nalar yang benar, dalam mazhab ini, akan menuju kesimpulan yang benar pula dalam perjalanan mencari kebenaran. Kaum intelektualis tidak puas menyaksikan kondisi kehidupan manusia saat ini. Kondisi ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena itu harus diperbaiki agar sesuai dengan cita-cita tertinggi dan ideal keruhanian puncak. Kebenaran dianggap tidak musnah, mutlak, tidak tergantung ruang dan waktu, serta universal dan dibutuhkan umat manusia. Kebaikan ini dapat diraih melalui nalar. Sambil merenungkan nasib dunia masa kini, para intelektualis, menoleh ke masa lalu, menekankan stabilitas gagasan-gagasan besar, dan condong menangkal perubahan. Manusia adalah makhluk berakal budi yang memiliki daya bawaan untuk menalar, jagat yang rasional ini bisa ditangkap dan dipahami bila nalar itu sudah tajam terasah lewat pendidikan.

Konservatif, individu adalah bawahan sistem sosial (yang lebih besar, yang dianggap lebih pasti dan lebih dapat dipercaya

daripada proses-proses penalaran individual). Perubahan sosial, bagi mazhab ini, boleh-boleh saja tapi harus bersifat membangun, yang terjemahannya adalah “tetap menghormati hukum dan tatanan yang berlaku”.

Liberalisme dalam pendidikan biasanya dikaitkan dengan John Dewey (1859-1952). Cara berpikirnya adalah mengedepankan penyelidikan proses pemecahan masalah secara ilmiah, mengedepankan penyelidikan tertentu yang bisa memberi hasil pengetahuan obyektif (yang lebih efektif dan lebih bisa dipercaya). Semua upaya adalah demi menuntaskan masalah-masalah praktis dan bukan membuai keabstrakan. Guru liberal bercita-cita memelihara dan memperbaiki tatanan sosial yang sudah ada. Caranya, murid diajar mengatasi masalah-masalah kehidupannya sendiri seefektif mungkin dengan alat-alat yang ia dapatkan dari sekolah. “mengatasi masalah kehidupan” di sini mencakup proses belajar secara mandiri. Kaum liberal mengutamakan individu dari tuntutan masyarakat.

Liberasionisme dipertik dari kata *liberasi* artinya pembebasan, lebih tepatnya “pembebasan sosial”. Bagi kaum liberasionisme, pendidikan adalah penanaman hasrat untuk membangun kembali masyarakat menurut jalur-jalur kemanusiaan yang menekankan pengembangan potensi tiap individu setinggi-tingginya. Ini hanya bisa dilakukan dalam kerangka kerja sistem sosial yang terikat dengan pemaksimalan kebebasan individu selaras dengan proses demokratis yang stabil dan ‘hidup’. Dari masa ke masa sekolah mesti mengajar murid untuk mengenali dan menanggapi kebutuhan akan reformasi. Yang dipentingkan kaum liberasionis adalah yang sosial, bukan yang individual. Mereka yakin bahwa kaum liberalis keliru bila menceraikan yang sosial dengan

yang psikologis. Tiap pengalaman pribadi selalu berlangsung lewat kerangka kerja budaya tertentu. Pelajar adalah pelaku sosial, ia selalu bergerak melalui jiwa sosial (tindakan-tindakan yang disadari serangkaian kekangan budaya), kebudayaan merupakan pengindoktrinasi tentang bagaimana manusia perorangan akan mengalami dunia sekitarnya. Maka yang individual selalu menjadi ungkapan kesosialan.

Anarkisme menghendaki pemusnahan semua kekangan kelembagaan terhadap kebebasan manusia, supaya manusia dapat mewujudkan potensi-potensi seutuh mungkin, sebagai makhluk berakal-budi yang terbebaskan. Prinsip teoritis anarkis mendekati prinsip liberal, yaitu memakai pendekatan individualisme psikologis. Namun, dalam praktik, kaum anarkis menggunakan pendekatan yang istilah ilmiahnya 'determinisme sosial'. Dalam benak sang anarkis, individu (dalam arti psikologis) menjadi subordinat masyarakat karena (secara kasar) individu hanya eksis bila menjadi anggota masyarakat. Tetapi dalam arti filosofis murni, individu idealnya lebih tinggi ketimbang masyarakat, dan ia hanya menjadi manusia seutuhnya bila melampaui batasan masyarakat terorganisasi. Kaum anarkis menganggap manusia secara alamiah bersifat sosial –secara alamiah membutuhkan manusia-manusia lain dan cenderung aktif bekerjasama dengan sesamanya secara rasional dan konstruktif. Kerjasama ini, lantaran memang sudah fitrah manusia, musti sukarela. Masalah muncul ketika dalam kenyataan masyarakat makin diidentifikasi dengan lembaga-lembaga serta proses-proses politis yang memerosotkan individu menjadi sekedar 'sekrup' kelompok, hanya butiran kepribadian dalam sehimpun kesosialan, dan pemerosotan martabat ini dilakukan secara sistematis. Maka otonomi individu dirampas,

ia dikekang langsung dengan paksaan dan secara tidak langsung lewat sosialisasi.

Semua ini menjadikan manusia makin pasif, makin reaktif, makin patuh, sebaliknya juga kurang bertanggungjawab, kurang rasional, kurang sosial. Watak anarkisme, tidak seperti prasangka umum, sesungguhnya dilandasi pikiran bahwa masyarakat dan kebudayaan itu perlu dan baik. Tapi jangan sekali-kali menyamakan negara dengan masyarakat; karena mensubordinasi individu pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang fungsinya melestarikan corak perilaku kolektif tertentu selalam-lamanya. *Negara bisa dihapus* karena ia cenderung gagal menghilangkan kekacauan-kekacauan dan malah ia menciptakan penyakit yang lebih parah lagi dalam diri para warganya.

Kaum anarkis membedakan dan memperlawankan antara *pendidikan* dan *persekolahan*. Pendidikan dianggap sebagai proses belajar lewat pengalaman sosial alamiah masing-masing orang. Ini berbeda dengan persekolahan yang hanya merupakan *satu corak pendidikan*. Anak sekolahan bukan berarti manusia berpendidikan, sekolah yang ada sekarang hanya kepanjangan tangan negara otoritarian saja. Sekolah memerosotkan tanggungjawab individual, dan dengan begitu ia *menjadikan anak-anak tak bisa dididik biasa lagi* dalam makna pendidikan yang sejati. Masalah-masalah pendidikan yang nyata, menurut mazhab anarkis, adalah berbagai *problema sosial*: kemiskinan, peperangan, rasialisme, dll. Karena itu *tindakan paling edukatif yang paling bisa dilakukan adalah menghapus sekolah-sekolah*. (hubungan mazhab Filsafat pendidikan dapat dilihat pada tabel).

Menelusuri Hubungan Filsafat Pendidikan dan Filsafat Administrasi Pendidikan

Lalu bagaimana hubungan antara mazhab pendidikan itu dengan administrasi pendidikan?

Uraian sejumlah aliran di atas menunjukkan satu kenyataan bahwa filsafat tidak hanya menentukan bagaimana memikirkan sesuatu yang mendasar, namun sekaligus juga menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dan tujuan apa yang dapat dirumuskan oleh lembaga pendidikan. Hal ini berarti, filosofi yang diacu oleh suatu lembaga atau oleh pengelola sekolah akan menentukan penetapan visi, misi, serta pengelolaan pendidikan itu.

Sebagaimana dikemukakan pada awal bab, filsafat pendidikan menyumbangkan tujuan pendidikan yang akan memengaruhi fungsi administrasi yang diterapkan di sekolah. Tabel berikut ini dapat memberikan beberapa gambaran kasar di antara keduanya:

Tabel
Pengaruh Mazhab Filsafat Pendidikan
pada Administrasi Pendidikan

	Ide Dasar	Tujuan Pendidikan	Administrasi dan Pengendalian
Fundamentalisme	Menganggap bahwa kehidupan yang baik bersumber pada kepatuhan terhadap pembagai tolok ukur keyakinan dan perilaku yang sifatnya	Memban- gkitkan kembali dan meneguh- kan kembali cara-cara lama yang lebih baik dibanding sekarang	Guru memiliki wewenag atas dasar kedudukannya yang lebih tinggi dalam kebajikan ** Hak guru diletakkan di bawah pengakuan dan ketaatan guru kepada keyakinan tradisi.
Intelektualisme	Manusia adalah makhluk berakal budi yang memiliki daya bawaan untuk menalar, jagat yang rasional ini bisa ditangkap dan dipahami bila nalar itu sudah tajam terasah lewat pendidikan.	Mengenali, melestarikan, dan meneruskan kebenaran	Wewenang guru dilandaskan pada kebijaksanaannya yang lebih tinggi. ** Hak guru sebagai ikhtisar pencerahan yang lebih tinggi yang didasarkan pada kebijaksanaan yang lebih tinggi pula.

<p>Konser- vatisme</p>	<p>individu adalah bawahan sistem sosial (yang lebih besar, yang dianggap lebih pasti dan lebih dapat dipercaya daripada proses-proses penalaran individual). Perubahan sosial, bagi mazhab ini, boleh-boleh saja tapi harus bersifat membangun, yang terjemahannya adalah “tetap menghormati hukum dan tatanan yang berlaku”.</p>	<p>Melestarikan dan meneruskan pola-pola perilaku social yang mapan</p>	<p>Kewenangan guru berdasar peran dan status sosialnya.</p> <p>**</p> <p>Hak guru ditentukan oleh keyakinan dan perilaku social yang dominant.</p>
<p>Liberal- isme</p>		<p>Mengangkat perilaku personal yang efektif</p>	<p>Wewenang guru didasarkan pada keterampilannya dalam mendidik siswa.</p> <p>**</p> <p>Hak guru ditentukan tergantung pada situasi, lewat penerapan kecerdasan praktis sehubungan dengan pemecahan masalah-masalah social yang penting.</p>

<p>Liberasionisme</p>	<p><i>liberasi</i> artinya pembebasan, lebih tepatnya “pembebasan sosial”. Pendidikan adalah penanaman hasrat untuk membangun kembali masyarakat menurut jalur-jalur kemanusiaan yang menekankan pengembangan potensi tiap individu setinggi-tingginya.</p>	<p>Mendorong pembahasan sosial yang perlu dengan cara memaksimalkan kebebasan personal di sekolah dan dengan mengangkat kondisi-kondisi yang lebih berkemanusiaan dan memanusiaikan dalam masyarakat secara luas.</p>	<p>Wewenang guru berdasar pada ketajaman intelektual dan keterlibatannya secara social. *** Hak-hak guru ditentukan dan dirumuskan oleh keharusan-keharusan tertentu yang mesti ada demi melembagakan perubahan sosial yang berkemanusiaan dalam masyarakat tertentu dan saat tertentu.</p>
<p>Anarkisme</p>	<p>individu idealnya lebih tinggi ketimbang masyarakat, dan ia hanya menjadi manusia seutuhnya bila melampaui batasan masyarakat terorganisasi.</p>	<p>Membawa perombakan-perombakan yang segera dan berlingkup besar, yang bersifat humanistik, di dalam masyarakat, dengan cara menghapuskan persekolahan wajib</p>	<p>Tidak ada kewenangan khusus yang diberikan guru sebagai guru. ** Hak-hak guru pada intinya sama dengan hak-hak siswa; yakni hak asasi manusia untuk melaksanakan kegiatan rasional tanpa paksaan dalam hubungan timbal balik yang alami antar perorangan dalam kehidupan bersama di dalam system social yang bebas dan terbuka.</p>

Praktek Administrasi Pendidikan, dengan demikian, di samping mengikuti kerangka administrasi/manajemen secara umum (seperti manajemen mutu) juga sangat dipengaruhi oleh afiliasi filosofi lembaga pengelola. Manajemen standar seperti manajemen mutu hanyalah kerangka atau ruang permainan bagi realisasi nilai dan tujuan dari filsafat yang diacu.

Walaupun demikian desakan kepentingan pasar dan melubernya nilai-nilai global memerlukan pengelolaan pendidikan yang tidak sekadar merujuk pada filosofi dirinya. Lembaga pendidikan kini berada dalam dilema, merujuk pada filosofi diri sambil sanggup menanggapi kebutuhan masyarakat yang berubah dengan cepat. Penerapan manajemen strategis atau manajemen mutu yang memesankan “perbaikan secara terus-menerus” dapat membantu suatu lembaga untuk bertahan atau bahkan mengikuti perkembangan perubahan, namun dapat saja “mengorbankan” ideal filosofi yang menjadi landasan lembaga bersangkutan.

Untuk itu, administrasi pendidikan harus dapat merumuskan diri secara eklektik. Salah satu pendorongnya adalah bahwa masalah di dalam administrasi pendidikan lebih kompleks. Administrasi pendidikan tidak sekadar mengelola kepentingan negara (seperti administrasi negara) atau memperbesar keuntungan secara efektif dan efisien (seperti administrasi bisnis) melainkan juga dibebani kepentingan manusia untuk menjadi dirinya secara manusiawi, kepentingan masyarakat juga agama untuk mewariskan nilai, dan kepentingan pengembangan peradaban. Bila Administrasi Pendidikan sekadar mengikuti kepentingan negara, maka hak individu akan dikorbankan, bila administrasi pendidikan sekadar mengikuti kepentingan pasar maka masyarakat akan kehilangan nilai-nilai baik yang dapat saja

akan menjadi inspirasi atau modal dasar penyelesaian masalah dari dunia pasar. Hal ini berkonsekuensi pada perumusan administrasi pendidikan secara eklektik, satu sisi berkompromi dengan pasar dan negara, namun pada sisi lain tetap menjaga hak manusia untuk mengembangkan dirinya atau tetap menyiapkan siswa sebagai pemeran sejarah di masa depan.

The Leader in Me: Sebuah Refleksi

Zaman yang berubah memaksa dunia pendidikan merumuskan ulang hakikat, tujuan dan metodenya. Paling tidak ada dua pertanyaan penting yang dikemukakan dunia pendidikan saat ini: Apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan? Bagaimana seharusnya pendidikan diorganisir agar sesuai dengan tujuan itu?

Pertanyaan pertama dari masalah ini dijawab secara beragam. Paling tidak ada tiga tujuan pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan sebagai pewarisan nilai yang baik yang sesuai dengan hakikat kemanusiaan peserta didik, tujuan ini dapat disebut “belajar untuk belajar/manusia”. Lembaga pendidikan agama dan komunitas masyarakat tertentu memilih tujuan ini dengan asumsi bahwa agama harus terus bisa mengimbangi perubahan zaman, bahkan memberikan “pelurusan” terhadap kekacauan zaman. Peserta didik pada tujuan seperti ini disiapkan sebagai “tokoh zaman” yang memperbaiki kehidupan dengan nilai-nilai adiluhung. Kedua, tujuan ekonomis, untuk menyediakan Sumber Daya Manusia bagi dunia industri dan ekonomi secara umum. Ketiga, tujuan politik negara, yaitu menyediakan warga negara yang baik.

Dalam beberapa dekade terakhir, tujuan pendidikan diarahkan untuk melayani ekonomi. pendidikan harus sanggup menghasilkan tenaga kerja terampil bagi kebutuhan dunia kerja. Tujuan ini membuat kebutuhan dunia bisnis yang menuntut fleksibilitas, responsiveness, pemecahan masalah yang kreatif, *teamwork*, *self-management*, dan keterampilan komunikasi yang bagus menjadi kurikulum pendidikan. Tujuan bisnis ini menggantikan kepentingan negara yang menginginkan terbentuknya sumber daya yang dapat tepat waktu, patuh, menerima keputusan atasan, memahami posisi diri dalam struktur, dan mampu keterampilan dasar.

Ini tentu saja tidak salah, karena semua individu membutuhkan pekerjaan agar dapat bertahan hidup sebagai pribadi dan warga negara. Namun kurikulum dunia bisnis itu itu harus disesuaikan dengan tujuan dasar manusia atau hakikat manusia. Untuk itulah beberapa pihak telah merumuskan tujuan yang lebih umum yang di samping memenuhi tujuan bisnis, juga memenuhi tujuan negara/masyarakat dan diri sendiri. Tujuan itu bisa berbentuk “memompa kreativitas pada tingkat individu, organisasi, dan sosial.

Sekarang kita bicarakan pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan seharusnya diorganisir. Semua ini bergantung pada tujuan utama, tentunya. Pendidikan dengan tujuan untuk melindungi tatanan sosial dan sikap kerja masa lalu, akan berbeda dengan pendidikan bertujuan memenuhi kebutuhan individu siswa atau membantu orang untuk belajar bagaimana belajar.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pengelolaan pendidikan tidak sekadar demi kepentingan pasar, melainkan

juga demi kepentingan pengembangan diri. Terobosan penerapan *The 7th Habit of Highly Effective People* dapat dijadikan contoh kompromi yang menyelamatkan antara kepentingan publik, bisnis, dan pengembangan diri siswa.

Buku *The Leader in Me* merupakan kisah pembangunan sekolah A.B. Combs yang dilakukan oleh kepala sekolah Murieal Thomas Summers berdasarkan prinsip-prinsip *The 7th Habit of Highly Effective People* Stephen Covey. Untuk itu, Summers menerima masukan dari orang tua, komunitas bisnis, orang tua, guru, dan siswa mengenai :apa yang mereka inginkan tentang sekolah/pendidikan?

Dari hasil analisa stakeholders ini ditemukan rumusan bahwa yang dibutuhkan orang tua dari sekolah anak-anaknya adalah:

Kemampuan yang diinginkan	%
Kemampuan membaca	75
Keterampilan komputer dan teknologi	71
Pemikiran Kritis dan Keterampilan memecahkan masalah	69
Etika dan Tanggung Jawab Sosial	62
Komunikasi Tertulis	58
Kerja sama tim	57
Komunikasi Percakapan	56
Belajar Seumur Hidup	50
Matematika	48
Kepemimpinan	44
Kreativitas dan inovasi	43
Melek MEDIA	43
Kesadaran global	42
Sains (Biologi, Kimia, dan Fisik)	38

Sementara dari komunitas Bisnis Muriel menemukan 10 Besar Kualitas dan Keterampilan yang Dicari Pemberi Kerja, yaitu:

- Keterampilan Berkomunikasi (secara lisan dan tertulis)
- Kejujuran/Integritas
- Keterampilan Kerja sama Tim
- Keterampilan Perserorangan
- Motivasi diri/ Inisiatif
- Etos Kerja yang Kuat
- Keterampilan analitis
- Keterampilan Teknologi
- Keterampilan Organisasi
- Pikiran Kreatif.

Pada daftar “10 Besar” ini terlihat bahwa yang dibutuhkan komunitas bisnis dari sekolah lebih dari sekedar menghasilkan siswa yang mampu membaca, menulis, dan menggunakan kalkulator. Keinginan komunitas bisnis adalah terbentuknya karakter dan kemampuan, saat itu Muriel berpikir bahwa bukankah kesemua kebutuhan komunitas bisnis itu tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan?

Sementara dari para guru, Muriel menemukan fakta bahwa pada prinsipnya guru “tidak menginginkan tambahan pekerjaan”. Di samping itu, Muriel menemukan bahwa guru tak mau mengajar demi mengajar, mereka menginginkan bahwa apa yang mereka ajarkan memiliki nilai (pelajaran yang akan membantu para siswa sukses dalam kehidupan, di dalam maupun di luar sekolah). Kemudian Muriel menganalisis kebutuhan siswa

terhadap sekolah. Data yang ditemukan meliputi

Fisik	Keselamatan, kesehatan, makanan, latihan, tempat perlindungan, dan kebersihan
Emosi Sosial	Penerimaan, kebaikan, kreativitas, dan hasrat untuk mencintai dan dicintai
Mental	Pertumbuhan kecerdasan, kreativitas, dan tantangan yang membangkitkan
Spiritual	Sumbangan, arti, dan keunikan

Keempat data mengenai kebutuhan akan sekolah ini mendorong Muriel untuk membuat kesimpulan rangkuman. Ia teringat pada ceramah Dr.Covey dan kemudian mengajukan arah sekolah itu, yaitu *Mengembangkan Kepemimpinan Pada Setiap Anak*. Alasan dasarnya dapat ditemukan pada uraian Covey (2009: 49):

“Setiap orang muda ingin tumbuh dan dihargai –ingin keempat kebutuhannya diperhatikan, ingin diperlakukan sebagai anak sepenuhnya. Ini adalah keinginan alami dari jiwa manusia. Jadi, kaum muda dengan cepat mengaitkan diri dengan guru dan kepala sekolah yang tahu cara memunculkan yang terbaik dari kaum muda, yang membuat merasa unik dan penting, dan yang membangun perasaan penghargaan diri mereka. Salah satu definisi *kepemimpinan* yang saya sukai, yang saya gunakan selama beberapa tahun, adalah *Kepemimpinan adalah mengkomunikasikan nilai dan potensi orang dengan jelas sehingga mereka terilhami untuk melihatnya sendiri*”. Bukankah itu merupakan esensi mengajar yang baik?”

Usulan ini diterima dan AB Comb kemudian menggunakan prinsip-prinsip *The 7th Habit of Highly Effective People* di sekolahnya. A.B. Combs kemudian menjadi sekolah yang

diminati di North Caroline dan menjadi sekolah model di dunia. A.B Combs menghasilkan lulusan yang memuaskan kebutuhan orang tua dan komunitas bisnis, sekaligus juga menyenangkan guru dan memberikan keleluasaan pada aktualisasi potensi siswa.

Kisah AB Combs ini menunjukkan bahwa tujuan filosofi pendidikan tidak serta merta akan bertentangan dengan keinginan pasar, orang tua, dan siswanya. Tujuan pendidikan justru dapat disimbiosiskan dengan tujuan lain sehingga menghasilkan sintesa baru yang dapat “melayani” semua keinginan sambil tetap mengacu pada filsafat pendidikan yang diacu.

Yang menarik dari upaya Muriel di AB Combs adalah keputusannya untuk menjadikan teori dan peralatan manajemen mutu seperti efektivitas, fishbone diagram, pareto diagram sebagai pelajaran bagi siswanya. Biasanya alat-alat mutu itu digunakan untuk pengelolaan organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efektif, namun AB Combs, dengan merujuk pada Covey yang terlebih dahulu menjadikan efektivitas sebagai kebiasaan manusia unggul, menjadikannya sebagai pelajaran inti sekolahnya. Di titik inilah, sekolah AB Combs sanggup mendamaikan tujuan pendidikan dan tujuan administrasi, sesuatu yang seharusnya terjadi pada sistem pendidikan.

7

Administrasi dan Dunia Kehidupan

”Dapatkah kegiatan berpikir sendiri, kebiasaan untuk memeriksa dengan seksama apapun yang kebetulan terlintas atau menarik perhatian pikiran, tak peduli apa hasil dan isi khususnya, menjadi salah satu persyaratan yang membuat manusia menahan diri dari perbuatan jahat atau bahkan mengkondisikan mereka untuk melawannya?” (Hannah Arendt)

Kaitan antara pendidikan dan administrasi sebenarnya tidak sederhana. Pendidikan pada dirinya memiliki dan berasal dari nilai-nilai kehidupan jauh sebelum paradigma modern (sumber nilai ilmu administrasi) berkembang. Ini berarti pendidikan sendiri memiliki karakteristik yang khas yang tidak dengan sendirinya dapat digabungkan dengan kecenderungan administrasi. Untuk dapat memahami kaitan keduanya, ada satu teori yang cukup penting untuk dipelajari, yaitu teori tentang "Dunia Kehidupan" (*lebenswelt*).

Dunia Kehidupan dan Administrasi

Dunia kehidupan adalah dunia relasi manusia yang alamiah, relasi tatap muka antara anggota keluarga dan keluarga besar, dunia keintiman dan persahabatan. Dalam masyarakat asli dunia kehidupan meliputi segala hal: kelahiran anak dalam keluarga, pengasuhan dan sosialisasi anak-anak, pendidikan dalam aneka mitos dan tradisi serta sejarah masyarakatnya, ritus berbagai tahap kehidupan, ritual keagamaan, pekerjaan dan perdagangan, serta keterlibatan dalam siklus alam dan musim.

"Dunia kehidupan adalah tempat kita belajar menjadi manusia, mengalami hubungan intim keluarga dan rukun tetangga secara terus menerus merupakan semesta rasa kasih sayang, nilai-nilai dan jati diri. Dunia kehidupan adalah jalinan hubungan tatap muka di mana orang-orang melibatkan diri baik dalam percakapan yang ringan maupun serius, merundingkan konflik, mengekspresikan bagaimana mereka merasa tentang berbagai aspek hidup mereka.... Di dalam dunia kehidupan itu orang

mengalami tragedi, rasa sakit, dan kehilangan, sekaligus juga kegembiraan berkat hubungan intim, kepuasan berkat persahabatan, dan kesetiaan dari keluarga. (Starrat, 2007: 125-126).

Istilah *lebenswelt* pertamakali dikemukakan filsuf Edmund Husserl sebagai konsep mengenai dunia kehidupan yang belum direfleksikan, masih murni dan diterima begitu saja tanpa "intervensi" rasionalitas. Pendidikan pada mulanya ada dalam *lebenswelt* yang terjadi begitu saja, alamiah sebagai proses internalisasi nilai-nilai yang dianggap penting bagi suatu kelompok terhadap generasi penerusnya; demikian pun interaksi sosial berlangsung secara "begitu saja". Artinya pada *Lebenswelt* kita tidak membuat klaim-klaim dalam interaksi sosial itu sebagai teman dan juga tidak mempermasalahkannya, karena klaim-klaim itu merupakan bagian dari hal-hal yang secara kultural kebenarannya tidak dipersoalkan (Hardiman, 2009:38). Menurut Habermas, *Lebenswelt* sosial dan kultural kita sebagai keseluruhan tidak dapat disistematisasikan dan *Lebenswelt* itu tidak kebal terhadap problematisasi, *lebenswel* sosial dan kultural dianggap sebagai "tempat transendental di mana pembicara dan pendengar bertemu". (Habermas, 1995: 192).

Akan tetapi, seperti dikemukakan Habermas (1975) kemunculan modernitas, khususnya pada abad ke-19 dan ke-20, memunculkan jenis dunia yang berbeda (yaitu dunia rekayasa). Semuanya disistematisasikan, dipertanyakan ulang dan disusun berdasarkan rancangan baru dengan pendekatan rasional. Salah satunya, kemodernan melahirkan administrasi publik yang diatur oleh negara. Melalui administrasi publik ini kehidupan sosial menjadi terbelah-belah, terkotak-kotak, dan dirasionalisasi. Dunia

kehidupan dijajah oleh dunia rekayasa, yakni administrasi dan produksi massa (ekonomi)

”Inilah dunia dengan pola rasional, suatu manipulasi keinginan dan fantasi melalui periklanan. Dunia rasional ini menurunkan individualitas menjadi uniformitas yang dapat diprediksi dalam penyusunan kebijakan negara. Dunia rasional mengukur hubungan antar pribadi, pekerjaan, dan waktu luang dengan rumus biaya-keuntungan dan rencana jangka panjang. Pola pikir dunia rekayasa ini mempengaruhi setiap warga negara, pelaku bisnis, dan juga pejabat publik. Hidup dan bekerja melulu dalam pola pikir semacam ini merendahkan derajat kemanusiaan kita semua”. (Starrat, 2007:126).

Bila pada awalnya *Lebenswelt* menyatu dengan sistem, Lalu pada perkembangan awal kemodernan, sistem itu (dalam wujud pasar dan negara) lebih dominan daripada *Lebenswelt*, bahkan menjadi bagian dari sistem (lihat gambar). Habermas menulis, ”*Lebenswelt* yang dulu masih sama luasnya dengan sistem sosial yang sedikit terdiferensiasi lama kelamaan direndahkan menjadi sebuah subsistem di samping subsistem-subsistem lainnya” (Habermas, 1995: 230). *Lebenswelt* menciut karena didesak oleh sistem yang menjadi semakin rumit, sementara dalam proses perkembangan ini sistem justru semakin besar otonominya. Negara (kemudian ekonomi kapitalis) menjadi otonom di hadapan solidaritas sosial yang semakin menipis. Akhirnya agama dan tradisi tidak lagi menghasilkan legitimasi di tengah masyarakat. Mengenai situasi ini di dalam dunia pendidikan, Starrat (2007: 127) menulis:

”Kolonisasi atas dunia kehidupan oleh dunia rekayasa (administrasi massa, serta produksi dan konsumsi komoditas swasta), jelas telah mempengaruhi seluruh aspek sekolah. Para siswa mengalami diperlakukan sebagai barang –dalam ujian, intelek diharap menyerap informasi wajib dan kemudian mengulangnya tanpa sentuhan perasaan dan pengalaman mereka sendiri. Kelulusan di sekolah lebih sering berarti memenuhi standar umum yang dirancang bagi setiap siswa daripada suatu tanggapan personal terhadap kurikulum.

... Para siswa mesti dikontrol . Kurikulum yang sudah dirancang ”diberikan” kepada para siswa. Pengetahuan tentang keragaman diharapkan diperoleh melalui ”perlakuan” yang seragam. ..Pemberontakan terhadap peraturan harus ditekan, meskipun mereka tidak ikut serta merumuskan peraturan itu.”

Lalu apa jadinya setelah sumber legitimasi religius tradisional sungguh-sungguh mengering? Apakah tatanan sistem pendidikan dan administrasi harus kembali menjadikan Dunia Kehidupan lama sebagai dasarnya? Starrat menggambarkan ironi yang terjadi pada dunia kehidupan. Saat ini, menurut Starrat, dunia kehidupan mengalami kemerosotan yang cukup parah. Salah satu penyebabnya adalah merosotnya kesatuan keluarga dan meningkatnya kesibukan kedua orang tua yang bekerja membuat sekolah dasar menjadi tempat penitipan anak, sekolah menjadi satu-satunya tumpuan seluruh ideal nilai bagi generasi baru. Karena kehidupan keluarga merosot, maka merosot pula dasar nilai-nilai dan makna peserta didik sebagaimana yang dialami orang-orang dewasa.

Jadi untuk kembali pada dunia kehidupan justru menimbulkan masalah yang tak kecil, terutama ketika dunia kehidupan sudah sedemikian terkolonialisasi oleh dunia rekayasa. Sekolah pun demikian, pengelolaan sekolah dipahami sebagai manajemen input dan output, layanan yang efisien, dan produktivitas yang dikukur oleh nilai tes. Pada saat ini sekolah diadakan untuk memajukan kepentingan negara dan perusahaan komersial, karena menurut mereka itulah makna kehidupan publik. Pada dunia rekayasa, persekolahan direduksi menjadi implementasi kebijakan yang seragam, yang dapat diprediksi dan dapat dikontrol. Negara dan dunia bisnis menentukan ragam keterampilan yang dibutuhkan dan ragam sekolah yang tepat untuk menghasilkan para pekerja yang patuh dan menguasai keterampilan yang dibutuhkan.

Jadi, apa yang harus dilakukan ketika dunia kehidupan juga sekolah sudah tidak dapat diharapkan lagi. Apa yang harus dilakukan? Habermas memberikan jawaban sebagai berikut:

”Setelah langit-langit hukum sakral roboh dan setelah kedua tiang hukum politik dan kekuasaan yang dipakai secara instrumental ditinggalkan sebagai puing-puing, seharusnya dari rasio belaka ditemukan suatu pengganti untuk hukum sakral yang mengesahkan dirinya sendiri, suatu pengganti yang kiranya dapat mengembalikan otoritas sejati seorang legislator politis yang dibayangkan sebagai penguasa” (Habermas, 1993: 182)

Jawabannya justru pada perbaikan dari cara administrasi diberlakukan. Habermas memang filsuf yang sangat meyakini bahwa modernitas belum selesai dan harus disempurnakan

dengan cara "menambal" sisi negatif dari efek kemodernan. Salah satu efek itu adalah arah rasionalitas instrumental yang menyebabkan semua aspek kehidupan direkayasa sebagai alat untuk mencapai tujuan, contohnya arah pelaksanaan administrasi birokrasi yang kemudian menempatkan manusia sebagai sekadar instrumen. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini:

Pada gambar ini Habermas, sebagaimana dikemukakan Hardiman (2009:63), menceritakan apa yang seharusnya dilakukan untuk membenahi dunia kehidupan. Dunia kehidupan yang selama ini terus-menerus mendapatkan "tekanan" dari tindakan strategis dari dunia rekayasa (sistem: kuasa + uang) sudah seharusnya memberikan pengimbangan melalui tindakan komunikatif.

Tindakan strategis adalah tindakan yang berorientasi pada keberhasilan. Bagi tindakan strategis, segala sesuatu, diperlakukan sebagai alat untuk memaksakan kehendak. Inilah yang selama ini diberlakukan oleh administrasi instrumental yang menghasilkan mekanisme koordinasi sosial. Tindakan strategis ini telah membuat dunia kehidupan kehilangan solidaritasnya, karena solidaritas digunakan untuk mencapai tujuan di luar dirinya, solidaritas hanya sebagai alat. Untuk mengimbangnya, agar unsur solidaritas dari dunia kehidupan, dapat kembali menjadi bagian dari kehidupan manusia diperlukan tindakan komunikatif dari dunia kehidupan. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang terarah pada konsensus, melalui konsensus ini semua pihak dapat mengemukakan klaim kesahihannya tentang sesuatu. Pergerakan akan terjadi bukan dalam keadaan mekanis melainkan muncul dari solidaritas hasil kesepakatan.

Kepastian bahwa terjadi timbal-balik antara tindakan

strategis dan tindakan komunikatif ini diikat oleh hukum yang menjamin integrasi sosial. Hukum itu, dalam dunia) merupakan hasil dari kekuasaan *legislatif* yang memberikan undang-undang kepada kekuasaan *eksekutif* yang kemudian merealisasinya dalam kenyataan. Agar terjadi timbal balik antara tindakan strategis dan komunikatif, hukum harus dibuat melalui proses komunikasi antar pelbagai pihak yang berlangsung secara rasional. Melalui cara ini, seluruh ketentuan hukum merupakan kebutuhan seluruh pihak dan terumuskan melalui dialog partisipatif. Proses komunikasi yang menghasilkan hukum untuk kehidupan bersama ini disebut Habermas sebagai kekuasaan komunikatif (Hardiman, 2009:91).

Produk dari kekuasaan komunikatif (oleh pihak legislatif) ini adalah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Pada undang-undang terdapat tujuan-tujuan bersama yang harus dicapai secara bersama. Di sinilah perlunya administrasi, yaitu mengkoordinasikan semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Namun kekuasaan administratif ini harus terus terkait dengan tindakan komunikatif yang mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada.

“ Praktik administratif mengolah isi teleologis hukum yang berlaku, sejauh politik-politik ini dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan (sejauh politik-politik ini) mengendalikan pelaksanaan administratif dari tujuan-tujuan kolektif... (rasionalitas aktivitas administratif) disesuaikan dengan pilihan teknologi-teknologi dan strategi-strategi yang cocok dalam kondisi-kondisi yang ada (dengan memperhatikan sumber-sumber yang terbatas, jangka-jangka waktu, kesulitan-kesulitan untuk

diterima dan kendala-kendala lainnya)... (Habermas, 1993:92).

Konsep kekuasaan administratif dalam pandangan Habermas ini menurut Hardiman bukanlah tidak hanya mengacu pada Max Weber melainkan terutama pada teori sistem Talcott Parsons. Hardiman (2009:93) menulis:

“Sementara Weber memahami kekuasaan sebagai penggunaan sarana untuk memengaruhi kehendak orang-orang lain – dan kekuasaan pada akhirnya dapat dikembalikan pada seorang subyek tunggal yang bertindak atau pada sebuah kelompok yang dipikirkan sebagai seorang subyek tunggal, Parsons memandangnya sebagai kemampuan umum sebuah sistem sosial untuk memobilisasi persetujuan demi tercapainya tujuan-tujuan kolektif”

Jadi, tindakan administratif diletakkan dalam sistem sosial, yang merumuskan tujuan bersama, menetapkan koordinasi secara bersama, berdasarkan kebutuhan dan sumberdaya bersama yang ada. Pada bagian sebelumnya kita telah membicarakan konsep Mihaly yang menyatakan bahwa organisasi kehilangan tujuan membahagiakan semua pihak *bila manajemen tidak menghargai pekerja dan memandangnya sebagai individu yang unik, tetapi hanya sebagai alat yang bisa dibuang ketika tidak lagi dibutuhkan, maka karyawan pun akan memandang organisasi tidak lebih dari sekadar mesin penghasil gaji, tanpa nilai atau makna selain itu.* Praktek Administrasi dengan demikian harus melibatkan kepentingan bahkan nilai yang dimiliki oleh seluruh pihak yang terkait.

Refleksi: Dibutuhkan Kepemimpinan Transaksional-Transformasional

Melalui kebijakan Merdeka Belajar, dunia pendidikan Indonesia kini berhadapan dengan perubahan yang cukup besar. Secara teoritis kebijakan Merdeka Belajar begitu ideal dan memang begitulah seharusnya kampus dikelola, namun dalam realitasnya kebijakan Merdeka Belajar memberikan kerepotan tersendiri –terutama karena kebijakan Merdeka Belajar menuntut perubahan pola kerja pendidikan secara lebih mendasar. Perubahan tidak terjadi secara otomatis dan mudah. Dalam setiap perubahan selalu ada tarikan kuat menuju keadaan statis atau seimbang pada tingkat individu, tingkat kelompok kecil, dan masyarakat. Orang cenderung menginginkan rutinitas yang sudah biasa, pola-pola yang sudah bisa diramalkan; orang juga cenderung menginginkan keteraturan, rasa aman, ketenangan pikiran dan konsistensi kognitif.

Ketika kebijakan baru mengancam rutinitas dan apa yang dapat diprediksi, individu melawan bukan karena kebencian melainkan karena perubahan itu menuntut pergeseran yang tidak biasa dalam pola-pola yang sudah terbiasa mereka lakukan. Bila isi perubahan secara teoritis cukup rasional dan memberikan tujuan yang baik, maka peningkaran karena tertawan oleh kebiasaan lama adalah masalah moralitas untuk dapat melakukan perbaikan. Karena itu, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan administratif pada seluruh sistem, sehingga seluruh proses perubahan dapat terkoordinasi.

Pada titik ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan bukan sekadar manajemen. Manajemen, pada dirinya sendiri,

tidak berurusan dengan moralitas. Perhatian utama manajemen adalah logika, efisiensi, keteraturan, kepastian, dan produktivitas. Orang dapat menjalankan manajemen yang sama pada sebuah kamp pembantaian atau sebuah biara. Masalah membangkitkan moralitas dan semangat untuk bisa berubah dapat diatasi oleh kepemimpinan.

Burn (1978) memiliki konsep menarik mengenai kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional membantu orang masuk ke dalam kesepakatan secara jelas, tulus hati, dan memperhitungkan hak-hak serta kebutuhan orang lain. Inilah yang dibutuhkan oleh perubahan, suatu kepemimpinan para administrator yang pada satu sisi mengelola manajemen organisasi sembari pada saat yang sama mendengarkan keluhan dan perhatian berbagai partisipan, memutuskan perdebatan yang adil, membuat orang bertanggung jawab atas target mereka, menyediakan sumberdaya yang diperlukan demi pencapaian tujuan-tujuan, dan seterusnya. Kepemimpinan jenis ini mengandaikan adanya tawar-menawar antara berbagai kepentingan individual sebagai imbalan atas kerjasama mereka dalam agenda pemimpin tersebut.

Sementara itu kepemimpinan transformasional membuat orang bertindak atas nama kepentingan kolektif kelompok, mengundang perhatian semua orang pada maksud organisasi dan pada relasi antar organisasi dan masyarakat. Kepemimpinan transformasional mengubah sikap, nilai, dan keyakinan-keyakinan yang berpusat pada diri sendiri menuju keyakinan, sikap, dan nilai yang lebih tinggi dan altruistik. Dalam hal ini, administrator harus bukan hanya bertindak secara rasional, tetapi juga memiliki kepekaan moral (non-rasional) sehingga penentangan terhadap

perubahan dapat diakomodasi secara baik.

Sekarang kita dapat bayangkan apa yang terjadi pada sebuah sekolah yang sedang mengalami perubahan. Seorang administrator harus mengambil keputusan tertentu untuk mengikuti kebijakan pemerintah yang akan berhadapan dengan konflik-konflik, koordinasi sub—kelompok, dan pemberian dukungan berbagai usaha para guru dan orang tua. Pada saat itu, administrator yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan berusaha membuat transaksi dalam pengelolaan sekolah yang sebisa mungkin bersifat adil dan menghormati hak dan klaim orang lain. Inilah lokus bagi pentingnya kepemimpinan transaksional.

Kepemimpinan transaksional kepala sekolah adalah tipe pimpinan yang sangat memperhatikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan terhadap sistem pendidikan sambil tetap berusaha memediasi konflik. Kepemimpinan transaksional akan dipandu dengan keahlian teknis, rasionalitas, dan kesadaran akan batas-batas rasionalitasnya. Cakupannya adalah memperjelas fakta-fakta, mengidentifikasi masalah secara jelas, mengeksplorasi alternatif-alternatif, menjaga keputusan-keputusan tetap dekat dengan yang berkepentingan di tingkat lokal, dan menggunakan intuis-intuisi serta akal sehat.

Walaupun kepemimpinan transaksional dapat menghadapi masalah penentangan terhadap perubahan, kepemimpinan transformasional juga kadang dibutuhkan. Pada saat menghadapi perpecahan, satu-satunya cara memecahkan jalan buntu pengambilan keputusan adalah mencari kesepakatan pada kebaikan bersama yang lebih besar yang harus diemban oleh

sekolah. Para administrator harus mengangkat pandangan para partisipan kepada tujuan kolektif sekolah yang lebih besar dan berupaya mendaftar tindakan kolektif mereka atas nama tujuan-tujuan tersebut. Bahkan kemudian dapat dikatakan bahwa maksud dan tujuan yang lebih besar itulah yang memberikan peluang dan perspektif demi terus berlangsungnya kepemimpinan transaksional.

Jadi di samping kekuasaan administratif dan kekuasaan komunikatif yang dijamin oleh hukum demokratis, sebagaimana dikatakan oleh Habermas di atas, yang juga dibutuhkan adalah kepemimpinan transaksional-transformasional.

8

Filsafat Administrasi Pendidikan dan Contoh Rancangan Administrasi Pendidikan

Manajemen berfokus pada pertanyaan, “Bagaimana cara terbaik saya untuk mencapai hal-hal tertentu? Kepemimpinan berurusan dengan “apa saja yang ingin saya capai...Manajemen adalah mengerjakan segalanya dengan benar; kepemimpinan adalah mengerjakan hal-hal yang benar. Manajemena dalah efisiensi dalam menaiki tangga keberhasilan, kepemimpinan menentukan apakah tangganya bersandar pada dinding yang benar.

(Stephen R Covey)

Penerapan KTSP memberikan tantangan baru pada gaya kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan baru harus lebih banyak terlibat dalam memberikan dukungan kerja kepada para staf profesional, menciptakan maupun bekerja dalam jaringan, lebih mengembangkan pola organisasi yang organik ketimbang pola organisasi otoriter yang hierarkis. Para kepala sekolah, dalam model KTSP, harus lebih terlibat dalam upaya membentuk sekolah yang tanggap terhadap kebutuhan yang muncul dalam komunitasnya, tidak hanya yang berkaitan dengan lapangan kerja, namun juga harus memperhatikan konteks politis, kultural, dan perubahan sosial yang berlangsung.

Perubahan-perubahan ini menuntut tipe pemimpin lembaga pendidikan yang bersifat intelektual transformatif (Foster, 1989). Joh Starrat (2007: 22) mengemukakan bahwa “...tipe kepemimpinan yang dibutuhkan tidak cukup sekedar penguasaan teknis dan rasionalitas fungsional. Meskipun semuanya itu dibutuhkan, hal yang lebih dibutuhkan adalah kepemimpinan substansial –kepemimpinan yang memiliki ide-ide, visi, komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dipegang teguh, yang dapat diterjemahkan ke dalam program-program pendidikan jangka panjang dan struktur institusi yang manusiawi”. Pemimpin lembaga pendidikan harus tanggap terhadap perkembangan kebijakan sosial dan berpartisipasi membentuk kebijakan tersebut.

Selain kepemimpinan yang transformasional, penerapan KTSP merubah guru tidak sekedar pengajar melainkan juga sebagai administrator. Guru tidak sekedar datang di kelas, memimpin Proses Belajar Mengajar, namun juga ikut merumuskan visi, misi, tujuan, dan program sekolahnya; di samping itu juga guru harus melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, serta

evaluasi proses belajar mengajar secara lebih ketat ketimbang sebelumnya. Hal ini dapat merubah karakter guru dan wajah sekolah. Sekolah kini menjadi institusi administrasi yang dapat berarti “mengkerangkeng guru” pada rutinitas yang megekan kebebasan dan kreativitasnya.

Paradoks kehidupan institusional dan Jalan Keluarnya

Max Weber meyakini bahwa institusi-institusi di zaman modern merupakan ancaman paling besar terhadap kebebasan dan kreativitas, namun sekaligus merupakan satu-satunya ruang lingkup untuk menjalankan kebebasan dan kreativitas (Eisentadt, 1969). Kehidupan institusional diatur oleh pelbagai kegiatan rutin, peran, aturan, kebijakan, tuntutan, dan prosedur standar operasi. Tujuan cirri structural kehidupan institusional adalah membuat setiap hal sungguh-sungguh dapat diprediksi. Bila setiap hal seragam dan dapat diprediksi, maka institusi mengerti apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengerjakannya secara paling efektif. Paradoksnya, ketika semuanya seragam dan terkontrol saat itu kreativitas dan kebebasan tertekan.

Kehidupan institusional akan selaluy memaksakan batasan-batasan pada kreativitas dan kebebasan karena keterbatasan sumber daya dan misi institusional. Akan tetapi, institusi juga merupakan sumber kekuatan, pengaruh, dan produktivitas tersebut untuk mengejar tujuan yang menggembirakan dan mulia. Pencapaian tujuan merupakan ekspresi kebebasan dan kreativitas yang sesungguhnya. Keputusan untuk menegaskan kebebasan otentik berarti menentang institusi, menguasai organisasi tersebut untuk mengubah aturan yang ada, dan membantu institusi untuk memiliki pandangan baru.

Benarkah aktivitas administrasi dapat membunuh karakter guru dan merubah wajah sekolah menjadi seperti pabrik? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita membicarakan *Total Quality Management* pada pendidikan.

Kebijakan Kampus Merdeka yang mensyaratkan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar serta perumusan setiap tahun ajaran dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari *Total Quality Management* (TQM). TQM adalah salah satu model manajemen yang mengarahkan pengelolaan institusi yang terfokus pada mutu pelayanan.

TQM, menurut Sallis (1983: 76), adalah "sebuah pendekatan praktis, namun strategis, dalam menjalankan roda organisasi yang memfokuskan diri pada kebutuhan pelanggan dan kliennya. Tujuannya adalah untuk mencari hasil yang lebih baik. TQM...merupakan suatu pendekatan sistematis dan hati-hati untuk mencapai tingkatan kualitas yang tepat dengan cara yang konsisten dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. TQM dapat dipahami sebagai filosofi perbaikan tiada henti hingga tujuan organisasi dapat dicapai dan dengan melibatkan seluruh komponen dalam organisasi tersebut"

TQM mengarahkan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan secara terarah sehingga akan mengalami siklus perbaikan terus-menerus. Sistem ini akan "memaksa" guru dan tenaga pendidikan untuk terus menganalisa apa yang sedang dikerjakan dan merencanakan perbaikannya". Setiap staf atau guru dalam lembaga pendidikan dengan pendekatan TQM (atau dalam hal ini KTSP) memiliki tanggung jawab untuk menjamin

atau bahkan meningkatkan mutu. Walaupun TQM merujukkan diri pada prinsip dasar *kaizen* --yaitu bermula dari proyek kecil untuk membangun kesuksesan dan kepercayaan diri untuk kemudian mengembangkan dasar peningkatan selanjutnya—TQM dapat saja mengkerangkeng guru pada kerja administratif.

Sallis (1983: 89-91) mengemukakan sejumlah kendala penerapan TQM yang akan menjebak guru menjadi bagian dari kerangka administrasi belaka:

- TQM adalah sebuah kerja keras. Untuk mengembangkan sebuah kultur, diperlukan waktu. Kerja keras dan waktu adalah dua hal penting yang harus diperhatikan.
- TQM membutuhkan mental juara yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam pendidikan. Peningkatan mutu merupakan proses yang membutuhkan kewaspadaan dan kehati-hatian.
- TQM mengharuskan kesetiaan jangka panjang staf senior terhadap institusi.
- Masalah utama yang sering dialami oleh banyak institusi adalah peran yang dimainkan oleh manajemen menengah.
- Beberapa staf yang terlalu khawatir salah terhadap konsekuensi pemberdayaan juga bisa menghalangi mutu. Mereka cenderung suka terhadap hal-hal yang statis.

Singkat kata, penerapan suatu manajemen tertentu akan berimplikasi pada penambahan tugas yang semakin menyibukkan guru. Apalagi pada lembaga sekolah di negeri ini, manajer senior

atau junior adalah guru juga dengan jabatan struktur sebagai manajer. Maka, penerapan suatu model manajemen seperti KTSP (atau TQM) akan mencerabut guru dari peran asalnya, guru akan terfokus pada pemenuhan aktivitas administrasi sembari melupakan aktivitas pembelajarannya.

Lalu bagaimana jalan keluarnya?

Efektivitas Administrasi Berbasis Efektivitas Administrator

Efektivitas adalah salah satu tujuan dari pengelolaan organisasi. Efektivitas secara umum berarti kemampuan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi bertugas mengelola agar semua sumber daya organisasi berjalan sesuai dengan fungsinya secara baik sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Biasanya efektivitas diukur dari hasil pengelolaan uang dan barang-barang modal, manusia tidak dianggap penting. Namun pada management pengetahuan, manusia dianggap sumber daya (sama dengan uang dan barang-barang modal) sekaligus juga sebagai "pengelola sumber daya", karena itu keefektifan manusia sebenarnya lebih penting daripada uang dan barang-barang modal. Salah satu alasannya adalah karena manusia lah yang akan menentukan kedua sumber daya itu digunakan. Inilah dasar dari pemikiran Covey tentang pentingnya keefektifan manusia dalam suatu organisasi. Untuk itu Covey merumuskan definisi baru efektivitas:

"Pada dasarnya, efektivitas yang terpelihara itu selalu

muncul dari keseimbangan: antara hasil yang diperoleh, dengan aset-aset yang memproduksi hasil tersebut. Produksi (hasil yang diperoleh) disingkat P, dan aset yang menghasilkannya disebut Kemampuan Produksi yang disingkat KP. Jadi, efektivitas adalah keseimbangan antara Produksi dengan Kemampuan produksi, atau antara P dengan KP” (Covey, 1991:7)

Pada persamaan tersebut manusia adalah P sekaligus juga KP, namun ia lebih dominan sebagai KP. Agar dihasilkan P secara efektif, maka Kpnya (yaitu manusia) harus juga efektif. Pada penerapan model administrasi seperti TQM, rumusan ini dapat juga digunakan, bahwa agar suatu organisasi melakukan perbaikan terus-menerus maka manusianya harus juga dapat melakukan perbaikan terus-menerus. Melalui cara ini, proses koordinasi tidak lagi dengan tindakan rasionalitas instrumental melainkan komunikatif.

Pentingnya efektifitas bagi pekerja pengetahuan juga dibicarakan oleh Peter Drucker. Buku *Effective Executive* mengemukakan bahwa ”tanpa keefektifan tidak ada ”kinerja”, tak peduli berapa banyak kecerdasan dan pengetahuan yang ditanamkan dalam pekerjaan itu, tak peduli berapa banyak yang dibutuhkan” (2006:9). Efektivitas merupakan syarat bagi masyarakat saat ini yang, bagi Drucker, telah menjadi masyarakat organisasi. ”..Keefetifan sebuah masyarakat modern dan kemampuannya untuk menjalankan fungsinya –barangkali bahkan kemampuannya untuk bertahan hidup—semakin tergantung pada keefektifan orang-orang yang bekerja sebagai eksekutif di dalam organisasi” (2006:10). Eksekutif yang dimaksudkan Drucker adalah siapapun yang bekerja dengan modal pengetahuan, jadi

mencakup manajer, pemimpin, guru, dan sejenisnya.

Pekerja pengetahuan tidak memproduksi sesuatu yang efektif dengan sendirinya. Dia tidak menghasilkan produk fisik –parit, sepasang sepatu, onderdil mesin. Dia menghasilkan pengetahuan, gagasan, dan informasi. Secara apa adanya, ”produk-produk” ini tidak berguna. Orang lain, seorang berpengetahuan lainnya, harus mengambilnya sebagai input dan mengubah menjadi outpunya agar produk-produk itu menjadi nyata. Pekerja pengetahuan, karenanya... harus memberikan keefektifan (2006: 39)

Drucker membedakan sifat pekerja manual dengan pekerja pengetahuan. Pekerja manual membutuhkan efisiensi, yaitu kemampuan melakukan berbagai hal dengan benar. Pekerja manual diukur dari ketepatan menghasilkan suatu produk berdasarkan pesanan atau tujuan pekerjaan itu. Pekerja manual ini merupakan bagian pelengkap dari organisasi yang bekerja berdasarkan tujuan dan arah organisasi tersebut. Sementara pekerja pengetahuan menggunakan pengetahuan (bukan tenaga dan ketrampilan fisik) yang tidak dapat diukur dengan efisiensi, melainkan dengan efektifitasnya (apakah ia melakukan hal-hal yang benar atau tidak?).

”Mengerjakan hal-hal yang tepat itulah yang membuat kerja pengetahuan efektif. Ini yang tak bisa diukur dengan tolok ukur untuk kerja manual apa pun.

Pekerja pengetahuan tidak bisa diawasi secara ketat atau secara terperinci. Dia hanya bisa dibantu. Namun, dia harus mengarahkan dirinya sendiri, dan harus

mengarahkan dirinya menuju kinerja dan kontribusi, yaitu menuju keefektifan.” (Drucker, 2006: 38)

Gagasan Covey dan Drucker sangatlah mirip, keduanya membayangkan adanya kesadaran individu untuk melatih kebiasaan efektif bagi keberhasilannya di dunia kerja dan masyarakat. Perbedaannya pada anggapan siapa yang dapat efektif, sementara Covey mengandaikan bahwa semua orang dapat dan harus menjadi efektif, Drucker menekankan bahwa pekerja pengetahuanlah yang harus melatih diri menjadi efektif. Keduanya menyadari bahwa manusia dalam organisasi lebih membutuhkan efektivitas daripada efisiensi. Menjadi efektif berarti menjadi manusia-pemimpin, sementara menjadi efisiensi berarti menjadi manusia-administratif.

Manajemen berfokus pada pertanyaan, “Bagaimana cara terbaik saya untuk mencapai hal-hal tertentu? Kepemimpinan berurusan dengan “apa saja yang ingin saya capai Dalam kata-kata Peter Drucker dan Warren Bennis, “Manajemen adalah mengerjakan segalanya dengan benar; kepemimpinan adalah mengerjakan hal-hal yang benar”. Manajemen adalah efisiensi dalam menaiki tangga keberhasilan, kepemimpinan menentukan apakan tangganya bersandar pada dinding yang benar (Stephen R Covey, 1997: 91)

Drucker kemudian merumuskan lima kebiasaan pekerja pengetahuan yang efektif. *Pertama*, pekerja pengetahuan tahu ke mana perginya waktu mereka. Mereka bekerja secara sistematis untuk mengelola sedikit waktu mereka yang dapat mereka kendalikan. *Kedua*, pekerja pengetahuan berfokus pada

kontribusi keluar. Mereka menyelaraskan upaya mereka dengan hasil-hasil, bukannya dengan upaya. Mereka mengawali dengan pertanyaan, "Hasil apa yang diharapkan dari saya?" bukannya dengan pekerjaan yang akan dilakukan, apalagi dengan teknik dan alat-alatnya. *Ketiga* pekerja pengetahuan bersandar pada kekuatan (kekuatan mereka sendiri, kekuatan atasan, kolega dan bawahan mereka; serta kekuatan di dalam situasi, artinya pada apa yang bisa mereka lakukan). Mereka tidak bersandar pada kelemahan, mereka tidak memulai dengan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. *Keempat*, pekerja pengetahuan berkonsentrasi pada sedikit bidang utama di mana kinerja yang unggul akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Mereka memaksa diri sendiri untuk menetapkan prioritas, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan kecuali melakukan hal yang utama terlebih dahulu –dan tidak memecahkan perhatian mereka. *Kelima*, pekerja pengetahuan membuat keputusan yang efektif. Mereka tahu bahwa ini, pada dasarnya, adalah masalah sistem –masalah langkah yang tepat dalam urutan yang tepat. (Drucker, 2006: 72-73).

Sementara Covey merumuskan 7 kebiasaan manusia efektif yang terbagi dalam tiga kesadaran: *ketergantungan*, *kemandirian*, dan *kesalingtergantungan*. Seseorang dapat melaksanakan sesuatu yang benar jika ia mandiri, namun kemandirian hanya bisa dicapai bila kita menyadari ketergantungan kita. Untuk itu 3 kebiasaan pertama dari Covey berhubungan dengan penguasaan diri atau kemenangan pribadi yang memindahkan orang dari ketergantungan menuju kemandirian. Tiga kebiasaan pertama itu adalah jadilah proaktif, mulai dari tujuan akhir, dan dahulukan yang utama. Ketiga kebiasaan ini bagi Covey akan membuat orang

mengalami "kemenangan pribadi" (*private Civtory*)

Ketika seseorang sudah mandiri, ia dapat berhubungan dengan orang lain dalam simbiosis mutualisme atau dalam komunikasi partisipatoris. Kemenangan pribadi membuat seseorang memiliki dasar karakter yang dapat digunakan secara efektif untuk mengupayakan "Kemenangan Publik" (*Public Privacy*). Inilah tahap menyadari kesalingtergantungan yang menekankan pada 3 kebiasaan: kepribadian dalam kerja tim, kerja sama, dan komunikasi partisipatoris. Kemudian setelah itu adalah kebiasaan pembaruan diri, atau perbaikan terus-menerus yang menciptakan spiral pertumbuhan meningkat yang mengangkat pekerja pengetahuan ke tingkatan baru pengertian dan pelaksanaan.

Tujuh kebiasaan efektif yang digagas Covey ini dapat suatu upaya jalan tengah yang membebaskan guru dari paradoks institusi. Penerapan model administrasi/manajemen baru dimulai dari pembangunan manusianya. Filsafat manusia dalam hal ini dijadikan pertimbangan awal sebelum pelaksanaan administrasi yang bisa jadi berdasar pada kepentingan negara atau ekonomi. Covey menegaskan bahwa kepemimpinan harus lebih dulu daripada manajemen/administrasi, kepemimpinan adalah manusia sedangkan administrasi organisasi merupakan dunia rekayasa.

Menjadi manusia seutuhnya adalah tujuan dasar seluruh pendidikan, karena itu tujuh kebiasaan efektif ini dapat diadopsi menjadi kerangka baru manusia seutuhnya. Inilah yang disimpulkan oleh sekolah A.B Combs, sebagaimana diceritakan Covey dalam *The Leader in Me* (2009). Pada sekolah ini sebelum diterapkan sistem administrasi/manajemen baru dilakukan proses internalisasi manajemen diri bagi staf dan guru yang sesuai

dengan pola kerja manajemen baru itu. Manajemen diri itu adalah *The 7th Habits of Highly Effective People*.

7 KEBIASAAN	KONSEP UNTUK MURID
JADILAH PROAKTIF	Saya orang yang bertanggung jawab. Saya mengambil inisiatif. Saya menentukan tindakan, sikap dan suasana hati saya. Saya tidak menyalahkan orang lain, bila melakukan kesalahan, aya melakukan hal yang seherusnya saya lakukan tanpa diminta meskipun tak ada orang yang melihat
MULAI DARI TUJUAN AKHIR	Saya membuat rencana di depan dan menetapkan target. Saya melakukan hal-hal yang berarti dan membuat perbedaan. Saya adalah bagian penting dari kelas saya dan saya memberi kontribusi terhdap misi dan visi sekolah saya serta berusaha menjadi warga yang baik
DAHULUKAN YANG UTAMA	Saya menghabiskan waktu untuk hal-hal terpenting. Ini berarti saya mengatakan tidak pada hal-hal yang tak boleh saya lakukan. Saya menetapkan prioritas, membuat jadwal, dan melaksanakan renana. Saya disiplin dan terorganisir
BERPIKIR MENANG-MENANG	Saya menyeimbangkan keberanian, mendapatkan kemauan saya dan kemauan orang lain. Saya selalu mempertimbangkan perasaan orang lain jika terjadi perselisihan, saya mencari alternatif ketiga
BERUSAHA MEMAHAMI DULU, KEMUDIAN BERUSAHA DIPAHAMI	Saya mendengarkan gagasan dan perasaan orang lain. Saua mencoba melihat dari sudut pandang mereka. Saya mendengarkan orang lain tanpa memoting pembicaraan. Saya percaya diri menyuarkan gagasan saya. Saya menatap mata lawan bicara saya

<p>WUJUDKAN SINERGI</p>	<p>Saya menghargai kekuatan orang lain dan belajar darinya. Saya pandai bergaul, bahkan dengan orang yang berbeda dengan saya. Saya bekerja baik dalam kelompok. Saya meminta gagasan orang lain untuk memecahkan masalah karena saya tahu bila bekerja sama dengan orang lain kita dapat membuat solusi yang lebih baik daripada kalau bekerja sendiri. <u>Saya rendah hati</u></p>
<p>MENGASAH GER-GAJI</p>	<p>Saya menjaga tubuh dengan menjaga makanan, berolahraga, dan tidur secukupnya. Saya menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Saya belajar dengan berbagai cara dan di berbagai tempat, bukan hanya di sekolah. Saya meluangkan waktu mencari cara yang berarti untuk membantu orang lain.</p>

Ke-7 kebiasaan ini dianggap dapat mewakili seluruh keinginan orang tua, pebisnis, pemerintah, dan guru untuk siswa terhadap apa yang harus didapatkan di dunia pendidikan.

<p>Yang diinginkan Orangtua, Bisnis, dan Guru untuk Siswa</p>	<p>Tujuh Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif</p>
<p>Kemandirian</p>	<p>Kebiasaan 1-3</p>
<p>Inisiatif, motivasi diri</p>	<p>Jadilah proaktif</p>
<p>Kepercayaan diri</p>	<p>Mulai dari tujuan akhir</p>
<p>Keterampilan merencanakan</p>	<p>Dahulukan yang utama</p>
<p>Keterampilan meraih sasaran</p>	
<p>Menajhemen organisasi/waktu</p>	
<p>Keteragantuan</p>	
<p>Keetrampilan manajemen konflik</p>	<p>Kebiasaan 4-6</p>
<p>Keterampilan komunikasi (baik keterampilan mendengarkan maupun presentasi)</p>	<p>Berpikir menang-memang (menyeim-bangkan keberanian dengan memper-timbangkan kepentingan orang lain)</p>
<p>Kejujuran</p>	<p>Berusaha memahami dahulu, kemudian berusaha dipahami</p>

Keadilan	Wujudkan sinergi
Terbuka pada saran	
Kerja sama tim	
Pemecahan masalah	
Pembuatan Keputusan	
Kreativitas	
Pembaruan	
Keterampilan teknis	Kebiasaan 7
Sehat dan higienis	Mengasah Gergaji:
Stabilitas emosi	- Fisik
Keterampilan analisis	- Emosional
Keterlibatan dalam pekerjaan yang berarti	- spiritual

Seluruh kebiasaan ini dilatihkan kepada para guru dengan disertai penerapan alat-alat mutu seperti diagram Pareto, Ishikawa, diagram balon, flow chart, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan karena The 7 th Habits memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip dasar TQM. Misalnya, kebiasaan memulai dari Tujuan Akhir adalah model aktivitas administrasi dalam menentukan visi, misi, dan tujuan yang dapat dibantu dengan diagram Ishikawa; kebiasaan mendengarkan dulu kemudian berusaha untuk didengarkan merupakan prinsip kebiasaan yang dapat mendorong kinerja yang melayani pelanggan.

Begitu ke-7 kebiasaan ini diterapkan dalam kehidupan pribadi para guru (dan mereka merasakan manfaatnya), penerapan manajemen baru dapat dilakukan secara natural. Lebih dari ke-7 kebiasaan ini pun menjadi kurikulum laten yang diajarkan kepada para siswa. Siswa A.B Combs sejak dini sudah diajarkan ke-7 kebiasaan ini sekaligus juga dengan penerapan alat-alat mutu yang membuat prestasi mereka menjadi semakin baik.

Walhasil penerapan fungsi administrasi pada suatu lembaga pendidikan tidak sekadar kerangka bagi aktivitas

administrasinya, melainkan juga dapat menjadi kerangka belajar dan kehidupan keseharian. Pada sekolah A.B. Combs ini, TQM tidak hanya menjadi sistem manajemen, melainkan menjadi kebiasaan hidup seluruh civitas sekolah itu (kepala sekolah, guru, staf, dan siswanya).

Refleksi

Gagasan organisasi pembelajaran dari Peter M Senge (1996) dapat dijadikan dasar bagi kinerja kepala sekolah di masa mendatang. Maksudnya adalah lembaga sekolah bukan sekadar lembaga yang "memberi" pelajaran kepada siswanya, namun sebagai tempat orang-orang (guru, kepala sekolah, tenaga administratif, satpam, dll) mengembangkan kapasitasnya secara terus-menerus untuk menciptakan hasil-hasil yang mereka inginkan sesuai dengan pola pikir baru dan aspirasi kolektif yang bebas untuk tumbuh dan berkembang.

Dari perspektif ini, seorang kepala sekolah memiliki tugas untuk memimpin lembaga sekolah sebagai "lembaga belajar bersama". Kepala sekolah harus dapat menyiapkan anggotanya agar mampu membuat perencanaan, pengembangan karir dan pengetahuannya sendiri –bersamaan dengan kebutuhan sekolah dan siswa. Pada titik ini, kepala sekolah masa depan dapat menjadi pemimpin model "three in one", yaitu pemimpin lini-lokal, eksekutif, dan pengatur jaringan kerja internal secara sekaligus. Dalam konsep ini kepala sekolah melakukan tiga pekerjaan secara sekaligus: 1) mengarahkan lembaga kepada tujuan berdasarkan kapabilitas pembelajaran bersama; 2) memberikan keteladanan; 3) membangun benih budaya baru yang membantu dan memecahkan masalah pendidikan secara bersama-sama.

Epilog;

dari Teras Stoicisme

Begin each day by telling yourself: Today I shall be meeting with interference, ingratitude, insolence, disloyalty, ill-will, and selfishness”

Marcus Aurelius

Mulailah setiap hari dengan mengatakan pada diri sendiri: Hari ini saya akan bertemu dengan pelbagai gangguan, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang kurang ajar, yang tidak setia, memiliki niat buruk, dan yang penuh keegoisan! Begitulah saran Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoic, yang hari-hari terakhir ini jadi tenar di kalangan pembaca muda Indonesia.

Stoic adalah aliran filsafat Yunani yang mengajarkan cara memikirkan kehidupan sekaligus cara mengelola kekecewaan. Salah satu cara utamanya adalah dengan memilah “apa yang bisa dikendalikan” dari “apa yang tak bisa dikendalikan”. Manusia merasa susah, stress, cemas, kecewa, lalu akhirnya tidak produktif karena terlalu terfokus pada “apa yang tak bisa dikendalikan”. Karena menghabiskan waktu pada “apa yang tak bisa dikendalikan”, manusia stress. Kenapa? Sudah jelas tak bisa dikendalikan, malah ingin mengendalikannya. Sudah jelas api itu panas, malah ingin membuatnya sedingin air.

Mengendalikan dan mengelola “apa yang tak bisa dikendalikan” adalah mustahil, dan sia-sia. Saat seseorang mencoba melakukannya, ia akan merasa usahanya sia-sia, seraya menganggap dirinya tidak mampu, tak memiliki kompetensi apa-apa, tiada guna, dan penuh dengan kesialan. Padahal soalnya bukan pada “siapa dirinya?” atau “seberapa berkualitas dirinya?” melainkan pada melakukan hal sia-sia, yakni mengelola “apa yang tak bisa dikendalikan”.

Stoic memberi tips sederhana, yakni memberi tahu mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tak bisa dikendalikan. Apa saja? Yang bisa dikendalikan adalah diri kita (pikiran, perasaan, harapan, cara pandang, perilaku, sikap, dan yang terkait dengan diri), sementara yang tak bisa dikendalikan adalah sesuatu di luar diri kita. Yang internal bisa dikendalikan, yang eksternal tak bisa dikendalikan. Orang lain yang marah, egois, kurang ajar, tak tahu berterima kasih seperti ditulis Marcus Aurelius di atas tidak berada dalam kendali kita, mereka adalah “apa yang tak bisa dikendalikan”. Maka biarkanlah! Jika perlu katakana pada diri sendiri bahwa hari ini kita akan bertemu dengan mereka,

sehingga kita tak kecewa saat bertemu dengan orang seperti itu dan sangat bersyukur karena ternyata tak banyak bertemu dengan orang sejenis itu.

Stoicisme ini memang lagi *ngetrend*, lagi *viral*. Stoicisme menjadi gaya hidup baru. Filsafat Stoic membuat filsafat dianggap relevan untuk kehidupan, juga untuk manajemen tentu saja. Minimal untuk manajemen pribadi. Misalnya ada tulisan menarik mengenai Manajemen Waktu dengan menggunakan Stoicisme: *5 Stoic Lessons On Time Management* (lihat <https://dailystoic.com/time-management/>). Pada tulisan ini ada lima cara mengelo waktu.

Cara pertama, Ubah penundaan dengan Kepuasan menunda.

“Putting things off is the greatest waste of life: it snatches away each day as it comes, and denies us the present by promising the future.”

“Menunda sesuatu adalah pemborosan terbesar dalam hidup: ia merenggut setiap hari ketika datang, dan menyangkal kita saat ini dengan menjanjikan masa depan.”

— Seneca, *On The Shortness Of Life*

Seberapa sering kita bergumam pada diri sendiri, “Aku akan melakukannya nanti” atau “Eh, aku tidak ingin melakukan itu”. Rasanya enak saat ini—tentu saja. Tetapi pemanjaan keinginan impulsif tidak pernah konsisten dengan ajaran Stoicisme.

Jelas bagi kita bahwa kaum Stoa adalah orang-orang yang bertindak. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf berbakat masih menyempatkan diri untuk menulis di jurnalnya di tengah

kampanye militer dan gejolak politik. Epictetus juga, meskipun dilahirkan dalam perbudakan dan menderita cedera kaki yang melemahkan, berhasil membuka banyak sekolah filsafat dan membangun reputasi legendaris untuk dirinya sendiri. Ketika kita menunda-nunda, kita tidak menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita, kita juga tidak menghabiskan waktu kita dengan bermanfaat. Belum lagi, kami juga tidak hadir. Kita hidup di suatu tempat di kepala kita di mana kita secara fisik tidak.

Daripada membiarkan diri kita menunda hal-hal penting, kita selalu dapat memecah pekerjaan kita menjadi ledakan aksi energik yang singkat. Sebagai contoh, setiap tiga puluh menit kerja keras dapat dihargai dengan lima menit waktu telepon. Ini memungkinkan kita untuk sejenak terlibat dalam aktivitas yang kita nikmati, tetapi juga memanfaatkannya sebagai penguat positif untuk perilaku produktif. Kita harus menahan dorongan untuk menonton TV berjam-jam, bermain video game sepanjang malam, dan membuang waktu secara umum. Jika kita dapat belajar untuk menunda kepuasan yang datang dengan impulsif dan menyelesaikan tugas kita tepat waktu, kita menggunakan waktu kita dengan jauh lebih baik. Orang-orang Stoa tahu lebih baik daripada siapa pun—tidak ada waktu yang terbuang.

Kedua, Luangkan Waktu untuk hal-hal yang Penting saja.

“Nothing great is created suddenly, any more than a bunch of grapes or a fig. If you tell me that you desire a fig, I answer you that there must be time. Let it first blossom, then bear fruit, then ripen”

“Tidak ada sesuatu yang besar yang diciptakan secara tiba-tiba, seperti halnya seikat anggur atau buah ara. Jika

Anda memberi tahu saya bahwa Anda menginginkan buah ara, saya menjawab bahwa pasti ada waktu. Biarkan mekar dulu, lalu berbuah, lalu matang”

— Epictetus, *Discourses*

Terkadang kita dipaksa untuk terburu-buru. Mungkin bos kita menekan kita untuk memenuhi tenggat waktu tertentu, atau mungkin tekanan internal kita sendiri; tenggat waktu internal kita sendiri. Kita hidup di dunia yang serba cepat di mana segala sesuatunya darurat. Tetapi jika kita benar-benar ingin meningkatkan keterampilan manajemen waktu kita, lebih penting bagi kita untuk memperlambat dan diam.

Dalam *Stillness is the Key*, Ryan Holiday berbagi cerita tentang master panahan legendaris Awa Kenzo. Kenzo terkenal tidak pernah mengajari siswa cara membidik dan menembak sasaran dengan sengaja. Penguasaan busur hanya berasal dari penguasaan detasemen. “Tembakan tepat sasaran,” kata Kenzo, “hanyalah bukti lahiriah dan konfirmasi atas ketidakberdayaan Anda yang tertinggi, ketidakegoisan Anda, pengabaian diri Anda, atau apa pun yang Anda sukai menyebutnya keadaan ini”. Manajemen waktu sangat mirip dengan memanah dalam pengertian ini. Untuk mencapai target kita (atau tenggat waktu), kita harus melepaskan diri secara mental dari dorongan untuk terburu-buru melalui berbagai hal dan membalikkannya dengan cepat. Kita harus melihat pekerjaan kita dengan pikiran yang jernih secara objektif. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tentu saja. Tapi itu bisa dilakukan.

Kita harus ingat bahwa memperlambat konsisten dengan doktrin pemandu kita tentang hidup sesuai dengan alam. Alam

menuntut bahwa proses tertentu membutuhkan waktu yang lama. Seperti pertumbuhan pohon kayu merah, atau seperti yang ditunjukkan Epictetus, mekarnya buah ara. Ketika kita merasa perlu terburu-buru, itu sudah terlambat—kita telah gagal mengatur waktu kita dengan baik untuk tugas itu. Terburu-buru terkadang tidak dapat dihindari tentu saja, tetapi kami akan bodoh untuk tidak mengikuti saran Epictetus dan memperlambatnya pada hal-hal penting. Pekerjaan yang berkualitas membutuhkan waktu. Ini adalah cara itu selalu. Tetapi kita dapat mengatur waktu kita secara lebih efektif dengan berfokus pada hal-hal yang penting dan bergerak lebih cepat melalui hal-hal yang tidak penting. Sederhana seperti itu.

Ketiga, berhenti sejenak atau memencet tombol “pause” itu penting

“We must go for walks out of doors, so that the mind can be strengthened and invigorated by a clear sky and plenty of fresh air. At times it will acquire fresh energy from a journey by carriage and a change of scene, or from socializing and drinking freely. Occasionally we should even come to the point of intoxication, sinking into drink but not being totally flooded by it; for it does wash away cares, and stirs the mind to its depths, and heals sorrow just as it heals certain diseases.”

“Kita harus jalan-jalan keluar rumah, agar pikiran bisa diperkuat dan disegarkan oleh langit yang cerah dan banyak udara segar. Kadang-kadang ia akan memperoleh energi segar dari perjalanan dengan kereta dan perubahan pemandangan, atau dari bersosialisasi dan

minum secara bebas. Kadang-kadang kita bahkan harus sampai pada titik mabuk, tenggelam dalam minuman tetapi tidak sepenuhnya dibanjiri olehnya; karena itu menghilangkan kekhawatiran, dan menggerakkan pikiran ke kedalamannya, dan menyembuhkan kesedihan seperti halnya menyembuhkan penyakit tertentu.”

— Seneca, *On The Shortness Of Life*

Manajemen waktu seringkali menjadi sulit karena kita terjebak dalam rutinitas. Kami selalu dalam perjalanan, selalu berjuang untuk sesuatu. Dan sementara kesibukan ini sering terasa seperti produktivitas, itu tidak berkelanjutan atau cara yang bagus untuk menghabiskan waktu kita. Jadi bagaimana kita turun dari kereta hiruk-pikuk dan mengisi ulang? Dengan belajar mengelola jeda strategis kami. Pikiran perlu istirahat dari tuntutan hari itu, dan jika kita lalai memberi diri kita jeda yang sangat dibutuhkan itu, kita pasti akan kehabisan tenaga. Belum lagi, terus-menerus bekerja memaksa kita ke dalam semacam kabut di mana kita hanya memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya—dan itu bukan hidup.

Kami telah berbicara tentang kekuatan penjurnalan dan kebiasaan membaca sebelumnya, karena keduanya adalah cara yang bagus untuk berhenti sejenak dan mengisi ulang. Tapi tidak harus hanya dua itu. Berjalan-jalan juga merupakan cara yang efektif untuk memecah pekerjaan seseorang. Banyak orang menemukan bahwa bangun dari meja mereka sekali sehari dan berjalan-jalan sebentar dapat mengatasi stres dan kecemasan terkait pekerjaan mereka. Mendengarkan musik dan berolahraga juga merupakan

pilihan yang bagus—apa pun yang paling membedakan Anda dari pekerjaan Anda.

Kata-kata Seneca mendesak kita untuk berhenti tidak hanya untuk manajemen waktu yang efektif, tetapi untuk kesejahteraan kita sendiri. Kita harus menahan keinginan untuk terus bergerak dan ingat untuk memberi energi kembali. Membaca, menulis, berjalan, tidak masalah. Yang penting adalah kita menghentikan kegilaan yang bekerja dan melihat-lihat sesekali.

Keempat, Kuasai Tiga Domain waktu (lalu, kini, kelak).

“Life is very short and anxious for those who forget the past, neglect the present, and fear the future”

“Hidup ini sangat singkat dan cemas bagi mereka yang melupakan masa lalu, mengabaikan masa kini, dan takut akan masa depan”

— Seneca, *On The Shortness Of Life*

Seneca percaya bahwa waktu dibagi menjadi tiga bagian: masa lalu (yang tidak dapat diubah), masa kini (yang bersifat sementara), dan masa depan (yang tidak pasti). Strategi manajemen waktu kontemporer hampir selalu menginstruksikan siswa untuk merumuskan jadwal mereka sesuai dengan masa depan. Presentasi yang Anda miliki? Pastikan Anda memasukkannya ke dalam kalender Anda tiga bulan sebelumnya. Buat kartu flash untuk itu, dan latih tiga malam seminggu menjelang hari besar. Kata-kata Seneca membantu kita memahami bahwa masa depan bukanlah yang terpenting. Tidak, Stoa modern harus menguasai ketiga domain waktu.

Berkenaan dengan masa lalu kita, kita harus belajar darinya. Semua waktu lain di mana kami mencoba menulis jadwal untuk diri kami sendiri, atau menggunakan aplikasi organisasi, atau membeli perencana harian yang keren dari toko dolar—kami harus mengingat semuanya dan bagaimana mereka tidak bekerja untuk kami. Dengan begitu, kita tidak akan membuang waktu untuk mencoba hal-hal itu berulang kali.

Di masa sekarang, kita harus ingat bahwa itu bersifat sementara. Waktu terus bergerak maju, menua kita dan membawa kita lebih dekat ke kematian. Manajemen waktu yang efektif berarti menjaga pemikiran ini di garis depan. Mengetahui bahwa waktu terus berlalu, kami lebih menghargainya. Kami memotong BS yang tidak membantu kami tumbuh, dan kami menggandakan hal-hal yang berhasil. Inilah cara kita menjadi manajer waktu yang hebat.

Akhirnya, masa depan. Di bagian belakang setiap koin tantangan Premeditatio Malorum terdapat tulisan “Pengasingan, Penyiksaan, Perang, Bangkai Kapal”. Kata-kata itu berasal dari Seneca, saat dia bersikeras bahwa fokus pada kemungkinan hasil terburuk mempersiapkan pikiran kita untuk apa pun yang akan terjadi hari itu. Kita tidak bisa menghabiskan seluruh waktu kita untuk mengkhawatirkan masa depan. Kemudian, tentu saja, kita akan mengabaikan masa kini. Tapi kita harus selalu melihat ke cakrawala dan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Kuasai tiga bagian waktu, dan dengan melakukannya kita akan secara dramatis meningkatkan kemampuan kita untuk mengatur waktu kita.

Kelima, jaga dan rawatlah waktumu.

“People are frugal guarding their personal property; but as soon as it comes to squandering time they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy”

“Orang-orang hemat menjaga properti pribadi mereka; tetapi begitu tiba waktunya untuk menghambur-hamburkan waktu, mereka paling menyia-nyiakan satu hal yang benar untuk menjadi pelit”

— Seneca, *On The Shortness Of Life*

Di sini, pada saat ini, waktu berlalu. Kita tidak bisa mengejarnya karena ia akan selalu berlari lebih cepat dari kita. Kita tidak bisa memindahkannya ke belakang, atau meneruskannya lebih cepat dari yang sudah bergerak. Jumlah waktu yang kita miliki sepenuhnya dan sepenuhnya di luar kendali kita—tetapi cara kita menghabiskan waktu tetap menjadi milik kita.

Seneca pernah menulis bahwa bukan kita tidak punya cukup waktu, melainkan kita menggunakan waktu yang kita miliki dengan sia-sia. Kita gagal memperlakukan waktu sebagai sesuatu yang berharga meskipun itu adalah sumber daya kita yang paling berharga. Perbandingan yang menarik mungkin adalah mereka yang menghabiskan semua uang mereka dengan bodoh dan masih mengeluh tentang kesulitan keuangan mereka. Kami melihat orang-orang itu dan berpikir “betapa borosnya mereka” meskipun kami melakukan hal yang sama dengan waktu.

Saat kita mencoba membangun keterampilan manajemen waktu kita, kita harus mengingat contoh ini. Setiap jadwal yang kita buat,

setiap taktik yang kita terapkan—semuanya penting. Kita manusia adalah perdagangan komoditas paling berharga yang ditawarkan kehidupan, dan banyak dari kita terlalu sibuk dengan gangguan kehidupan sehingga kita gagal mengenalinya sampai semuanya terlambat.

Kita adalah tuan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Semua yang kita lakukan, setiap hari, adalah pilihan. Yang benar adalah, setiap orang berjuang untuk mengatur waktu mereka dan kita semua memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi kita tidak harus menjadi budak stres, kecemasan, dan ketidaksiapan.

Ingatlah untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoic ini: Pilih kepuasan yang tertunda, luangkan waktu Anda untuk hal-hal yang penting, jeda sesekali, kuasai tiga bagian waktu, dan perlakukan waktu sebagai komoditas utama. Semakin banyak strategi yang kita coba, semakin halus jadwal kita. Dengan demikian, hidup kita akan semakin halus.

Daftar Pustaka

A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, 2001, *Ilmu pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta,

Bagus, Loren , 1996, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Berten, K; 2001, *Etika*, Gramedia, Jakarta.

Bertens, Kees (1983), *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Gramedia, Jakarta

C.A. van Peursen, 1984 *Strategi kebudayaan*, BPK Gunung Mulia,

Jakarta,

- C.A. van Peursen, 1985, *Susunan ilmu pengetahuan: sebuah pengantar filsafat ilmu*, Gramedia,
- C.A. van Peursen, 1985, *Orientasi di alam filsafat*, Gramedia_, Jakarta 1985
- C.A. Van Peursen, 2003, *Menjadi filsuf : suatu pendorong ke arah berfilsafat sendiri*_ Qalam, Yogyakarta
- Carel, Havi et al (Eds), 2004, *What Philosophy is*, Continuum, London, 2004
- Cooper, Terry L. 2001. *Handbook of Administrative Ethics. 2nd Edition* (revised and Expanded). Marcel Dekker Inc. New York
- Covey, Stephen. 2009. *The Leader in Me*. Gramedia. Jakarta.
- Covey, Stephen, 1997, *Principle Centered Leadership*, Binarupa Aksara, Jakarta
- Covey, Stephen, 2008, *The 8th Habits*, Gramedia, Jakarta
- Csikszentmihalyi, Mihaly. 2003. *Good Business* (terjemahan). Mizan. Bandung.
- D.R Cooper dan P.S. Schindler, 1998) *Bussiness Research Methods*, McGraw-Hill, Singapora,
- Denhardt, Kathryn G. 1988. *The ethics of Public Service*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
- Dewey, J. (1950 [1938]), *Experience and Education*, New York: Macmillan.
- Dewey, J. (2007 [1916]), *Democracy and Education*, Teddington:

Echo Library.

Drucker, Peter F., 2006. *Classic Drucker* (terjemahan), BIP, Jakarta

Drucker, Peter F., 1997, *Manajemen di Tengah Perubahan* (terjemahan), Gramedia, Jakarta

Drucker, Peter F., 2004. *The Daily Drucker*. Elexmedia komputindo. Jakarta

Drucker, Peter F., 2006, *The Effective Executive*. Serambi Pustaka, Jakarta

Edershem, 2007. Elishabeth Haas. *The Definitive Drucker*. BIP. Jakarta

Elashmawi, Farid & Philip R. Haris, 1999, *Manajemen Multi Budaya, Kecakapan Baru Demi Sukses Global* (terjemahan), Pr Gramedia, Jakarta

Engkoswara, Metodologi Pengajaran, Jakarta, Bina Aksara, 1984.

Engkoswara. 1987. *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*. Depdikbus. Jakarta

Fatwan, Setyo, 2009. *Indonesian Studi & Lesson Learned from the Winners*, Gramedia. Jakarta

Felix A. Nigro & Lloyd G. Nigro, *Modern Public Administration*, terjemahan DS. Widodo, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Firdayanty & Alvin Soleh. 2011. *Smart Knowledge Worker*. Elexmedia Komputindo. Jakarta

Fowler, F.C. (2009). *Policy Studies for Educational Leaders: An Introduction* (third ed.). Boston: Pearson Education, Inc.

Garvin, D. 1993, *Building a Learning Organization*, Harvard Business

Review.

- Gaspersz, Vincent. 2007. *Organizational Excellent, Model Strategic menuju World Class Quality Company*. Gramedia. Jakarta.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donelly, Jr., 1996, *Organisasi dan Manajemen; Perilaku, Struktur, Proses*, (Terjemahan Djoerban Wahid) Erlangga, Jakarta. Gibson, James L., 1994, *Organization behavior, structure an proses, organisasi, perilaku, struktur dan proses* (Terjemahan Nunuk Ardiani) Bina Aksara, Jakarta .
- GINANJAR, Kartasasmita. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- GULICK, LUTHER, and L. URWICK (Eds.), 1937, *Papers on the Science of Administration*. Pp. vii, 195. New York: Institute of Public Administration, 1937
- Hardiman, F. Budi 2018, *Demokrasi dan Sentimentalis: Dari “Bangsa Setan-setan”, Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme Kanisius*, Yogyakarta Cetakan Pertama 2018, 2007: hal. 17).
- Hardiman, F. Budi *Demokrasi Delibratif : Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta , 2009
- Hardiman, F. Budi *Pemikiran Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche* , Gramedia, Jakarta, 2004
- Hardiman, F. Budi , 2003, *Melampaui modernitas dan positivisme: diskursus filosofis tentang metode ilmiah dan problem modernitas* , Kanisius, Yogyakarta,

- Hardiman, F. Budi, 2005, *Memahami negativitas: diskursus tentang massa, terror, dan trauma*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,
- Henry, Nicholas, 1995, *Public Administration and Public Affairs*, 4th ed New Jersey : Prentice Hall International,
- Henry, Nicholas. 1995. *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International, Inc.
- Howard A. Ozmon, 2012 *Philosophical Foundations of Education, 9th Edition*, Virginia Commonwealth University Virginia.
- Hunger, J. David. 2001. *Manajemen Startegis*, Penerbit Andi. Jogjakarta
- Imron, A. (1996). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isaac, S. and Michael, W.B. (1997). *Handbook in Research and Evaluation for Education and the Behavioral Sciences* (Third ed.). California: EdITS/ Educational and Industrial Testing Services.
- J Sudarminta, dalam *Epistemologi Dasar*, Gramedia, Jakarta, 2002
- Johnson, Elaine B. 2002. *Contextual Teaching & Learning*. MLC. Bandung
- Joiner, 1994, *Fourth Generation Management*, McGraw Hill. Inc. New York
- k. Berteens, *Panorama Filsafat Modern*, Gramedia, Jakarta, 1987
- Kaplan, Robert S. 1996. *Balanced Scorecard*. Gramedia. Jakarta
- Kartasmita, Ginadjar, 1997. *Administrasi Pembangunan*,

- Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar. "Etika Birokrasi dalam Administrasi Pembangunan: Tantangan Menghadapi Era Globalisasi". 1996. Orasi Ilmiah Dies Natalis ke -41 FISIPOL UGM. Yogyakarta, 19 September 1996
- Kasali, Rhenald. 2010. *Myelin Mobilisasi Intangibles Menjadi Kekuatan Perubahan*. Gramedia. Jakarta
- Krames, Jeffrey A. 2008. *Inside Drucker's Brain*. Gramedia. Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi , 1976. *Etka Administrasi Negara* , PT Raja Grafindo , Jakarta
- Liker, Jeffrey K. 2006. *The Toyota Way* (terjemahan), Erlangga. Surabaya
- Louis Kattsoff 1995 *Pengantar Filsafat* , Tiara Wacana ,
- Macbeath, John & Peter Mortimore. 2005. *Improving Effectiveness* (terjemahan), Grasindo. Jakarta
- Marquardt, Michael J. 1996. *Building the Learning Organization*, McGraww Hill. Singapore
- Martins, Jr (ed). 1979. *Professional Standards and Ethics*. Washington, DC: ASPA Publisher.
- May, Matthew E. 2009. *The Elegant Solution*, Gramedia. Jakarta.
- Meirawan, Danny. 2010. *Kepemimpinan & Manajemen Pendidikan Masa Depan*. IPB Press. Bogor.
- Muhammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (1988).

- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Bukumedia. Surabaya
- Naihasy, S. (2006). *Kebijakan Publik (Public Policy): Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: MIDA PUSTAKA.
- Nata, Abudin, 2002, *Tafsir Ayat ayat Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Nisjar Kardi & Winardi, 1997, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Managemen*, Mandar Maju, Bandung
- Nonaka & Takeuchi. 1995. *The Knowledge Creating Company*. Oxford University Press.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Orin B Graff, dkk, *Philosophic Theory & Practice in Educational Administration*, 1954)
- Ornstein, A.C., & Hunkins, F. P. (2004). *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*. Toronto Pearson.
- Pasaribu, Manarep. 2009. *Knowledge Sharing Meningkatkan Kinerja Layanan Perusahaan Studi Kasus: Best Practices Sharing di PLN*, Lexmedia Komputindo
- Patton, C. V. dan Sawicki, D. S. (1986). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice Hall.
- Perry, James L. 1989. *Handbook of Public Administration*. San Fransisca, CA: Jossey- Bass Limited.

- Polanyi, M. 1958. *Personal Knowledge*. Routledge & Kegan Paul
- Polanyi, M., 1980, *Competitive Strategy*, NY: New York Free Press
- Robbins, P. Stephen. (2001). *Perilaku Organisasi*. Jilid 1. Edisi Delapan. Diterjemahkan oleh: Dr. Hadyana Pujaatmaka. Erlangga, Jakarta.
- Robbins, P. Stephen. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Diterjemahkan oleh: Halida, S.E dan Dewi Sartika, S.S. Erlangga, Jakarta.
- Robbins, P. Stephen. (2003). *Perilaku Organisasi*. Edisi Sembilan, Jilid2. Edisi Bahasa Indonesia. PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Robbins, P. Stephen. (2006). *Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh*. Diterjemahkan oleh: Drs. Benyamin Molan. Erlangga, Jakarta
- Robert E.Wilson Educational Administration *Merrill's international education series* C. E. Merrill Books, 1966 University of California
- Robson, C. (1996). *Real World Research: A Resource for Social Scientist and Practitioner-Researchers*. Oxford – Cambridge: Blackwell.
- S, Soejono, 1978, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta :Nurcahya.
- Saati, Thomas & Louis GVargas. 1994. *Decision Making in Economic, Political, Social and Technology Environment*, University of Pittsburgh. Pittsburgh
- Sagala, Syaiful, 2007. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta. Bandung

- Sallis, Edward., 2008. *Total Quality Management in Education* (terkemahan), IRCiSOD, Yogyakarta
- Sangkala, 2006. *Intellectual Capital Management, Strategi Baru Membangun Daya SAing Perusahaan*. Yapensi. Jakarta
- Sangkala, 2007. *Knowledge Managemen Suatu Pengantar Memahami Bagaimana Organisasi mengelola Pengetahuan sehingga Menjadi Organisasi yang Unggul*, Grasondo. Jakarta
- Satori, Djam'an & Aan Komariah, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta., Bandung
- Saud, Udin Saefudin. 2009. *Inovasi Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Savage, Charles.M., 1990, *Fifth Generation Management*, Digital Equipment Corporation, USA
- Schumacher, Sally, 2001. *Research in Education A Conceptual Introduction*, Longman, Boston
- Senge, Peter M., & Richard Ross, 2001, *Buku Pegangan Kelima (Strategi dan alat untuk Membangun Organisasi Pembelajaran)*, Interaksara, Batam Center, Batam.
- Senge, Peter M., 1990. *The Fifth Discipline, The Art and Practice of The Learning Organization*, Doubleday, New York
- Setiarso, Bambang, dkk. 2009. *Penerapan Knowledge Management pada Organisasi*. Graha Ilmu. Jakarta
- Shafritz, Jay.M. dan E.W.Russell. 1997. *Introducing Public Administration*. New York, N.Y.: Longman.
- Sidharta. *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?*, Pustaka Sutra, Bandung.

- Simon, Herbert A, 1976, *Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*, Third Edition, The Free Press, Collier Macmillan Publishers, London, UK,
- Sindhunata, 1983, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, Gramedia, Jakarta
- Slater, Robert. 2000. *The GE Way Fieldbook*. Hikmah. Bandung
- Slavin, Robert E. 2008. *Cooperative Learning*. Nusa Media. Bandung
- Suhardan, Dadang & Nugraha Suhaarto., 2008. “Filsafat Administrasi Pendidikan”, Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Pengelolaan Pendidikan*, Jurusan Adpen, fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
- Suriasumantri, Jujun S, 2010, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suriasumantri, J. S, 2001, *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutisna, Oteng. 1983. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. Bandung: angkasa.
- Sutisna, Oteng. 1989. *Administrasi Pendidikan Dasar Teori untuk Praktek Profesional*. Angkasa. Bandung
- Sveiby, 1992. “Strategy Formulation in Knowledge-Intensive Industries” In Hussey (ed.) *International Review of Strategic Management*, Vol. 3, 1992
- Sveiby, 1997. *The New Organizational Wealth-Managing and Measuring Knowledge-Based Assets*. Berret-Koehler, San Fransisco

- The Liang Gie. 2006. *Etika Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Theodore Brameld. 1990 *The School as Social Vanguard Philosophies of Education in Cultural Perspective*, , Dryden Press, New York
- Tilaar, H..R., 2008. *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*. Rosda Karya, Bandung
- Tilaar, H..R., 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan, 2008. *Pengelolaan Pendidikan*, Jurusan Adpen, fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
- Tim Editor, 2006. *Research University, Konsep dan Model Kajian Keilmuan dalam Pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. SUGUDA Press. Jakarta
- Tjiptono, Fandy & Anastasia Diana, 2001, *Total Quality Management*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- Topatimasang, R., et al. (eds.). (2005). *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Ulum, Ihyaul. 2010. *Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris*. Graha Ilmu. Jakarta
- Umar, Husein. 2002. *Strategic Management in Action*. Gramedia. Jakarta
- Van Peursen, 2008, *Filsafat Sebagai Seni untuk Bertanya* , Dikutip dari buku B, Arief

- Wachs, M. 1985. *Ethics in Planning Center for Urban Policy Research*, The State University of New Jersey.
- Wahab, A.S. (1998). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW.
- Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syeh M. Naquib Al-Attas*, Mizan Pustaka, Bandung, 2003
- Weimer, D.L. dan Vining, A.R. (2005). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (Fourth Edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc.
- Whitney, Diana. 2006. *The Power of Appreciative Inquiry*, BFirst. Yogyakarta.
- Widayana, Lendy. 2005. *Knowledge management Meningkatkan Daya Saing Bisnis*. Bayumedia. Surabaya.
- Wijanto, Serian. 2009. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efektif, Efisien, dan Ekonomis*. Salemba Empat. Jakarta
- Wildavsky, A. (1979). *Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis*. Boston: Little, Brown and Company.
- Wong, Harry K & Rosemary T. Wong, 2009. *The First Days of School* (terjemahan), Pustaka Pelajar.
- Yeoih, Michael. 1995. *Vision & Leadership Values And Strategies Towards Vision 2020*, Pelanduk Publication